

**PERAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM TENAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)
(Studi di Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo)**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Sosiologi



Oleh:

DEDE HAFIDZ AL FARUQ

1706026054

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2021**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Proposal Skripsi

Kepada.
Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Dede Hafidz Al Faruq

NIM : 1706026054

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : “Peran Masyarakat Dalam Program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi di Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo)”.

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Juni 2021

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi



Nur Hasyim, M.A

NIDN : 2023037303

Tanggal : 28 Juni 2021

Bidang Metodologi & Tatatulis



Akhriyadi Sofian, M.A

NIDN : 2022107903

Tanggal: 28 Juni 2021

SKRIPSI
PERAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN (TKSK)
(Studi di Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo)

Disusun oleh :

Dede Hafidz Al Faruq

1706026054

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi

Pada tanggal 02 Juli 2021 dan dinyatakan **LULUS**

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Dr. H. Missah Zulfa Elisabeth, M.Hum

NIP. 19620107 199903 20001

Penguji I

Drs. H. Ghufron Ajib, M.Ag

NIP. 19660325 199203 1001

Pembimbing I

Nur Hasyim, M.A

NIDN : 2023037303

Sekretaris

Nur Hasyim, M.A

NIDN : 2023037303

Penguji II

Endang Supriadi, M.A

NIDN : 2015098901

Pembimbing II

Akhriyadi Sofian, M.A

NIDN : 2022107903

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang maupun suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 Juni 2021



Dede Hafidz Al Faruq

Nim 1706026054

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Masyarakat Dalam Program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi di Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo)”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, berpengetahuan dan berintelektual.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan penulis dalam menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang. Penulis mengetahui dan menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna, dan mudah-mudahan nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang bersedia membacanya.

Skripsi ini dibuat dengan ketulusan hati penulis dengan mendapat banyak dukungan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral ataupun materiil dan alhasil skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materiil, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag yang bertanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum yang memberi izin penelitian, serta memberi semangat dan perhatian kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Dr. Mochamad Parmudi, M.Si dan Akhriyadi Sofian, M.A yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis.
4. Pembimbing I, Nur Hasyim, M.A yang memberikan bimbingan, *review*, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pembimbing II, Akhriyadi Sofian, M.A yang memberikan bimbingan, *review*, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
7. Seluruh *civitas academica* dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu proses akademik penulis.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kecamatan Wadaslintang, Veronika Feni Retno Susanti S.Sos, yang membimbing, mendampingi, dan meluangkan waktu sehingga penulis mendapatkan data yang mendukung dalam skripsi ini
9. Kepala Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Triyono yang memberikan ilmu, pengetahuan, dan mendampingi sehingga penulis mendapatkan data yang mendukung skripsi ini
10. Sekertaris dan Admin Data Terpadu Kesejahteraan Sosiak (DTKS) Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Sudibyo yang memberikan ilmu, dan pengetahuan sehingga penulis mendapatkan data yang mendukung dalam skripsi ini
11. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Pujiyatno yang memberikan ilmu, dan pengetahuan sehingga penulis mendapatkan data yang mendukung dalam skripsi ini
12. Agen BPNT Desa Besuki Sri Erlina, dan selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus penerima BST, dan BPNT masyarakat Desa Besuki yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu, pengetahuan sehingga penulis mendapatkan data yang mendukung dalam skripsi ini
13. Orang tua penulis, Sutiyono, Agus Krisdiyanto, Nurtanti, dan Ernawati, yang selalu memberikan semangat, doa, dan nasihat kepada penulis
14. Keluarga besar, Sania Azzahra, Meli, Deka, Dicky, Bella Yundara Roziq, Talita, Raihanah, Hafidzah, Winarti, Heri Hadi, Sulastri, Akhmad, Hendri, Adel, (alm) Sri

Utami, Muhdiharjo, dan keluarga Bulek Novi yang telah memberikan doa, semangat, dan rasa kasih sayang

15. Devisi Media Pilar PKBI Jawa Tengah, Wulan, Nia, Zunari, Tico dan Alan, yang telah memberikan ilmu perihal dunia kerelawanan kepada penulis sehingga bisa tumbuh dan berkembang
16. Dosen perwalian Endang Supriadi, M.A., dan mahasiswa perwalian Endang Supriadi M.A., Sardana, Asror, Alif, Salsabilla, Anggita, Nurul, Diana, Silvia, Safa'atun, yang telah saling memberikan semangat kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini
17. Teman-teman penulis, Tata, Yaya, Davi, Agung, Peni, Timut, Ninda, Egi, Ibam, Cardina, Maria, Zaraida, Desi, Nurul, Puji, Towiyah, Alfian, Yusuf, Dika, Raji, Kak Ika, Kak Fu, Kak Jannati, Kak Muya, Kak Weni, Kak Feni, Kak Afra, Kak Ipih, Kak Setya, Kak Irul, Kak Riski H, Kak Abdan, Anang, Nafis, Dita, Adi, Citra, Hani, Tatang, Doni, Putri, yang telah memberikan semangat dan dukungan pada penulis.
18. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis secara langsung dan tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis mohon maaf kepada semua pihak atas segala khilaf, dalam perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama melaksanakan penelitian Skripsi dari penulis. Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi dari penulis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 28 Juni 2021

Penulis,



Dede Hafidz Al Faruq

Nim: 1706026054

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan segala syukur Alhamdulillahirobbil'alamin, saya persembahkan sebuah karya kecil ini:

Untuk orang tua saya tercinta Bapak Sutiyono, dan Ibu Nurtanti yang selalu memberi dukungan dan do'a yang selalu menyertai disetiap langkah saya dalam proses mencari ilmu

Untuk almamater yang telah menjadi tempat saya dalam mencari ilmu yakni program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, semoga kedepannya menjadi Universitas terdepan dan mencetak sarjana yang berkualitas.

MOTTO

Veritas Lux Mea

-Seoul National University-

Kekuatan terbesar, ada dalam diri setiap individu. Selalu berfikir positif untuk setiap pikiran yang kita miliki agar kita selalu dimudahkan dalam setiap langkah yang kita akan ambil. Langkah yang jauh berawal dari satu langkah yang pasti.

-Dede Hafidz Al Faruq-

Ujian dalam hidup yang kita miliki berbeda dari setiap orang yang kita temui. Alangkah lebih baik untuk mulai bersyukur dan ikhlas cara ini adalah dua mantra untuk bisa berdamai dengan diri sendiri.

-Dede Hafidz Al Faruq-

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) Jawa Tengah tahun 2020 menyebutkan bahwa Kabupaten Wonosobo, masuk ke dalam kabupaten termiskin nomor 2 (dua) di provinsi. Hal tersebut menyebabkan peran masyarakat untuk menunjang pemenuhan kesejahteraan sosial secara komprehensif perlu ditingkatkan. Pemerintah melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mengupayakan untuk peningkatan peran masyarakat dalam kesejahteraan di tingkat paling rendah yaitu desa. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat di Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, bagaimanakah penyiapan pelaksanaan program kesejahteraan sosial oleh TKSK dan bagaimanakah pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial di Desa Besuki

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan naratif deskriptif. Penelitian ini dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan hubungan sosial masyarakat. Data primer berupa data yang didapat langsung oleh penulis dari hasil wawancara langsung dengan informasi dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen berupa gambar, data-data, untuk melengkapi data dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Besuki, TKSK Wadaslintang, perangkat Desa Besuki. Penelitian ini menggunakan analisis peran sebagai kerangka teori. Analisis peran melihat bahwa perilaku nyata (peran atau partisipasi) pada perkumpulan masyarakat dalam corak kebudayaan atau identitas yang berbeda posisi, seperti ranah sosial, pembagian kerja, perilaku, motivasi, sanksi, kesesuaian sikap dan perilaku, dan kemandirian antar pelaku sosial.

Hasil penelitian menunjukkan, permasalahan kesejahteraan sebagai tanggung jawab bersama bukan hanya pemangku jabatan. TKSK dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat berupa, persiapan program kesejahteraan sosial oleh TKSK, melakukan pemetaan sosial, melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melakukan koordinasi bersama, melakukan sinergi, integrasi dan sinkronisasi, kegiatan pelayanan dan bimbingan sosial, dan mengembangkan partisipasi sosial. Pelaksanaan peran masyarakat masyarakat (peran perencanaan program, peran pada pelaksanaan program, peran pada menerima hasil program, dan peran pada monitoring program). Program bantuan Desa Besuki BST dan BPNT. Faktor peran masyarakat, memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukung: faktor budaya masyarakat, faktor program dan kepemimpinan, faktor pendidikan dan usia masyarakat, dan faktor kerjasama masyarakat, faktor penghambat: faktor informasi dan komunikasi masyarakat, faktor partisipasi masyarakat, dan faktor fasilitas tidak optimal, pelaksanaan peran masyarakat dalam kesejahteraan sosial di Desa Besuki masih perlu untuk ditingkatkan

Kata Kunci: Peran, Masyarakat, Kesejahteraan Sosial

ABSTRACT

This research was motivated by the results of the 2020 Central Java Development Plan Deliberation (MUSREMBANG) which stated that Wonosobo Regency was the second poorest district in the province. This causes the role of the community to support the fulfillment of comprehensive social welfare needs to be improved. The government through the District Social Welfare Personnel (TKSK) seeks to increase the role of the community in welfare at the lowest level, namely the village. Based on the problems above, this study aims to find out how the role of the community in Besuki Village, Wadaslintang District is, how is the preparation for the implementation of social welfare programs by TKSK and how is the implementation of social welfare activities in Besuki Village.

This study uses qualitative research methods, while the approach in this study uses descriptive narrative. This research can show people's lives, history, behavior, organizational functionalization, social movements and social relations. Primary data is in the form of data obtained directly by the author from direct interviews with information in this study, while secondary data is obtained from documents in the form of images, data, to complete the data in the study. The subjects in this study were the Beneficiary Families (KPM) of Besuki Village, TKSK Wadaslintang, Besuki Village officials. This study uses role analysis as a theoretical framework. Role analysis sees that real behavior (role or participation) in community associations is in a cultural style or identity with different positions, such as the social domain, division of labor, behavior, motivation, sanctions, conformity of attitudes and behavior, and independence between social actors.

The results of the study show that welfare issues are a shared responsibility not only for office holders. TKSK in the context of increasing community participation in the form of preparing social welfare programs by TKSK, conducting social mapping, implementing and assisting the implementation of social welfare, coordinating together, synergizing, integrating and synchronizing, service activities and social guidance, and developing social participation. Implementation of the community's role (the role of program planning, role in program implementation, role in receiving program results, and role in program monitoring). Besuki Village BST and BPNT assistance programs. Community role factors, have supporting factors and inhibiting factors, supporting factors: community culture factors, program and leadership factors, education and community age factors, and community cooperation factors, inhibiting factors: community information and communication factors, community participation factors, and facilities factors is not optimal, the implementation of the community's role in social welfare in Besuki Village still needs to be improved

Keywords: Role, Society, Social Welfare

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian	19
H. Teknik Analisis Data	24
I. Sistematika Penulisan	25
BAB II	28
PERAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN TEORI BRUCE J. BIDDLE DAN EDWIN J. THOMAS	28
A. Peran dan kesejahteraan sosial	28
1. Konsep peran menurut ahli.....	28
2. Konsep kesejahteraan sosial	31

3. Konsep kesejahteraan sosial menurut Islam	34
B. Teori Peran Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas	35
1. Konsep-konsep Teori Peran	36
2. Ciri-ciri Teori Peran.....	40
BAB III	43
DESA BESUKI: GAMBARAN PRAKTIK KESEJAHTERAAN SOSIAL	43
A. Gambaran Umum Desa Besuki.....	43
1. Kondisi geografis Desa Besuki	43
2. Kondisi topografis Desa Besuki	44
3. Kondisi demografis Desa Besuki	45
B. Program kesejahteraan sosial Desa Besuki.....	57
1. Sejarah masuknya program	57
2. Pengurus program kesejahteraan	60
3. Kegiatan-kegiatan program	64
BAB IV	66
PERSIAPAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH TKSK DI BESUKI	66
A. Persiapan program kesejahteraan sosial oleh TKSK.....	66
1. Melakukan pemetaan sosial.....	67
2. Melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.....	70
3. Melakukan koordinasi bersama	72
4. Melakukan sinergi, integrasi dan sinkronisasi.....	74
5. Kegiatan pelayanan dan bimbingan sosial.....	75
6. Mengembangkan partisipasi sosial.....	77
B. Pelaksanaan peran masyarakat dalam kesejahteraan sosial.....	79
1. Peran pada perencanaan program	79
2. Peran pada pelaksanaan program.....	83
3. Peran pada menerima hasil program.....	86
4. Peran pada monitoring program	88
C. Peran TKSK dalam bantuan kesejahteraan sosial di Desa Besuki	92
1. Bantuan Sosial Tunai (BST).....	93
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	98
BAB V	109

PELAKSANAAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA BESUKI	108
A. Faktor pendukung peran masyarakat Desa Besuki.....	109
1. Faktor budaya masyarakat.....	109
2. Faktor program dan kepemimpinan	112
3. Faktor pendidikan dan usia masyarakat	113
4. Faktor kerjasama masyarakat	114
B. Faktor penghambat peran masyarakat	115
1. Faktor informasi dan komunikasi masyarakat.....	116
2. Faktor partisipasi masyarakat	117
3. Faktor kinerja tidak optimal	118
BAB VI.....	121
PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	137

DAFTAR TABEL

TABEL 1.....	21
Informasi tentang informan wawancara.....	21
TABEL 2.....	45
Jumlah dusun, jumlah RT dan RW, dan jumlah penduduk tahun 2018, 2019, 2020.....	45
TABEL 3.....	46
Penduduk Desa Besuki berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018, 2019, 2020.....	46
TABEL 4.....	49
Mata pencaharian masyarakat Desa Besuki tahun 2018, 2019, 2020.....	49
TABEL 5.....	56
Pemeluk agama masyarakat Desa Besuki tahun 2018, 2019, 2020.....	56
TABEL 6.....	60
Susunan organisasi jabatan pemerintahan Desa Besuki tahun 2020.....	60
TABEL 7.....	62
Susunan anggota BPD Desa Besuki tahun 2020.....	62
TABEL 8.....	63
Susunan anggota LPMD Desa Besuki tahun 2020.....	63
TABEL 9.....	104
Keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT Desa Besuki	104

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.....	43
Peta Kecamatan Wadaslintang.....	43
GAMBAR 2.....	87
Renovasi rumah masyarakat tidak mampu Desa Besuki.....	87
GAMBAR 3.....	91
Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Besuki.....	91
GAMBAR 4.....	94
Pembagian BST Desa Besuki di Kantor Pos Wadaslintang.....	94
GAMBAR 5.....	100
Pembagian BPNT di Dusun Sikapat RT 02 RW 03 Desa Sikapat.....	100
GAMBAR 6.....	101
Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) masyarakat Desa Besuki.....	101
GAMBAR 7.....	110
Budaya gotongroyong masyarakat Desa Besuki.....	110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	129
Musyawarah masyarakat Desa Besuki.....	129
Lampiran 2.....	130
Pelaksanaan pembagian BPNT Desa Besuki.....	130
Lampiran 3.....	131
Pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	131
Lampiran 4.....	132
Gotongroyong pembangunan infrastruktur jalan masyarakat di Desa Besuki.....	132
Lampiran 5.....	133
Pelaksanaan pembagian BST Desa Besuki.....	133
Lampiran 6.....	134
Wawancara dengan narasumber.....	134
Lampiran 7.....	135
Surat pernyataan wawancara narasumber.....	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran dapat diartikan sebagai pola yang diharapkan oleh masyarakat dari seorang individu yang memiliki status atau menempati posisi tertentu dalam masyarakat. Peran juga selalu terarah kepada relasi dengan orang lain. Beberapa hal yang dapat dilihat dari peran adalah peran sebagai fungsi dan peran sebagai proses dalam praktiknya, peran sebagai fungsi yaitu jika seorang individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya sedangkan peran sebagai proses yaitu menentukan apa yang diperbuat seorang individu bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran memiliki konflik di dalamnya, penanggulangannya dipaparkan oleh Robert Merton dapat dikurangi dengan pembagian waktu dalam menjalankan peran-peran itu baik yang berasal dari status tertentu maupun yang berasal dari dua atau lebih status (*status set*), dengan demikian berbeda-beda dari individu satu dengan yang lainnya. Dari perbedaan ini dapat dikaitkan dengan status tertentu tidak selalu dapat terintegrasi dengan baik. Dari sinilah individu yang menduduki status tertentu dapat juga ditarik kepada peran yang berbeda di waktu yang sama, hal ini biasa disebut dengan ketegangan (*role set*) akibat dari peran-peran yang ada dan berbeda ruang dalam penggunaannya (Raho, 2014).

Berpijak pada aktor yang memainkan peran dalam penelitian ini adalah masyarakat, ada beberapa faktor yang membuat terbentuknya masyarakat. *Pertama* mengenai hasrat berdasarkan naluri atau kehendak secara biologis untuk mencari teman dalam hidup. *Kedua* mengenai kelemahan ketika manusia yang sangat mendesak untuk mencari kekuatan bersama mereka akan melakukan berserikat dan berkumpul sehingga bisa berlindung bersama juga bisa memenuhi kebutuhan dalam kehidupan. *Ketiga* mengenai pendapat dari Aristoteles menyebutkan bahwa manusia adalah (*zoon politicon*) yakni makhluk sosial yang menyukai hidup secara bergolongan atau mencari teman untuk hidup secara bersama. Dan *Keempat* adanya kesamaan keturunan, nasib, keyakinan, cita-cita, kebudayaan dan yang lainnya (Herabudin, 2015).

Pada kenyataannya, masyarakat memiliki permasalahan dalam kesejahteraan sosial. Dalam mencapai sebuah kondisi yang sejahtera, tidak lepas dari adanya pembangunan kesejahteraan sosial. Pelaksanaannya dalam rangka mencapai kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera secara jasmani, rohani, dan sosial sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Pembangunan kesejahteraan dilaksanakan dalam konteks preventif atau sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan, dan developmental yaitu mengembangkan fakta atau prinsip dari suatu pengetahuan yang sudah ada, kuratif-rehabilitatif dan supportif (Sudrajat, dkk, 2017).

Kesejahteraan sosial menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung. Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas dari kesejahteraan sosial, *Pertama* perlindungan sosial yang bersifat formal adalah berbagai skema jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara yang umumnya berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, misalnya tunjangan bagi orang cacat atau miskin, tunjangan pengangguran, tunjangan keluarga. *Kedua* perlindungan sosial informal antara lain usaha ekonomi produktif, kredit mikro, arisan, dan berbagai skema jaring pengaman sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, organisasi sosial lokal, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Suharto, 2014).

Pengaplikasian konsep pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya bagi mereka yang masuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) saja, tetapi juga seluruh masyarakat. Keseimbangan antara kondisi manusia dan lingkungan sosialnya, menjadi titik perhatian yang penting dalam menciptakan kesejahteraan. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana pembangunan secara umum tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Pembangunan harus dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Berangkat dari titik ini, upaya yang terus dihembuskan yaitu mengurangi secara signifikan peran-peran dominan pemerintah dan sekaligus membuka ruang-ruang baru bagi masyarakat untuk menjadi pelaku dalam pembangunan.

Islam dalam Al-Quran juga membahas mengenai kesejahteraan sosial mengenai prinsip keadilan pada masyarakat, dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ الْعَدْلُ ۗهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Pada ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT dalam menyebutkan orang-orang yang beriman untuk menjadi sebagai penegak keadilan. Maka dari itu penegakan keadilan menjadi dasar untuk manusia agar adil kepada siapapun dan dalam bidang apapun. Kesejahteraan adalah hak bagi siapa saja baik itu orang miskin ataupun kaya, untuk mendapatkan kesejahteraan secara jasmani dan rohani. Dan dari sinilah kita diajak untuk bertakwa kepada Allah SWT, karena Allah SWT Maha teliti terhadap apa yang manusia kerjakan (Aapun itu).

Dan pada Al-Quran dalam Surah Al-Maun, surat ke 107 dalam Al Quran dengan jumlah ayat 7 (tujuh) menjelaskan mengenai bantuan penting. Surah ini diturunkan setelah Surah Al Quraisy dan termasuk dalam golongan surat Makkiah

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۚ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۗ

Artinya: “1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, 2. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, 4. Maka celakalah orang yang shalat, 5. (Yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, 6. yang berbuat riya, 7. dan enggan (memberikan) bantuan”.

Pada Surah Al-Maun terkandung makna mengenai bantuan penting, kita sebagai umat manusia yang diharuskan untuk tidak mendustakan agama, mengahardik anak yatim, dan tidak memberi makan makan anak yatim. Kesejahteraan sosial mengandung unsur untuk lebih memperhatikan Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk mengembangkan dan tumbuh bersama dengan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pemenuhan kesejahteraan sosial.

Dalam Undang-undang (UU) No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, memaparkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan social (UU No. 11 Tahun 2009).

Aspek-aspek spesifik yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat. *Pertama*, kependudukan, yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, migrasi dan fertilitas. *Kedua*, kesehatan yang meliputi tingkat kesehatan masyarakat baik itu angka kematian bayi, angka harapan hidup dan angka kesakitan, ketersediaan fasilitas kesehatan, serta status kesehatan ibu dan balita. *Ketiga*, pendidikan yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi sekolah dan fasilitas pendidikan. *Kempat*, ketenagakerjaan, yang meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja dan pekerjaan anak. *Kelima*, pola konsumsi dan tingkat konsumsi rumah tangga, yang meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (Makanan dan non makanan). *Keenam*, perumahan dan lingkungan, yang meliputi kualitas rumah (Tempat tinggal), fasilitas lingkungan perumahan dan kebersihan lingkungan. *Ketujuh*, sosial budaya, yang meliputi akses untuk memperoleh informasi dan hiburan, dan kegiatan susial budaya (Sunarti, 2006 dalam Sodiq, 2015)

Kemiskinan dapat diukur, penjelasannya dalam perbedaan kemiskinan ada dua bentuk yaitu, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. *Pertama* kemiskinan absolut,

apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, yang digambarkan dengan garis kemiskinan tersebut. *Kedua* kemiskinan relatif, keadaan perbandingan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah di atas garis kemiskinan. Sehingga sebenarnya tidak termasuk miskin dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain (Fahrudin, dkk: 273)

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (KEMENSOS) pada tahun 2009, membentuk pekerja sosial yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dalam pelaksanaannya akan bersinergi, berjejaring, dan bermitra dengan berbagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Ada 3 (tiga) fungsi dari TKSK yaitu, koordinator, administrator, dan fasilitator. *Pertama*, koordinator melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi yang berkaitan dengan kerjasama, sinergi, integrasi dan sinkronisasi dengan PSKS, Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial dan berbagai pemangku kepentingan. *Kedua*, administrator melakukan perencanaan dan pengorganisasian serta melaksanakan dan memantau penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dan *Ketiga*, fasilitator melaksanakan pendampingan sosial, secara langsung maupun tidak langsung (Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial)

Tugas yang dimiliki oleh TKSK dalam kesejahteraan sosial masyarakat tidaklah mudah, sesuai dengan peran dan tugas yang diberikan dari Kementerian Sosial (KEMENSOS) hanya ada 1 (satu) orang tenaga TKSK yang memiliki cakupan 1 (satu) wilayah kecamatan diseluruh wilayah Indonesia. Selaras dengan hal tersebut, tujuan adanya TKSK untuk menumbuhkan kembali peran masyarakat dalam membangun kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Dengan pengaruh positif dan dorongan dalam pemenuhan kesejahteraan sosial, masyarakat diharapkan kedepannya bisa untuk mempraktikkan ilmu dan pengetahuan yang akan diberikan oleh TKSK dalam praktik kesehariannya untuk tercapainya kesejahteraan sosial yang ada pada wilayahnya.

Kabupaten Wonosobo memiliki predikat wilayah termiskin nomor 2 (Dua), daerah lainnya dari kabupaten di Jawa Tengah yang termasuk dalam 14 (Empat belas) besar kategori kemiskinan (Merah) yakni, Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemasang, Purbalingga, Rembang, Banjarnegara, Sragen, Banyumas, Klaten, Demak, Grobogan,

Purworejo, dan Blora. Hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 adalah pemerintah akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui beberapa cara yaitu dengan mendorong partisipasi anak agar sekolah dengan pembiayaan gratis melalui SPP gratis yang diberikan pemerintah wilayah tersebut. Sektor pekerjaan lainnya seperti nelayan dan petani juga akan menjadi fokus pemerintah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada sebelumnya di dalam masyarakat (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) Provinsi Jawa Tengah 2020).

Kabupaten Wonosobo yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,27%, IPM berfungsi untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dan memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Garis kemiskinan yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo sebanyak 131,30 (Rp/Kapita/Bulan) atau dalam presentase 16,63% dari jumlah penduduk 790,49 ribu (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo tahun 2020). Dalam kebaruan oleh BPS ada beberapa hal yang berubah dalam menentukan IPM yaitu angka melek huruf digantikan dengan angka harapan lama sekolah, dan Produk Domestic Bruto (PDB) per-kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per-kapita.

Studi ini tertuju pada salah satu wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo yaitu Kecamatan Wadaslintang yang memiliki 17 (tujuh belas) desa, Desa Besuki menjadi desa dengan jumlah penerima terbanyak dari bantuan sosial di Kecamatan Wadaslintang pada tahun 2020 dari total jumlah bantuan sosial sebanyak 2.151 Kartu Keluarga (KK). Penjabaran dari data diperoleh angka, Desa Besuki 591 KK, disusul dengan desa yang lainnya yaitu Kumejing 307 KK, Gumelar 216 KK, Trimulyo 143 KK, Kaligowong 133 KK, Panerusan 119 KK, Tirip 115 KK, Wadaslintang 94 KK, Karanganyar 87 KK, Ngalian 68 KK, Plunjaran 66 KK, Kalidadap 54 KK, Somogede 47 KK, Sumpersari 33 KK, Sumberjo 30 KK, Lancar 26 KK, dan Erorajo 22 KK (Data Penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) Provinsi Kecamatan Wadaslintang tahun 2020).

Pelaksanaan kesejahteraan sosial dari Desa Besuki yang memiliki memiliki 4 (Empat) dusun yaitu Dusun Kalisalak, Dusun Kesenet, Dusun Sikapat, dan Dusun Sipait memerlukan peran masyarakat. Observasi yang di lakukan di wilayah ini, memberi jawaban bahwasanya di Desa Besuki tidak hanya akan fokus pada pemberian bantuan

baik tunai ataupun non tunai, melainkan dalam sektor-sektor lainnya juga akan dikembangkan. Beberapa pemenuhan dari fasilitas seperti akses jalan, kesehatan, dan pendidikan menjadi beberapa faktor utama yang ditempuh dalam pembangunan untuk pemenuhan kesejahteraan sosial masyarakat. Masyarakat juga dituntut aktif ikut serta dalam segala upaya yang ditempuh. Sehingga upaya yang sudah dijalankan bisa membuahkan hasil dengan maksimal.

Masyarakat Desa Besuki dalam peran partisipasi penyelenggaraan program kesejahteraan sosial, keberadaannya dibutuhkan dalam pemecahan masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan orang-orang miskin yang ada di Desa Besuki. Namun demikian, dari observasi yang sudah dilakukan memberikan hasil bahwa masalah kemiskinan yang sebenarnya berhubungan dengan keterpencilan wilayah, dan masih kurangnya peran masyarakat. Selain meningkatkan pendapatan orang-orang miskin, identifikasi masalah sangat erat kaitannya dengan asesmen, dapat diartikan sebagai penentuan besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi yang ingin diperbaiki atau penentuan kekurangan dalam kondisi yang ingin direalisasikan dan masyarakat desa berperan besar dalam hal ini.

TKSK Kecamatan Wadaslintang dalam melakukan praktik kerja kepada masyarakat Desa Besuki tidak lepas dari koordinasi satu sama lain dengan pemangku jabatan terkhusus adalah kepala seksi kesejahteraan sosial desa dan juga masyarakat desa. Upaya ini untuk mengoptimalkan lingkup kerja dari TKSK agar terfokuskan dalam pengentasan kesejahteraan sosial salah satunya adalah kemiskinan. Melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti, TKSK akan melakukan koordinasi dengan masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (MUSDES). Langkah ini sebagai upaya awal untuk dijadikan pedoman bagi TKSK dalam melakukan praktik kerjanya bersama masyarakat.

Peran masyarakat dalam upaya kesejahteraan sosial di dalam program TKSK perlu ditingkatkan, untuk mengurangi secara signifikan peran-peran dominan oleh pemerintah dan sekaligus untuk membuka ruang-ruang baru bagi masyarakat untuk menjadi pelaku dalam pembangunan. Penelitian ini sangat perlu dan penting untuk dikaji, *Pertama* dengan adanya peran masyarakat ini akan melihat seperti apa peran masyarakat dalam mendukung program kesejahteraan sosial oleh TKSK Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. *Kedua* akan mengetahui tentang faktor pendukung dan

penghambat dari masyarakat dalam melakukan perannya pada program dari TKSK di Desa Besuki. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Peran Masyarakat Dalam Program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi di Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyiapan pelaksanaan program kesejahteraan sosial oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial di Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas, penulis mendapatkan tujuan atas penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa proses pelaksanaan program kesejahteraan sosial oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo
2. Untuk menganalisa faktor pendukung dan faktor penghambat dari peran masyarakat dalam program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK di Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan pembaca mendapatkan manfaat penelitian baik secara teoretis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi sebagai sumber rujukan dan acuan kepada keilmuan sosiologi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo Semarang mengenai peran masyarakat dalam program sosial pemerintah

- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada mahasiswa secara khusus dan masyarakat umum mengenai tenaga atau pekerja di ruang sosial yang ada disekitar masyarakat
- c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan refrensi untuk peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai peran masyarakat dalam program sosial masyarakat oleh pemerintah

2. Manfaat praktis

- a. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana informasi dan pengetahuan mengenai peran kita sebagai mahluk sosial ketika sudah berada di dalam lingkup masyarakat dengan disandingkan dengan program-program sosial dari pemerintah
- b. Bagi dosen, hasil penelitian ini bisa untuk bahan untuk memaparkan pembelajaran mata kuliah pengambilan peran dalam ranah masyarakat yang bersingungan langsung dengan porgam-program sosial dari pemerintah
- c. Bagi universitas, hasil penelitian ini dapat memberikan refrensi dalam meningkatkann kualitas pendidikan yang di lakukan dosen. Dan juga universitas bisa memberikan dukungan kepada dosen agar bisa menciptakan proses pembelajaran aksi nyata (Kehidupan bermasyarakat yang nyata)
- d. Bagi peneliti, harapannya adalah penelitian ini adalah wujud praktek keilmuan yang sudah dipadatkan pada saat dibangku perkuliahan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai peran masyarakat dalam program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai peran masyarakat dalam program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) masih sedikit dilakukan, terlebih fokus dari penelitian yang sudah ada belum fokus pada peran masyarakat di dalam program TKSK. Penelitian yang ada sebelumnya lebih banyak fokus pada pada peran masyarakat pada program sosial dari pemerintah lainnya bukan pada TKSK, dan penelitian sebelumnya juga fokus dalam TKSK yang bekerja pada masyarakat bukan sebaliknya karena disini penulis akan fokus pada peran masyarakat dalam program TKSK. Penulis

mengkaji dan menelaah penelitian sebelumnya yang terbagi menjadi dua tema, *Pertama*, peran atau partisipasi masyarakat. *Kedua*, tentang TKSK. Kajian mengenai peran atau partisipasi masyarakat terdapat dalam penelitian Rizal Adreeyan (2014), Marshal Adhitama Putra (2019), Tri Anjar Wulan sari (2015). Kajian penelitian tentang TKSK terdapat dalam penelitian Ruli Insani Adhitya (2016), Abdul Gafur (2017), dan Marzani Sudrajat, Deden Sumpena, dan Rohmatur Aziz (2017). Kajian ini sebagai acuan perbandingan sekaligus referensi dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, berikut kajian terdahulu yang dibagi menjadi dua tema:

1. Peran atau partisipasi masyarakat

Penelitian dalam jurnal berjudul *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda* oleh Rizal Andreeyan (2014) dalam mengkaji partisipasi masyarakat, tujuan penelitian untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Sambutan dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Sambutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris. Dalam penelitian menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data primer. Kesimpulan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrembangkel), pihak kelurahan hanya melibatkan beberapa pihak yang dianggap mewakili masyarakat, kurangnya pendidikan atau pengetahuan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan karena faktor kesibukan atau pekerjaan. Dan kurangnya peran ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai untuk mendorong peran aktif masyarakat wilayah RT pelita 6 untuk melakukan perencanaan dan kegiatan melalui Musrembang maupun dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat gotong-royong.

Penelitian dalam skripsi berjudul *Pengaruh Kepemimpinan*

Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) (Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur) oleh Marshal Adhitama Putra (2019) dalam mengkaji partisipasi masyarakat, tujuan penelitian untuk mengetahui kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat. Kepemimpinan sangat penting dan amat menentukan dalam kehidupan setiap bangsa, karena maju mundurnya masyarakat ditentukan oleh pimpinannya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh dan menghasilkan gambaran tentang besarnya pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) di Desa Mumbang Jaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 60 responden dari populasi survey yaitu 70 KK dengan menggunakan teknik simplerandom sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi sederhana. Penelitian ini menemukan dan menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Kontribusi pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat yaitu 0,545 atau 54,5% sedangkan sisanya yaitu 45,5% dipengaruhi oleh faktor lain seperti usia, pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, lamanya tinggal di desa tersebut dan tingkat komunikasi. Dengan demikian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam RS-RTLH maka pemerintah desa dan para stakeholder program ini harus meningkatkan keterlibatannya dalam pelaksanaan program di Desa Mumbang Jaya.

Penelitian dalam jurnal berjudul *Peran Masyarakat Desa Landusari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2013-2017* oleh Tri Anjar Wulandari (2015) dalam mengkaji partisipasi masyarakat, tujuan

penelitian untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Penelitian ini menemukan Pada perencanaan program RPJM-Desa Landungsari, tingkatan partisipasi masyarakat berada pada tahap informasi, konsultasi dan penentruman, atau dalam istilah lain berada pada level penghargaan atau (*Degree of tokenism*). Sedangkan pada pelaksanaan program RPJM-Desa Landungsari, peran serta masyarakat yang tertuang dalam sikap gotong-royong masih cukup bagus, sedangkan kendala-kendala peran serta masyarakat pada tahap perencanaan program RPJM-Desa Landungsari: kurang optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintahan, kurangnya keterbukaan ruang publik, akses arus informasi yang kurang jelas, otoritas kebijakan masih dipegang kuat oleh pemerintah desa, dan persepsi dan komitmen pemerintah desa yang belum kondusif dalam memberdayakan masyarakat. Sedangkan Kendala-kendala peran serta masyarakat pada tahap pelaksanaan program RPJM Desa Landungsari: persepsi dan komitmen masyarakat yang semakin melemah terhadap pembangunan, kurangnya akses informasi pelaksanaan program.

Persamaan penelitian-penelitian yang telah penulis paparkan dengan penelitian penulis lainnya adalah sama-sama membahas mengenai partisipasi masyarakat. Pada penelitian tersebut memaparkan mengenai partisipasi masyarakat yang mana fokus pada peran masyarakat hal ini sama seperti penelitian yang akan penulis teliti. Namun penelitian-penelitian yang ada terdahulu tersebut dan penelitian penulis memiliki perbedaan pada pembahasan mengenai peran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial di desa yang masuk pada wilayah kategori merah (Miskin) di Jawa Tengah sesuai dengan data MUSREMBANG 2020 dan juga dengan penerima bantuan sosial terbanyak dari data Jaring Pengaman Sosial (JPS) Provinsi kecamatan tahun 2020.

2. Praktik program TKSK

Penelitian dalam skripsi berjudul *Peran Masyarakat Desa Landusari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2013-2019* oleh Ruli Insani Aditya (2016) dalam mengkaji TKSK, tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat efektifitas peran kinerja TKSK di Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Pakualaman. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian studi kasus instrumental jamak. Pemerolehan data dari aparat pemerintah dari Dinas Sosial DIY, Dinsosnakestrans Kota Yogyakarta, PSM dan Karang Taruna serta masyarakat penerima bantuan program, observasi dilakukan terhadap kegiatan sosial TKSK dan studi dokumen terhadap laporan-laporan dokumen dilapangan. Selanjutnya penelitian ini dilakukan secara kualitatif model interaktif. Penelitian ini menemukan bahwa masalah sosial menjadi program sosial TKSK yaitu kemiskinan. Tingkat efektifitas pendampingan program TKSK sudah cukup efektif. Adapun peran TKSK ada enam yaitu, motivator, dinamisator, inovator, evaluator, koordinator, dan administator. Lima indikator dari enam sudah berjalan baik dengan dianalisis dengan indikator efektifitas. Untuk satu indikator yang belum berjalan baik adalah tentang inovator. Adapun yang menghambat kinerja TKSK minimamnya honor, minimnya fasilitas yang diberikan, pembiayaan operasional yang belum optimal, kinerja waktu yang berlebihan dari jam kerja yang ada.

Penelitian dalam skripsi berjudul *Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Memfasilitasi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya* oleh Abdul Gafur (2017) dalam mengkaji TKSK, tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan mengetahui apa faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Teknik pengumpulan data dalam penelitian

ini menggunakan observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Penelitian menemukan bahwa peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum berperan baik dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan. Terlihat dari mulai pendataan dan juga pendampingannya. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menangani masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada gampong-gampong yang ada di kecamatan Tangan-Tangan juga kurangnya dukungan, bantuan, pengakuan, dan juga kerjasama antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK dengan pihak pemerintah, PKSK di wilayah, maupun sesama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Adapun bentuk bantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Dinas Sosial adalah: Memberikan bantuan berupa beras miskin (Raskin), bibit bebek, kambing di setiap dusun berkelompok, dan memberikan modal usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang dijalaninya di kecamatan Tangan-Tangan kabupaten Aceh Barat Daya

Penelitian dalam jurnal berjudul *Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin UIN Sunan Gunung Djati Bandung* oleh Marizani Sudrajat, Deden Sumpena, dan Rohmanur Azis (2017) dalam mengkaji TKSK, tujuan penelitian untuk mengetahui Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam pengentasan keluarga miskin di tinjau dari pelaksanaan tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) dalam upaya kesejahteraan keluarga miskin dan hasil program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data di lakukan dengan cara reduksi data, klarifikasi data, verifikasi data, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menemukan, pelaksanaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat pemerintah merekrut masyarakat yang aktif di karang taruna atau organisasi sosial di setiap desa untuk di jadikan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan untuk mendampingi dan mengkoordinasi setiap bantuan dari pemerintah. Keberdayaan keluarga miskin sesudah dan sebelum adanya tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) Keberdayaan masyarakat keluarga miskin mengalami penurunan kesejahteraan hidup sebelum adanya tenaga kesejahteraan sosial, banyak masyarakat terutama keluarga miskin di kecamatan Talaga yang kurang berkecukupan dalam pemenuhan kebutuhannya. hasil yang dicapai tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan adanya pelatihan-pelatihan yang di laksanakan pemerintah untuk membantu TKSK agar memahami setiap bantuan dari pemerintah yang harus di dampingi langsung.

Persamaan penelitian-penelitian yang telah penulis paparkan dengan peneltian penulis lainnya adalah sama-sama membahas mengenai tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Pada penelitian tersebut memaparkan mengenai TKSK yang membantu masyarakat dalam melihat efektivitas program TKSK, fasilitasi TKSK terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan pengentasan keluarga miskin. Namun penelitian-penelitian yang ada tersebut dan penelitian penulis memiliki perbedaan pada pembahasan mengenai praktik program TKSK yang fokus pada peran dari masyarakat. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada pembahasan peran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, penelitian ini akan fokus pada masyarakat yang terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan kesejahteraan sosial seperti pengidentifikasi kebutuhan atau masalah, perencanaan program, pelaksanaan program kegiatan, dan monitoring.

F. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini peneliti akan menyampaikan tentang teori yang digunakan untuk menganalisis data penelitian, yaitu menggunakan Teori Peran menurut Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas sebagai landasan dalam penelitian dalam

menganalisa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial di Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo.

Konsep-konsep dalam pemilihan teori peran menurut Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas membaginya kedalam 4 (empat) bentuk yaitu, pemilihan konsep-konsep perilaku, pemilihan peran untuk pelaku-pelaku peran, pemilihan konsep untuk pelaku beserta perilakukanya, dan konsep tentang hubungan (Suhardono, 2018) yaitu:

1. Analisis mengenai pemilihan konsep-konsep perilaku, Biddle dan Thomas ingin melihat bagaimana seorang dalam perilaku di masyarakat yang dibagi atas aksi, patokan, penilaian, dan sanksi. *Pertama* aksi, aksi adalah suatu perilaku yang dibedakan atas pernah dan tidaknya aksi tersebut dipelajari pada waktu sebelumnya oleh setiap individu, pandangan arah dari aksi jelas tertuju pada sebuah tujuan serta penampakan dari aspek kehendak yang diinginkan bersifat (*volitional*). Berkaitan dengan studi peran masyarakat, seseorang dalam masyarakat melakukan aksi dalam menunjuk suatu yang terlihat dengan mata dan kepala aksi ini akan condong kepada penampilan atau unjuk peran. Unjuk peran pada umumnya menunjuk pada penampilan dari kategori seseorang tertentu, atau institusi tertentu. *Kedua* patokan, peran dalam prespektif disini adalah sebagai patokan, artinya menunjuk pada perilaku yang mengandung sebuah keharusan untuk dibawakan seseorang dalam masyarakat. Masyarakat akan berpatokan dari yang sudah ada dan sejajar pada apa yang sudah ada di dalam masyarakat. Masyarakat dalam mempraktikan patokan-patokan sering kali akan dijumpai baik itu secara tidak terlihat dan terlihat, untuk yang terlihat disebut dengan norma. Norma yang ada di masyarakat dengan masyarakat lainnya memiliki perbedaan jadi tidak bisa disama ratakan satu sama lainnya. Sedangkan yang terlihat disebut dengan tuntunan, masyarakat akan melakukan tuntunan dari tidak lanjut yang sebelumnya sudah membudaya di wilayah masyarakat tersebut. *Ketiga* penilaian (*Education*), suatu perilaku yang ada akan dipilahkan menjadi (*Evaluative*), jika hal tersebut pertama-tama dikoneksikan dengan persoalan setuju atau tidak setuju yang terungkap pada imbalan, hukuman, atau sanksi. Jika disandingkan dengan masyarakat penilaian adalah sebuah pilihan. Masyarakat berperilaku tidak terlihat dan menyertakan nilai di dalamnya akan dinamakan nilai, sedangkan masyarakat

yang berperilaku terlihat dinamakan dengan taksiran. *Keempat* sanksi, perilaku dalam sanksi yang ada di masyarakat akan dipertimbangkan sebagai sanksi, jika perilaku tersebut bersifat niat untuk menimbulkan perubahan pada perilaku lainnya. Beberapa sanksi di masyarakat akan berupa hukuman, rangsangan, dan motivasi. Jika dalam menggunakan sanksi di masyarakat secara tertutup akan disebut dengan sanksi tidak terlihat sedangkan jika sanksi dilakukan oleh masyarakat secara terbuka akan disebut dengan sanksi yang terlihat kedua sanksi ini akan dimaknai sebagai sanksi positif dan sanksi negatif tergantung apakah hal tersebut akan ditujukan pada perilaku yang diharapkan atau tidak diharapkan oleh masyarakat.

2. Analisis mengenai pemilihan peran untuk pelaku-pelaku peran, dalam mempelajari teori peran akan dijumpai beberapa istilah yang diperuntukan bagi pelaku dalam teori peran. Baik itu berupa *ego, self, altern, other, refrence, group,* dan *actor*. *Pertama* pelaku-pelaku yang dikaji, ada cara dalam membuat perbedaan antara pelaku yang dikaji dan tidak dikaji. Dengan membedakan antara subyek dan non subyek. Masyarakat dalam studi ini akan menjadi pelaku yang dikaji, subjek adalah pelaku yang didefinisikan masyarakat dalam teori peran, sedangkan non subyek adalah pengamat seperti peneliti yang melakukan penelitian. *Kedua* orang yang sedang berperilaku atau aktor, aktor yang sedang membawakan sebuah perilaku peran disebut dengan pelaku, untuk membedakan antara yang menciptakan perilaku dan yang mendapatkan akibat dari perilaku tersebut bisa untuk dibedakan. *Pertama* adanya seseorang yang akan disebut dengan lakon. *Kedua* adalah sasaran atau target, pelaku, penampil, dan sasaran dari ini semua disebut dengan subjek. Masyarakat akan sepenuhnya menjadi seseorang yang berperilaku, karena masyarakat adalah aktor penting dalam pengaplikasian teori peran oleh Biddle dan Thomas. *Ketiga* jumlah pelaku, ada beberapa istilah untuk melihat jumlah pelaku atau subyek, seperti individu untuk pelaku tunggal, kumpulan untuk jumlah yang lebih dari satu orang, dan saban orang untuk semua orang. Masyarakat akan ada dalam lingkupnya masing-masing baik secara individualis ataupun sosialis, tergantung bagaimana pemaknaan dalam situasi yang terjadi dalam masyarakat. *Keempat* pelaku tertentu, konsep dari

pelaku tertentu adalah bentuk pengkhususan seseorang dalam teori ini, terdapat 3 (tiga) bentuk pengkhususan yang dimaksud. *Pertama* ditentukan berdasarkan perilakunya misalnya masyarakat yang menjadi *baby sitter* disini adalah akan merawat seseorang dan terkoneksi satu sama lain. *Kedua* ditentukan berdasarkan rancangan posisinya misalnya masyarakat yang menjadi murid dan guru. *Ketiga* ditentukan dari *self* dan *other*-nya misalnya orang pertama, orang kedua, orang ketiga dan seterusnya dalam masyarakat.

3. Analisis mengenai pemilihan konsep untuk pelaku beserta perilakunya, konsep dari pelaku dan perilakunya dapat dijadikan menjadi 1 (satu) konsep yang menunjuk pada pelaku dan perilakunya. Contoh dalam konsep pelaku dan perilakunya terdapat dalam konsep norma kelompok. Dijelaskan bahwa norma adalah satu konsep untuk memisahkan perilaku, sedangkan untuk kelompok adalah suatu konsep untuk memisahkan pelaku atau *person*. Biddle dan Thomas menggetengahkan antara konsep antara pelaku dengan perilakunya. Sebelumnya Biddle dan Thomas memaparkan mengenai konsep posisi dan peran. *Pertama* posisi, ada berbagai deretan dari kata yang selalu disandingkan dengan posisi yaitu mengenai umur, jenis kelamin, atau bahkan warna kulit. Hal ini menjadi dasar dalam membuat perbedaan antara anggota masyarakat dalam mengkatagorikan sebuah posisi. Dengan demikian posisi adalah suatu kategori yang kolektif tentang seseorang yang menjadi dasar bagi orang lain dalam memberikan sebuah sebutan, perilaku, atau reaksi yang umum kepadanya dalam masyarakat. *Kedua* peran, peran adalah konsep-konsep dalam penentuan perilaku. Namun demikian, peran merupakan seperangkat patokan membatasi perilaku atas seseorang masyarakat yang mesti dilakukan dan menduduki sebuah posisi yang ada dalam ranah masyarakat.
4. Analisis mengenai konsep tentang hubungan, dalam masyarakat konsep tentang hubungan mencakup tingkat kesamaan antara konsep yang telah dipilhkan antara dua atau lebih. *Pertama* imbangan berdasarkan kesamaan, pilahan bedasarkan perilaku dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan imbangan kesamaan. Diasumsikan bahwa seseorang masyarakat yang memilih suatu norma sosial dapat memilih perilaku yang sama dengan patokan perilaku

tersebut. *Kedua* imbalan berdasarkan penentuan, persoalan penentuan ini sekurang-kurangnya menggambarkan sebuah kondisi antara dua masyarakat baik yang menjadi aktor atau sasaran, juga terlibat dalam suatu perilaku bersifat saling menentukan atau saling menjadi sebab bagi yang lain. Kedekatannya dekat dengan pengertian saling tergantung dan dikaitkan dengan yang lainnya akan membentuk yang namanya petisi dan kooperasi, akan memperlihatkan pelancaran dan penyandatan pada masing-masing masyarakat dan memperlihatkan pada imbalan dan kerugian pada masing-masing penunjuk. *Ketiga* imbalan gabungan antara kesamaan dan penentuan, ada beberapa bagian yang ada pada imbalan gabungan antara lain mengenai konfirmitas di dalam masyarakat baik itu adalah penyesuaian, dan ketepatan.

G. Metode Penelitian

Berikut ini adalah jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni sebuah penelitian yang menghasilkan sebuah temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara kuantifikasi. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan naratif deskriptif. Penelitian ini dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan hubungan sosial masyarakat (Ghony dkk, 2016).

2. Sumber dan jenis data

a. Data primer

Data primer, data yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan hasil dari observasi. Informan merupakan orang yang dipilih untuk memberikan informasi mengenai kondisi dan obyek penelitian. Jadi informan merupakan orang yang memiliki hubungan erat dengan obyek kajian dalam penelitian (Prastowo, 2016). Data primer ini diambil melalui wawancara langsung dengan masyarakat di Desa Besuki yang berada di Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pendukung dari data primer yang sudah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah data-data diperoleh melalui studi pustaka dari buku-buku dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan juga sebuah dokumentasi yang mana akan menjadi pendukung dari data-data primer yang ada. Kajian dokumentasi sendiri ini berupa gambar-gambar, dokumen dan berita-berita mengenai kegiatan masyarakat Desa Besuki dan dari kegiatan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 2 (Dua) diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sutrisno, 1986 dalam Sugiyono, 2018). Dan yang unik dari teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain yaitu adanya wawancara. Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi ruang lingkup kerja dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan peran masyarakat dalam kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo.

b. Wawancara mendalam (*Indepth interview*)

Wawancara merupakan sebuah metode atau teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin menemukan dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2018). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*Indepth interview*). Penulis menggali data dari informan dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan kondisi informan namun tetap pada fokus penelitian. Dalam menentukan informan penulis mengambil informan masyarakat Desa Besuki dan TKSK di Kecamatan Wadaslintang.

Dalam wawancara ini, teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, artinya adalah menemukan informan yang

sesuai dengan permasalahan dari penelitian (Bungin, 2007). Berikut adalah informan yang akan di wawancarai:

Tabel 1. Informasi Tentang Informan Wawancara

No	Informan	Yang Dicari	Jumlah Informan
1.	Masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan informasi mengenai peran masyarakat dalam program TKSK - Mendapatkan informasi mengenai faktor pendukung dan penghambat peran masyarakat dalam kesejahteraan sosial pada program TKSK - Mendapatkan informasi mengenai penggunaan manfaat dari bantuan yang didapatkan 	2 orang (2 perempuan)
2.	Masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan informasi mengenai peran masyarakat dalam program TKSK - Mendapatkan informasi mengenai faktor pendukung dan penghambat peran masyarakat dalam kesejahteraan sosial pada program TKSK - Mendapatkan informasi mengenai penggunaan manfaat dari bantuan yang didapatkan 	4 orang (2 perempuan, dan 2 laki-laki) (Mempertimbangkan jenis kelamin)
3	Agen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan informasi mengenai proses penyaluran BPNT - Mendapatkan informasi mengenai peran masyarakat dalam program TKSK - Mendapatkan informasi mengenai faktor pendukung dan penghambat peran masyarakat dalam kesejahteraan sosial pada program TKSK - Mendapatkan informasi mengenai penggunaan manfaat dari bantuan yang didapatkan 	1 orang

4.	TKSK Kecamatan Wadaslintang	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan informasi mengenai gambaran umum, tujuan, dan program-program yang ada dan dilakukan TKSK - Mendapatkan informasi bentuk peran masyarakat dalam kesejahteraan sosial, pada program TKSK - Mendapatkan informasi mengenai alasan dilakukannya program TKSK di Desa Besuki dan juga informasi mengenai faktor pendukung dan penghambat peran masyarakat dalam kesejahteraan sosial pada program TKSK - Mendapatkan informasi mengenai kualifikasi dalam data penerima bantuan sosial 	1 orang
5.	Kepala Desa Besuki	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan informasi profil desa, visi misi, dan keadaan dalam bentuk kesejahteraan sosial baik dari sektor keadaan ekonomi, pekerjaan, dan pendapatan 	1 orang
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Desa Besuki	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan informasi keadaan ekonomi, jumlah penduduk miskin, data penerima bantuan TKSK, - Mendapatkan informasi mengenai program-program masyarakat yang menopang peran masyarakat dalam program TKSK - Mendapatkan informasi mengenai faktor pendukung dan penghambat peran masyarakat dalam kesejahteraan sosial pada program TKSK - Mendapatkan informasi mengenai kualifikasi dalam data penerima bantuan sosial 	1 orang
7.	Sekretaris Desa Besuki (Admin Data Terpadu Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan informasi keadaan ekonomi, jumlah penduduk miskin, data penerima bantuan TKSK, - Mendapatkan informasi 	1 orang

	Sosial (DTKS))	<p>mengenai program-program masyarakat yang menopang peran masyarakat dalam program TKSK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan informasi mengenai faktor pendukung dan penghambat peran masyarakat dalam kesejahteraan sosial pada program TKSK - Mendapatkan informasi mengenai kualifikasi dalam data penerima bantuan sosial - Mendapatkan informasi mengenai proses pendaatan masyarakat pada DTKS 	
Jumlah		11 orang	

Adapun etika yang digunakan dalam wawancara adalah (*Informed consent*), maksudnya yaitu adanya lembar persetujuan bagi narasumber yang hendak diwawancara, sehingga narasumber berhak setuju atau menolak melakukan wawancara dengan membaca dan menyetujui lembar persetujuan wawancara tersebut. Pencarian data diperoleh melalui, wawancara terstruktur, wawancara mendalam dan melakukan partisipasi pada kegiatan yang dilakukan oleh TKSK Kecamatan Wadaslintang di Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung dengan foto dan karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Untuk menunjang pengumpulan data dokumentasi diperlukan alat bantu berupa kamera yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dokumentasi (Moleong, 2009). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba mengumpulkan beberapa dokumentasi berupa foto-foto, yang memaparkan beberapa kegiatan yang dilakukan

oleh TKSK dan peran masyarakat di Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pada penelitian ini teknik analisa data menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode induktif ini peneliti akan menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui observasi di lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati. Metode induktif ini digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh yakni data kualitatif. Teknik analisa data dengan menggunakan metode induktif merupakan teknik analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian. (Moleong, 2007).

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja: dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 4 (Empat) jalur analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi:

1. Pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang sudah diperoleh selama observasi dan wawancara di lapangan dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing. Penulis mengelompokkan seluruh data yang diperoleh selama proses observasi dan wawancara baik berupa arsip-arsip, catatan-catatan lapangan, gambar atau foto, beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data atau mengarahkan, dari data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke dalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya disusun secara sistematis. Data yang direduksi memberi gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, dengan membuat penggambaran secara deskriptif masalah yang diteliti.

4. Penarikan simpulan atau verifikasi

Penarikan atau verifikasi digunakan untuk memastikan kebenaran dari tiap data yang telah diperoleh dan untuk mendapatkan kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan-kesimpulan juga harus diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara sebagai berikut:

- a) Memikir ulang selama penulisan
- b) Tinjauan ulang catatan lapangan
- c) Tinjauan kembali dengan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif
- d) Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

I. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2020/2021. Adapun skripsi ini berjudul **Peran Masyarakat Dalam Program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi di Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo)**. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka paparan disusun dengan struktur sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab pertama membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian yang mana terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika penulisan

BAB II : Teori Peran, Kesejahteraan Sosial dan Teori Peran Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas

Pada bab kedua berisi tentang teori peran yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan dalam bab kedua ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu A. Peran dan Kesejahteraan sosial dengan bahasan konsep peran menurut para ahli, konsep kesejahteraan sosial, dan konsep kesejahteraan sosial menurut Islam. B. Teori peran Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas dengan bahasan konsep-konsep dalam teori peran dan ciri-ciri teori peran

BAB III : Desa Besuki: Gambaran Praktik Kesejahteraan Sosial

Pada bab ketiga berisi tentang Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo sebagai gambaran kesejahteraan sosial. Pembahasan dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 (Dua) sub bab yaitu A. Gambaran umum Desa Besuki dengan bahasan kondisi geografis Desa Besuki, kondisi topografis Desa Besuki dan kondisi demografis Desa Besuki yang berisi bahasa mengenai keadaan sosial ekonomi Desa Besuki, karakteristik masyarakat Desa Besuki, dan program keagamaan Desa Besuki. B. Program kesejahteraan sosial dengan bahasan sejarah masuknya program di Desa Besuki, pengurus program di Desa Besuki, dan kegiatan program kesejahteraan sosial di Desa Besuki.

BAB IV : Persiapan Program Kesejahteraan Sosial Oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Di Desa Besuki

Pada bab keempat pembahasan tentang pelaksanaan peran masyarakat dalam program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Di Desa Besuki. Pembahasan dalam bab ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab yaitu A.

Persiapan program kesejahteraan sosial dengan bahasan melakukan pemetaan sosial, melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melakukan koordinasi bersama, melakukan sinergi, integrasi dan sinkronisasi, kegiatan pelayanan dan bimbingan sosial, dan mengembangkan partisipasi masyarakat. B. Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam Kesejahteraan Sosial yang membahas mengenai peran pada perencanaan program, peran pada pelaksanaan program, peran pada menerima hasil program, dan peran pada monitoring program. C. Peran TKSK Dalam Bantuan Kesejahteraan Sosial Di Desa Besuki yang membahas mengenai Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BAB V : Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Di Desa Besuki

Pada bab kelima pembahasan tentang faktor pendukung dan penghambat peran serta masyarakat dalam program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi 2 (Dua) sub bab yaitu A. Faktor pendukung peran masyarakat dalam program TKSK yang membahas mengenai faktor budaya masyarakat, faktor program dan kepemimpinan, faktor pendidikan dan usia masyarakat dan faktor kerjasama masyarakat. B. Faktor penghambat peran masyarakat dalam program TKSK yang membahas mengenai faktor faktor informasi dan komunikasi masyarakat, faktor partisipasi masyarakat, dan faktor fasilitas tidak optimal

BAB VI : Penutup

Pada bab keenam berisi tentang kesimpulan yang membahas mengenai keseluruhan penilitan yang sudah dilakukan, saran yang membahas mengenai masukan-masukan yang akan menjadi salah satu hal yang bisa menjadi proses perkembangan untuk penelitian selanjutnya, daftar pustaka yang mana menjadi sumber penulis selama penelitian ini dan lampiran yang berisi lampiran baik berupa foto kegiatan, surat persetujuan wawancara, dan daftar riwayat hidup

BAB II

PERAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN TEORI PERAN BRUCE J. BIDDLE DAN EDWIN J. THOMAS

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan tentang teori yang digunakan untuk menganalisis data penelitian dari Teori Peran menurut Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas. Teori Peran digunakan sebagai landasan untuk menganalisa peran masyarakat dalam program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Akan tetapi, sebelum memaparkan teori penulis bermaksud memberikan batasan mengenai definisi konseptual atau penjelasan konseptual terkait aspek yang terkait dengan tema penelitian sebagai berikut,

A. Peran dan kesejahteraan sosial

1. Konsep peran menurut para ahli

Konsep peran masyarakat yang telah dikemukakan oleh para ahli, ada beberapa hal penting yang merupakan bagian eksistensi suatu peran (Amalia, 2016). *Pertama* suatu peran ada kesediaan masyarakat untuk kontribusi, memberikan dan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan secara bersama. *Kedua* pada peran mental dan emosi individu akan ada keterlibatan untuk berpartisipasi. *Ketiga* peran akan menyangkut linimasa kehidupan kelompok karena di dalamnya terdapat solidaritas. *Keempat* peran dalam kegiatan akan diikuti adanya rasa bertanggung jawab terhadap aktivitas yang akan dilakukan dan telah dilakukan. Dan *Kelima* peran akan menguntungkan bagi individu atau kelompok yang berpartisipasi, akan menyangkut pada kepuasan akan tercapainya tujuan (Amalia, 2016).

Di sisi lainnya individu melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Peran akan mengarah pada fungsi penyesuaian diri individu, dan sebagai sebuah proses di masyarakat. Ada 3 (tiga) hal mencakup peran yang dimiliki oleh individu, *Pertama* peran meliputi norma-norma disandingkan dengan posisi individu di dalam masyarakat. *Kedua* peran adalah sesuatu atau kegiatan yang dilakukan individu pada masyarakat. *Ketiga* peran merupakan sebuah perilaku individu yang penting untuk struktur sosial masyarakat.

Selaras dengan hal tersebut menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu hal yang kompleks atas pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek dinamis meliputi cepat bergerak dan mudah dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seorang individu telah menjalankan suatu peranan.

Peran dapat diartikan sebagai pola yang diharapkan oleh masyarakat dari seorang individu yang memiliki status atau menempati posisi tertentu dalam masyarakat, peran juga selalu terarah kepada relasi dengan individu lainnya dalam relasi atau sebuah hubungan. Dalam mengkaji peran di dalam masyarakat, peran memiliki aspek-aspek penting, *Pertama* peran sebagai norma, hal ini terhubung dengan posisi seseorang dalam masyarakat. *Kedua* peran sebagai bentuk, berupa tindakan yang dilakukan seseorang dalam masyarakat. Dan *Ketiga* peran sebagai perilaku, kedudukan sebuah perilaku penting untuk perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu di masyarakat (Raho, 2014).

Peran berkala memiliki konflik di dalamnya, penanggulangannya dipaparkan oleh Robert Merton dapat dikurangi dengan pembagian waktu dalam menjalankan peran-peran itu baik yang berasal dari status tertentu maupun yang berasal dari dua atau lebih status, dengan demikian berbeda-beda dari individu satu dengan yang lainnya. Dari perbedaan ini dapat dikaitkan dengan status tertentu tidak selalu dapat terintegrasi dengan baik. Dari sinilah individu yang menduduki status tertentu dapat juga ditarik kepada peran yang berbeda di waktu yang sama, hal ini biasa disebut dengan ketegangan akibat dari peran-peran yang ada dan berbeda ruang dalam penggunaannya (Raho, 2014).

Peran atau partisipasi menurut Slamet dalam (Hamim, dkk. 1996: 156 dalam Amalia, 2016) mengandung makna pembangunan pada kesejahteraan sosial di masyarakat, ditujukan pada keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial secara sukarela dan atas kemauannya sendiri. Dapat digolongkan ke dalam 4 (Empat) bentuk peran masyarakat yaitu peran dalam

identifikasi masalah, peran dalam pelaksanaan, peran dalam menerima hasil, dan peran dalam monitoring hasil dalam pembangunan kesejahteraan sosial yaitu (Amalia, 2016):

a) Peran dalam identifikasi masalah

Peran dalam identifikasi masalah meliputi pengambilan keputusan, menentukan masalah, menentukan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pembangunan kesejahteraan sosial desa diperlukan keterlibatan masyarakat untuk menentukan cara-cara pencapaiannya. Bentuk forum-forum yang ada di desa dimaksudkan seperti Musyawarah Dusun (MUSDUS), Musyawarah Desa (MUSDES), dan sebagainya

b) Peran dalam pelaksanaan.

Peran dalam pelaksanaan, setelah masyarakat terlibat dalam perencanaan maka masyarakat juga harus berpartisipasi dalam melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkan bersama, artinya tidak hanya berhenti pada perencanaan yang sudah dirumuskan saja, melainkan dilanjutkan dalam progres pelaksanaan yang dilakukan secara bersama dengan masyarakat lainnya.

c) Peran dalam menerima hasil

Peran dalam menerima hasil, masyarakat juga berpartisipasi dalam menerima hasil, menikmati keuntungan secara langsung dari berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan. Hasilnya akan sesuai atau tidaknya dengan yang telah dilakukan oleh masyarakat dari proses awal perencanaan dan pelaksanaan, ketika hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat hal ini bisa menjadi acuan pedoman untuk lebih baik dalam progres program pembangunan kesejahteraan sosial.

d) Peran dalam monitoring hasil

Peran dalam monitoring hasil, masyarakat akan berpartisipasi dalam memantau hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan, sampai sejauhmana program tersebut telah memenuhi kebutuhan dan apakah tujuan telah dapat dicapai. Kondisi ini juga akan berbarengan dengan evaluasi dan monitoring secara terus-menerus program kesejahteraan sosial yang sudah dilakukan dengan masyarakat lainnya pada wilayah desa tersebut.

Dari berbagai bentuk peran atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk peran atau partisipasi dapat dibedakan menjadi 4 (Empat), yaitu partisipasi dalam identifikasi masalah, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pengambilan manfaat serta partisipasi dalam monitoring hasil. Masyarakat akan dipandang tergantung pada cara pelaksanaan kegiatan atau program memandang masyarakat apakah masyarakat dianggap hanya mengikuti atau juga sebagai pelaksanaan program kesejahteraan sosial.

2. Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (Peraturan Menteri Sosial (PEMENSOS) Nomor 28 pasal 1 tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial). Penjelasan mengenai kesejahteraan sosial memiliki beberapa bahasan di dalamnya seperti tujuan kesejahteraan sosial, fungsi kesejahteraan sosial, komponen-komponen kesejahteraan sosial dan bidang pelayanan kesejahteraan sosial, sebagai berikut (Fahrudin, 2012):

a) Tujuan kesejahteraan sosial

Tujuan kesejahteraan sosial guna mendorong masyarakat untuk mencapai suatu kondisi yang sejahtera dalam kehidupannya. Tujuan ini berkaitan dengan perubahan yang sudah atau akan dicapai oleh masing-masing individu dalam masyarakat meliputi perubahan fisik, perubahan mental, perubahan ekonomi, perubahan sosial dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Fahrudin menyatakan bahwa tujuan kesejahteraan sosial yaitu, *Pertama* untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan di

masyarakat. Dan *Kedua* untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber terpercaya, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

b) Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi di masyarakat, dan menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial dalam bentuk hal negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi yang positif dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Fungsi kesejahteraan sosial tersebut yaitu, *Pertama* fungsi pencegahan kesejahteraan sosial, untuk memperkuat dalam sisi individu, keluarga dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. *Kedua* fungsi penyembuhan kesejahteraan sosial, untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan berbentuk fisik, emosional dan sosial agar individu yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. *Ketiga* fungsi pengembangan kesejahteraan sosial, untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat. Dan *Keempat* fungsi penunjang fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial untuk masyarakat.

Fungsi-fungsi yang menunjang kesejahteraan sosial diatas untuk membantu masyarakat dalam mengurangi masalah-masalah sosial yang terjadi baik itu ekonomi, sosial maupun dalam pendidikan. Sehingga dengan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut masyarakat sebagai suatu peranan yang dapat meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial.

c) Komponen-komponen kesejahteraan sosial

Komponen-komponen kesejahteraan sosial menjadi suatu pembeda antara bidang kesejahteraan sosial dengan bidang lainnya. Komponen-komponen

kesejahteraan sosial mencakup, *Pertama* organisasi formal, berbentuk usaha kesejahteraan sosial yang terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh badan sosial yang formal. *Kedua* pendanaan tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat. *Ketiga* tuntutan kebutuhan manusia, kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia. *Keempat* profesionalisme pelayanan, kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis dan menggunakan metode dan teknik-teknik pekerjaan sosial di dalam praktiknya. *Kelima* kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat undang-undangan yang mengatur syarat memperoleh proses pelayanan dan pengakhiran pelayanan. *Keenam* peran serta masyarakat usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat. Dan *Ketujuh* data dan informasi kesejahteraan sosial pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa adanya data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran dalam prosesnya

d) Bidang pelayanan sosial

Pelayanan sosial adalah konteks kelembagaan yang terdiri atas program-program yang telah di sediakan berdasarkan kriteria, selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Untuk memudahkan akses pada pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan pelayanan sosial diberikan dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya tidak selalu dilaksanakan oleh pekerja sosial, melainkan juga bagi tenaga-tenaga profesional yang lain namun dengan maksud dan tujuan yang sama untuk mencapai suatu keadaan yang sejahtera. Sehingga para tenaga-tenaga

profesional lain juga dapat memberikan pelayanan-pelayanan sosial secara utuh dan menyeluruh kepada masyarakat

Lembaga-lembaga lain juga dapat ikut serta memberikan pelayanan sosial dengan tujuan kesejahteraan sosial yaitu meningkatkan kualitas, taraf kesejahteraan dan kelangsungan hidup yang berkaitan dengan mengembalikan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan kemampuan masing-masing individu, kepedulian dan rasa tanggung jawab di dalam masyarakat. Pelayanan sosial dapat dicapai dengan cara yang bersifat informasi, bimbingan dan pertolongan melalui berbagai bentuk kegiatan yang berkenaan dengan pemecahan masalahnya.

3. Konsep kesejahteraan sosial menurut Islam

Konsep kesejahteraan sosial menurut Islam ada 3 (tiga), *Pertama* pengertian Islam yang memiliki makna selamat, sentosa, aman, dan damai dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial selaras dengan misi Islam. Misi ini sebagai misi yang dibawakan oleh kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tertuang pada surah Al Anbiya yang berbunyi: “*Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam*”. (Q.S Al Anbiya (21): 107). *Kedua* memperhatikan dari segi kandungannya terlihat seluruh ajaran Islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial, hubungan dengan Allah Swt misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan manusia (Habl min Allah wa habl min an-nas). Demikian pula dengan anjuran beriman selalu diringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya terkandung makna untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Ajaran Islam yang pokok yaitu rukun Islam seperti mengucapkan 2 (Dua) kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji satu sama lain terkait atas kesejahteraan sosial. Dan *Ketiga* upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalfahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As, sebagaimana dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam buku wawasan Al-Quran menyatakan “Kesejahteraan sosial yang didambakan Al Quran tercermin di surge yang dihuni oleh Nabi Adam As dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalfahan di bumi (Fadilah, 2020).

Islam dalam Al Quran membahas konsep kesejahteraan sosial, pembahasan mengenai kesejahteraan sosial menurut Al-Quran terkandung dalam beberapa surat seperti, *Pertama* Surah An Nisa ayat 9 tentang ajuran untuk memperhatikan kesejahteraan sosial dan hendaklah takut (kepada Allah Swt) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (Kesejahteraan). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Swt dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. *Kedua* Surah Quraisy ayat 3-4 yang artinya mengenai indikator-indikator kesejahteraan sosial maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (Pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. *Ketiga* Surah An-Nahl ayat 97 yang artinya mengenai janji Allah Swt akan kesejahteraan suatu kaum, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. *Keempat* Surah A-Thalaq ayat ke tiga yang artinya mengenai peran Allah Swt memberikan kesejahteraan bagi hamba-Nya dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Swt, Niscaya Allah Swt akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah Swt melaksanakan uruan-Nya. Sungguh, Allah Swt telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. *Kelima* Surah At-Takasur ayat 1-2 yang artinya mengenai tentang larangan untuk bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur (Surbakti: 6).

B. Teori Peran Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori peran menurut Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas. Teori peran merupakan salah satu dari teori dalam disiplin ilmu sosiologi, sejak awal kelahirannya konsepsi peran telah menampakkan aspek kekhasan yang dimiliki baik secara prespektif maupun dari pembahasannya. Teori ini sejajar dengan teori-teori yang khas lainnya dan pada gilirannya menjadi khusus dan hal ini tidak dimiliki oleh teori yang lain menjadi sebuah bentuk pernyataan identitas dari teori peran (Suhardono, 2018).

Dalam kehidupan sosial masyarakat membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Hal ini sekaligus menandai bahwa seorang individu juga harus patuh pada alur kerja di masyarakat yang berupa norma sosial, tuntutan sosial dan kaidah-kaidah sosial masyarakat. Teori peran dalam masyarakat memiliki konsep seperti permainan drama akan terdapat pemain, penonton, dan sutradara. Peran sesama pelaku dalam permainan drama akan digantikan oleh individu lain di masyarakat yang sama-sama menduduki suatu posisi sosial sebagaimana individu sebagai pelaku peran sosial. Posisi penonton digantikan oleh masyarakat yang menyaksikan pembawaan peran oleh seorang individu sebagai pelaku peran. Dan sutradara yang mengisi dan memberi pengarahan serta bertanggung jawab atas lingkungannya di masyarakat akan digantikan dan berisi guru, orangtua, dan agen *socializer* lainnya (Suhardono, 2018)

Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas melakukan penggolongan yang merujuk pada konsep-konsep bahwa di dalam teori peran akan disertakan pembentukan berupa tingkatan kelas yang bermanfaat untuk mengaplikasikan teori peran. Konsep-konsep ini akan diaplikasikan oleh masyarakat dalam mengambil sebuah peran di dalam lingkup masyarakat, sehingga beberapa hal ini menjadi sebuah pijakan untuk melakukan tindakan peran bagi setiap individu di masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep-konsep teori peran dan ciri-ciri dari teori peran yaitu:

1. Konsep-konsep Teori Peran

Konsep-konsep dalam pemilihan teori peran menurut Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas membaginya kedalam 4 (empat) bentuk yaitu, pemilihan konsep-konsep perilaku, pemilihan peran untuk pelaku-pelaku peran, pemilihan konsep untuk pelaku beserta perilakukanya, dan konsep tentang hubungan (Suhardono, 2018) yaitu:

- a. Analisis mengenai pemilihan konsep-konsep perilaku, Biddle dan Thomas ingin melihat bagaimana seorang dalam perilaku di masyarakat yang dibagi atas aksi, patokan, penilaian, dan sanksi. *Pertama* aksi, aksi adalah suatu perilaku yang dibedakan atas pernah dan tidaknya aksi tersebut dipelajari pada waktu sebelumnya oleh setiap individu, pandangan arah dari aksi jelas tertuju pada sebuah tujuan serta penampakan dari aspek kehendak yang diinginkan bersifat *volutional*. Berkaitan dengan studi

peran masyarakat, seseorang dalam masyarakat melakukan aksi dalam menunjuk suatu yang terlihat dengan mata dan kepala aksi ini akan condong kepada penampilan atau unjuk peran. Unjuk peran pada umumnya menunjuk pada penampilan dari kategori seseorang tertentu, atau institusi tertentu. *Kedua* patokan, peran dalam prespektif disini adalah sebagai patokan, artinya menunjuk pada perilaku yang mengandung sebuah keharusan untuk dibawakan seseorang dalam masyarakat. Masyarakat akan berpatokan dari yang sudah ada dan sejajar pada apa yang sudah ada di dalam masyarakat. Masyarakat dalam mempraktikan patokan-patokan sering kali akan dijumpai baik itu secara tidak terlihat dan terlihat, untuk yang terlihat disebut dengan norma. Norma yang ada di masyarakat dengan masyarakat lainnya memiliki perbedaan jadi tidak bisa disama ratakan satu sama lainnya. Sedangkan yang terlihat disebut dengan tuntunan, masyarakat akan melakukan tuntunan dari tidak lanjut yang sebelumnya sudah membudaya di wilayah masyarakat tersebut. *Ketiga* penilaian (*Education*), suatu perilaku yang ada akan dipilahkan menjadi *evaluative*, jika hal tersebut pertama-tama dikoneksikan dengan persoalan setuju atau tidak setuju yang terungkap pada imbalan, hukuman, atau sanksi. Jika disandingkan dengan masyarakat penilaian adalah sebuah pilihan. Masyarakat berperilaku tidak terlihat dan menyertakan nilai di dalamnya akan dinamakan nilai, sedangkan masyarakat yang berperilaku terlihat dinamakan dengan taksiran. *Keempat* sanksi, perilaku dalam sanksi yang ada di masyarakat akan dipertimbangkan sebagai sanksi, jika perilaku tersebut bersifat niat untuk menimbulkan perubahan pada perilaku lainnya. Beberapa sanksi di masyarakat akan berupa hukuman, rangsangan, dan motivasi. Jika dalam menggunakan sanksi di masyarakat secara tertutup akan disebut dengan sanksi tidak terlihat sedangkan jika sanksi dilakukan oleh masyarakat secara terbuka akan disebut dengan sanksi yang terlihat kedua sanksi ini akan dimaknai sebagai sanksi positif dan sanksi negatif tergantung apakah hal tersebut akan ditujukan pada perilaku yang diharapkan atau tidak diharapkan oleh masyarakat.

- b. Analisis mengenai pemilihan peran untuk pelaku-pelaku peran, dalam mempelajari teori peran akan dijumpai beberapa istilah yang diperuntukan bagi pelaku dalam teori peran. Baik itu berupa *ego*, *self*, *altern*, *other*, *refrence*, *group*, dan *actor*. *Pertama* pelaku-pelaku yang dikaji, ada cara dalam membuat perbedaan antara pelaku yang dikaji dan tidak dikaji. Dengan membedakan antara subyek dan non subyek. Masyarakat dalam studi ini akan menjadi pelaku yang dikaji, subjek adalah pelaku yang didefinisikan masyarakat dalam teori peran, sedangkan non subyek adalah pengamat seperti peneliti yang melakukan penelitian. *Kedua* orang yang sedang berperilaku atau aktor, aktor yang sedang membawakan sebuah perilaku peran disebut dengan pelaku, untuk membedakan antara yang menciptakan perilaku dan yang mendapatkan akibat dari perilaku tersebut bisa untuk dibedakan. *Pertama* adanya seseorang yang akan disebut dengan lakon. *Kedua* adalah sasaran atau target, pelaku, penampil, dan sasaran dari ini semua disebut dengan subjek. Masyarakat akan sepenuhnya menjadi seseorang yang berperilaku, karena masyarakat adalah aktor penting dalam pengaplikasian teori peran oleh Biddle dan Thomas. *Ketiga* jumlah pelaku, ada beberapa istilah untuk melihat jumlah pelaku atau subyek, seperti individu untuk pelaku tunggal, kumpulan untuk jumlah yang lebih dari satu orang, dan saban orang untuk semua orang. Masyarakat akan ada dalam lingkupnya masing-masing baik secara individualis ataupun sosialis, tergantung bagaimana pemaknaan dalam situasi yang terjadi dalam masyarakat. *Keempat* pelaku tertentu, konsep dari pelaku tertentu adalah bentuk pengkhususan seseorang dalam teori ini, terdapat 3 (tiga) bentuk pengkhususan yang dimaksud. *Pertama* ditentukan berdasarkan perilakunya misalnya masyarakat yang menjadi *baby sitter* disini adalah akan merawat seseorang dan terkoneksi satu sama lain. *Kedua* ditentukan berdasarkan rancangan posisinya misalnya masyarakat yang menjadi murid dan guru. *Ketiga* ditentukan dari *self* dan *other*-nya misalnya orang pertama, orang kedua, orang ketiga dan seterusnya dalam masyarakat.

- c. Analisis mengenai pemilihan konsep untuk pelaku beserta perilakunya, konsep dari pelaku dan perilakunya dapat dijadikan menjadi 1 (satu) konsep yang menunjuk pada pelaku dan perilakunya. Contoh dalam konsep pelaku dan perilakunya terdapat dalam konsep norma kelompok. Dijelaskan bahwa norma adalah satu konsep untuk memisahkan perilaku, sedangkan untuk kelompok adalah suatu konsep untuk memisahkan pelaku atau *person*. Biddle dan Thomas menggetengahkan antara konsep antara pelaku dengan perilakunya. Sebelumnya Biddle dan Thomas memaparkan mengenai konsep posisi dan peran. *Pertama* posisi, ada berbagai deretan dari kata yang selalu disandingkan dengan posisi yaitu mengenai umur, jenis kelamin, atau bahkan warna kulit. Hal ini menjadi dasar dalam membuat perbedaan antara anggota masyarakat dalam mengkatagorikan sebuah posisi. Dengan demikian posisi adalah suatu kategori yang kolektif tentang seseorang yang menjadi dasar bagi orang lain dalam memberikan sebuah sebutan, perilaku, atau reaksi yang umum kepadanya dalam masyarakat. *Kedua* peran, peran adalah konsep-konsep dalam penentuan perilaku. Namun demikian, peran merupakan seperangkat patokan membatasi perilaku atas seseorang masyarakat yang mesti dilakukan dan menduduki sebuah posisi yang ada dalam ranah masyarakat.
- d. Analisis mengenai konsep tentang hubungan, dalam masyarakat konsep tentang hubungan mencakup tingkat kesamaan antara konsep yang telah dipisahkan antara dua atau lebih. *Pertama* imbangan berdasarkan kesamaan, pilahan bedasarkan perilaku dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan imbangan kesamaan. Diasumsikan bahwa seseorang masyarakat yang memilih suatu norma sosial dapat memilih perilaku yang sama dengan patokan perilaku tersebut. *Kedua* imbangan berdasarkan penentuan, persoalan penentuan ini sekurang-kurangnya menggambarkan sebuah kondisi antara dua masyarakat baik yang menjadi aktor atau sasaran, juga terlibat dalam suatu perilaku bersifat saling menentukan atau saling menjadi sebab bagi yang lain. Kedekatannya

dekat dengan pengertian saling tergantung dan dikaitkan dengan yang lainnya akan membentuk yang namanya petisi dan kooperasi, akan memperlihatkan pelancaran dan penyandatan pada masing-masing masyarakat dan memperlihatkan pada imbalan dan kerugian pada masing-masing penunjuk. *Ketiga* imbalan gabungan antara kesamaan dan penentuan, ada beberapa bagian yang ada pada imbalan gabungan antara lain mengenai konfirmitas di daalam masyarakat baik itu adalah penyesuaian, dan ketepatan.

2. Ciri-ciri Teori Peran

Ciri-ciri teori peran memiliki kekhasan atau keunikan didalamnya, yang secara langsung akan terkoneksi dan mempunyai sebuah refrensi pada semua kasus dari kejadian atau proses tetapi bukan sebuah keutamaan dari kondisi yang membatasi kejadian dalam proses tersebut. Dalam pembahasan teori peran ciri-ciri dianggap dimiliki oleh semua kasus dari fenomena, karena tercipta satu atau lebih dari golongan konsep yang dihubungkan, tetapi tidak menunjuk pada sesuatu dari kondisi sebuah fenomena yang terjadi yaitu (Suhardono, 2018):

a. Ciri dari skalabilitas perilaku

Individu saat berperilaku secara umum dapat diperlakukan secara operasional atas perilaku yang dilakukan dan harus memenuhi syarat bahwa bisa untuk diskalakan atau melalui pengukuran yang dapat dibagi menjadi 3 (Tiga) bentuk, *Pertama* berkenaan pada alternatif hadir-tidaknya perilaku (Pandangan para perilaku yang hidup pada pikiran berupa maksud yang memadai dari masing-masing individu). *Kedua* berkenaan pada skala yang berisi sejumlah kelompok dari perilaku seperti berjalan dan berlari. *Ketiga* skala yang dibentuk berdasarkan penggolongan dan masa antara dua kejadian yang bertalian oleh seseorang dari alternatif perilaku setiap individu.

b. Ciri perilaku yang mempunyai pilihan

Setiap pilihan pada teori peran, pilihan perilaku akan menunjuk kepada objek yang dituju oleh konsep, bagian dari sistem perilaku yang mempunyai pilihan memiliki beberapa jenis, *Pertama* kelas rujukan

referensi dan kelompok referensi bukan konsep yang menunjuk pada orang dalam arti sesungguhnya, tetapi lebih pada konsep sesuatu yang dikaitkan dengan individu. Dari konsep rujukan sebagai suatu kelas dari rujukan dapat diistilahkan sebagai sistem rujukan. *Kedua*, orang-orang yang menjadi objek pembahasan, akan menunjuk pada siapa perilaku tertentu dengan cara ditunjukkan. *Ketiga*, perilaku objek contohnya ketika seorang individu mengingatkan seorang individu lainya dalam mencari pekerjaan segera, kata “mencari pekerjaan” menjadikan perilaku objek. Pada contoh sebelumnya posisi orang merupakan objek maupun perilaku objek yang mana dapat berdiri sendiri tanpa yang lain.

c. Kondisi-kondisi perilaku objek

Pernyataan tentang perilaku (Orang yang menjadi pembicaraan) tentu melibatkan keadaan yang ada demi pelaksanaan perilaku yang diinginkan atau akan diperbuat. Keadaan perilaku objek menyertakan beberapa pelaku dan selalu demikian dengan yang lainnya seperti waktu, tempat, dan cara. Hal ini akan bertambah kepada bagaimana perilaku itu akan dibawakan oleh setiap seorang individu.

d. Sasaran-sasaran perilaku objek

Perilaku objek dapat kembali melibatkan sasaran secara aktual, maupun sasaran yang dimaksudkan, dalam contohnya masyarakat hendaknya, masyarakat bergotong-royong, pernyataan ini menggambarkan bahwa sasaran merupakan yang dimaksudkan. Ciri-ciri posisi dalam mengategorikan dari seseorang dibedakan atas tanda dari kelengkapan secara umum, perilaku atas reaksi umum dari seseorang terhadapnya. Pembahasan mendalam pada ciri-ciri posisi adalah persoalan simbol dari bukti seseorang dan kondisi dari keanggotaannya di masyarakat.

e. Simbol-simbol identifikasi

Simbol identifikasi atau penentu dalam penetapan seseorang, dapat dikenali melalui nama, pakaian, cara berbicara, atau lokasi fisik. Melalui tujuan identifikasi akan mampu membedakan sebuah pengenalan secara

bersama dari posisi di mana simbol-simbol tersebut merupakan perwujudan nyata dari hal yang disimbolkan

f. Kondisi-kondisi keanggotaan

Seorang tokoh masyarakat dapat dibedakan antara posisi menjadi dua, yaitu yang diraih dan yang disandingkan. Dari kedua konsep ini dapat pula untuk menjelaskan keanggotaan seorang pelaku dan perilakunya. Ketika seorang tokoh masyarakat menduduki sebuah status atau posisi tertentu di dalam masyarakat, posisi yang dimaksud adalah posisi yang didapatkan secara sadar membutuhkan kualifikasi tertentu atau pengalaman tertentu, sedangkan status yang disandingkan orang yang menduduki posisi yang dimaksud tanpa menginginkan secara sadar.

Dalam melihat peran masyarakat di Desa Besuki dalam program TKSK Kecamatan Wadaslintang, keterkaitan dengan Teori Peran menurut Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas menekankan pada peran-peran masyarakat. Teori Peran menurut Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas akan fokus pada aspek perilaku dan pembahasan teori memiliki beberapa hal yang dimiliki yaitu, perilaku nyata (Peran atau partisipasi) pada perkumpulan masyarakat dalam corak kebudayaan atau identitas yang berbeda posisi. Dalam ranah sosial, pengkhususan dalam ranah pembagian kerja, komunikasi, perilaku, motivasi yang mengikuti, pemberian sanksi, kesesuaian sikap dan perilaku dengan nilai dan kaidah yang berlaku dan kemandirian antara pelaku sosial lainnya dalam sebuah kancah sosial di dalam masyarakat. Penjelasan di atas akan menjadi ranah utama dalam Teori Peran menurut Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas. Selaras dengan teori peran, tugas dari TKSK salah satunya adalah meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan meliputi desa atau kelurahan, sesuai dengan tujuan dibentuknya TKSK oleh Kementerian Sosial (KEMENSOS) Indonesia. Hal ini akan mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara peran masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial di Desa Besuki melalui program-program kerja dari TKSK Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo.

BAB III

DESA BESUKI: GAMBARAN PRAKTIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Gambaran Umum

1. Kondisi geografis Desa Besuki

Desa Besuki merupakan bagian dari Kecamatan Wadaslintang terletak disebelah Timur dari Ibu Kota Kecamatan Wadaslintang, jarak dari Ibu kota Kecamatan Wadaslintang 6 Km, adapun jarak dari Ibu Kota Kabupaten Wonosobo 32 Km mempunyai ketinggian 400-800 M di atas permukaan air laut (Mdpl) dengan batas wilayah dengan pembagian ini terdapat pada Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKKP) tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Sebelah timur: Desa Pamriyan, Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo
- b. Sebelah selatan: Desa Giyombong, Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
- c. Sebelah Barat: Desa Tirip, Kecamatan Wadaslintang
- d. Sebelah utara: Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang

Gambar 1. Peta Kecamatan Wadaslintang



Sumber : https://en.m.wikipedia.org/wiki/wadaslintang_wonosobo

Diunduh pada tanggal 10 April 2021 pukul 18:38 WIB

Dapat kita lihat pada gambar 1 (satu) yang menunjukkan peta Kecamatan Wadaslintang yang menunjukan Desa Besuki yang ditunjukkan dengan anak panah, wilayah Desa Besuki merupakan desa yang terletak di Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Data geografis dari Desa Besuki menunjukkan bahwa Desa Besuki memiliki luas wilayah Desa Besuki 1.169 Ha, dengan penjalasan, *Pertama* tanah sawah berupa irigasi Teknis dengan luas 40,65 Ha, dan tadah hujan dengan luas 53, 32 Ha. *Kedua* lahan kering berupa pekarangan dan pembangunan dengan luas 69, 65 Ha, dan tegalan atau kebun dengan luas 300 Ha. *Ketiga* hutan negara dengan luas 636, 27 Ha. Dan *Keempat* lain-lain (Seperti jalan, sungai dll) dengan luas 17,14 Ha. Di sisi lainnya dari Desa Besuki memiliki 4 (empat) dusun yaitu Dusun Kalisalak, Dusun Kesenet (Di dalamnya terdapat wilayah bagian Karang Nangka), Dusun Sikapat, dan Dusun Sipait (Di dalamnya terdapat wilayah bagian Besuki, dan Selatri) (LKKP Desa Besuki, 2020).

2. Kondisi topografis Desa Besuki

Desa Besuki terdiri dari wilayah dataran yang cukup tinggi mulai dari 400-800 M (Meter) di atas permukaan air laut (Mdpl). Luas Wilayah Desa Besuki 1.169 Hektar (Ha), dan terdiri dari irigasi teknis 40,65 Ha, tadah hujan 53,32 Ha, pekarangan pembangunan 69,65 Ha, tegalan atau kebun 300 Ha, hutan negara 636,27 Ha, Lain-lain 17,14 Ha. Lahan di Desa Besuki mayoritas diperuntukan atau dikelola untuk lahan pertanian (Seperti padi, dan tanaman hortikultura lainnya) dan sebagian lahan kering atau tegalan diperuntukkan untuk tanaman kayu keras. Bagian Timur dan Selatan terdapat rangkaian pegunungan berlereng sangat terjal yang membujur dari Utara ke Selatan dengan 6 (enam) gunung seperti Gunung Mentosari, Gunung Pramiyan, Gunung Rawacacing, Gunung Bungkok, Gunung Sibedil dan Gunung Lumbang (LKKP Desa Besuki 2020)

Desa Besuki mempunyai banyak sungai kecil yang kemudian menyatu menjadi Sungai Besuki. Sungai Besuki merupakan bagian dari anak sungai Kali Medono, bagian air dari sungai yang ada digunakan masyarakat untuk pengairan wilayah persawahan dan budidaya perairan seperti usaha ikan air tawar. Wilayah Desa Besuki memiliki iklim tropis, dalam waktu satu tahun wilayah Desa Besuki

melalui 2 (Dua) musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara Desa Besuki pada siang hari berkisar antara 24°-33° C (Celcius). Pada bulan Juli sampai Agustus suhu udara akan turun menjadi 20° C. Pada musim hujan, hujan akan turun hampir sepanjang tahun rata-rata hari hujan adalah 150-200 hari dengan curah hujan rata-rata 2.000-4.000 mm/tahun (LKKP Desa Besuki 2020)

3. Kondisi demografis Desa Besuki

Desa Besuki merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wadaslintang yang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 sejumlah 3.145 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sejumlah 1.146 KK. Penduduk kategori berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sejumlah 1.760 jiwa dan perempuan sejumlah 1.385 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan dengan selisih sebesar 375 jiwa (Data monografi Desa Besuki, 2020). Sedangkan pada tahun 2018 jumlah penduduk Desa Besuki sejumlah 2.927 jiwa dan pada tahun 2019 sejumlah 3.027 jiwa. Jumlah penduduk pada 3 (Tiga) tahun terakhir naik dari tahun ke tahun hal tersebut berhubungan dengan angka kelahiran yang naik artinya ada kenaikan secara stabil setiap tahunnya, angka kematian yang rendah dan rendahnya perpindahan penduduk. Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan berikut ini. Adapun jumlah penduduk Desa Besuki berdasarkan dusun pada tahun 2018, 2019, dan 2020, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Dusun, Jumlah RT, RW dan Jumlah Penduduk (Jiwa) Desa Besuki Tahun 2018, 2019, dan 2020

No.	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
				2018	2019	2020
1.	Dusun Sikapat	3 RW	9 RT	1.339 Jiwa	1.382 Jiwa	1.432 Jiwa
2.	Dusun Kesenet	2 RW	5 RT	503 Jiwa	525 Jiwa	550 Jiwa
3.	Dusun Kalisalak	3 RW	6 RT	802 Jiwa	822 Jiwa	847 Jiwa

4.	Dusun Sipait	1 RW	2 RT	283 Jiwa	298 Jiwa	316 Jiwa
	Jumlah	8 RW	22 RT	2.927 Jiwa	3.027 Jiwa	3.145 Jiwa

Sumber : Diolah Dari Data Kependudukan Desa Besuki tahun 2018, 2019, dan 2020

Berdasarkan tabel 2 (Dua) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Besuki didominasi dari Dusun Sikapat dalam 3 (Tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sebesar 1.339 jiwa, pada tahun 2019 sebesar 1.382 jiwa dan pada tahun 2020 sebesar 1.432 jiwa. Dari jumlah penduduk dalam 3 (Tiga) tahun terakhir dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2018, 2019, dan 2020 di Dusun Sikapat, hal ini berhubungan dengan angka kelahiran yang meningkat, angka kematian masyarakat Lanjut Usia (Lansia) rendah, dan perpindahan dari wilayah lain ke Dusun Sikapat sedangkan peningkatan pada tahun 2020 diakibatkan pendatang yang masuk ke wilayah Dusun Sikapat (Buku laporan kependudukan Desa Besuki, 2018 2019 2020). Dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa masyarakat Desa Besuki, memberikan jawaban mengenai persoalan wilayah Dusun Sikapat menjadi tempat yang padat penduduk dibandingkan dengan wilayah dusun lainnya diakibatkan akses yang mudah dari segi fasilitas penunjang seperti pasar, warung, sekolah, dan tempat ibadah menjadikan pendatang memilih wilayah tersebut. Dan untuk tempat administrasi atau kantor Desa Besuki yaitu berada di wilayah Dusun Sipait.

Penduduk Desa Besuki memiliki tingkat pendidikan yang beragam secara keseluruhan, pembagian ini terdapat pada Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKKP) tahun 2018, 2019, dan 2020. Hal ini memiliki tingkatan seperti belum sekolah, belum tamat Sekolah Dasar (SD), tidak tamat SD, tamat SD atau sederajat, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan tamat akademi dan perguruan tinggi. Rincian data dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk (Jiwa) Desa Besuki Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Tahun 2018, 2019 dan 2020

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2018	2019	2020
1.	Belum Sekolah	73 Jiwa	101 Jiwa	150 Jiwa
2.	Belum Tamat SD	545 Jiwa	565 Jiwa	565 Jiwa
3.	Tidak Tamat SD	179 Jiwa	179 Jiwa	179 Jiwa
4.	Tamat SD/ sederajat	1.376 Jiwa	1.406 Jiwa	1.406 Jiwa
5.	Tamat SMP/ sederajat	482 Jiwa	492 Jiwa	492 Jiwa
6.	Tamat SMA/ sederajat	199 Jiwa	209 Jiwa	280 Jiwa
7.	Tamat Akademi dan Perguruan Tinggi	73 Jiwa	73 Jiwa	73 Jiwa
Jumlah		2.927 Jiwa	3.025 Jiwa	3.145 Jiwa

Sumber : Data LKKP Desa Besuki tahun 2018, 2019 dan 2020

Berdasarkan data dari tabel 3 (Tiga) menunjukkan bahwa pendidikan penduduk Desa Besuki sebagian besar tamat hingga jenjang Sekolah Dasar (SD) yakni sebesar 1.376 jiwa pada tahun 2018, 1.406 jiwa pada tahun 2019, dan 1.406 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan sebagian kecil dari penduduk Desa Besuki merupakan tamat akademi dan lulusan dari perguruan tinggi yakni sebesar 73 jiwa pada tahun 2018, 73 jiwa pada tahun 2019, dan 73 jiwa pada tahun 2020. Selain itu tingginya tamatan SD menunjukkan bahwa penduduk Desa Besuki memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh letak Desa Besuki yang berada di luar pusat Kecamatan Wadaslintang dan tingkat ekonomi penduduk Desa Besuki yang rendah. Pada umumnya pendidikan di Indonesia telah mengembangkan wajib belajar 12 (Dua belas) tahun. Peran atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial di wilayah desa tidak hanya terbentuk dari sektor pendidikan formal melainkan pendidikan non formal juga bisa membentuk masyarakat untuk ikut serta (Digerakan) ataupun secara sukarela dengan kemauanya sendiri dalam mengambil peran atau partiapasinya. Hasil observasi oleh penulis di wilayah Desa Besuki juga

menunjukkan bahwa faktor lainnya dalam peran atau partisipasi masyarakat salah satunya adalah tingginya budaya gotong royong yang berkembang dengan prinsip kekeluargaan (Putra, 2019).

Disebutkan dalam data dari Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Desa Besuki 2020, bahwa mayoritas masyarakat Desa Besuki adalah petani angkanya mencapai jumlah 1.172 jiwa pada tahun 2020. Terkait dengan mayoritas masyarakatnya petani Desa Besuki memiliki beberapa tantangan yang patut menjadi catatan. Misalnya terkait dengan kelangsungan profesi petani, untuk kedepannya jika tidak terdapat perubahan yang baik terhadap perbaikan infrastruktur pertanian yaitu irigasi kemungkinan besar yang akan terjadi adalah menurunnya jumlah angka petani akibat alih fungsi lahan ataupun terjadinya mobilitas horizontal, yaitu dari petani menjadi buruh tani. Kelangsungan kehidupan buruh tani juga demikian. Masyarakat sebagai pekerja buruh tani merasa profesi yang dilakoninya kurang menjanjikan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga secara layak. Hal ini disebabkan kurang layaknya atau minimnya upah harian ongkos kerja (LKPP, 2020)

Desa Besuki memiliki keberagaman dari segi ekonomi desanya. Dari pemetaan keberagaman yang ada Desa Besuki memiliki sebuah aset desa yang digunakan untuk menggerakkan masyarakat seperti pasar desa, usaha rumah tangga (*Home industry*) (Berupa pembuatan gula merah, pembuatan dawet, cilok, dan pembuatan tempe), lembaga keuangan masyarakat berupa simpan pinjam, kelompok usaha tani dan ternak. Untuk pekerjaan lainnya sebagai mata pencaharian masyarakat Desa Besuki memiliki mayoritas sebagai petani, hal ini sebagaimana disebutkan dalam wawancara dengan Kepala Desa Besuki, sebagai berikut:

“Desa Besuki dalam pekerjaan atau mata pencaharian mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Yang lainnya ada PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI (Tentara Nasional Indonesia), POLRI (Polisi Republik Indonesia), dan pedagang” (Triyono, 49 tahun, Kepala Desa Besuki, wawancara 13 April 2021).

Menurut Triyono Desa Besuki memiliki mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani, ada juga beberapa pekerjaan lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan pedagang. Untuk *home industry* atau usaha rumah tangga belum berjalan dengan lancar melainkan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah diupayakan untuk dikembangkan dengan adanya produk berupa air galon dan air kemasan, selain itu yang lainnya adalah pengolahan pupuk. Permasalahan pada pengolahan pupuk organik dan non organik belum bisa berjalan dengan baik dalam program BUMDES padahal dari pengadaan alat-alat seperti mesin sudah tersedia dan siap untuk digunakan. Pemetaan pembagian ini terdapat pada Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKKP) tahun 2018, 2019, dan 2020 tentang mata pencaharian masyarakat Desa Besuki, data tersebut dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Besuki Tahun 2018, 2019 dan 2020

No	Perkerjaan	Jumlah (Jiwa)		
		2018	2019	2020
1	Petani	1.005 jiwa	1.055 jiwa	1.172 jiwa
2	Buruh Tani	100 jiwa	115 jiwa	115 jiwa
3	Peternak	130 jiwa	139 jiwa	139 jiwa
4	Nelayan	0 jiwa	0 jiwa	3 jiwa
5	Industri	123 jiwa	132 jiwa	132 jiwa
6	Bangunan	120 jiwa	140 jiwa	140 jiwa
7	Perdagangan	121 jiwa	134 jiwa	134 jiwa
8	Transportasi	25 jiwa	29 jiwa	29 jiwa
9	PNS Hon/Guru	40 jiwa	44 jiwa	44 jiwa

10	TNI/Polri	4 jiwa	4 jiwa	4 jiwa
11	Perangkat Desa	11 jiwa	11 jiwa	11 jiwa
12.	Swasta	250 jiwa	293 jiwa	293 jiwa
13	Pensiunan	14 jiwa	14 jiwa	14 jiwa
14	Lainnya	984 jiwa	917 jiwa	915 jiwa
Jumlah		2.927 Jiwa	3.025 Jiwa	3.145 Jiwa

Sumber : Diolah dari Data Ekonomi Desa Besuki tahun 2018 dan LKPP Desa Besuki tahun 2019 dan 2020

Berdasarkan data dari tabel 4 (Empat) di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Besuki sebagian besar atau mayoritas merupakan petani yakni sebanyak 1.005 jiwa pada tahun 2018, 1.055 jiwa pada tahun 2019, dan 1.172 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan sebagian kecil dari penduduk Desa Besuki memiliki mata pencaharian sebagai nelayan sebanyak 0 (Nol) jiwa pada tahun 2018, 0 (nol) jiwa pada tahun 2019, dan 3 (tiga) jiwa pada tahun 2020. Kenaikan jumlah mata pencaharian sebagai petani dari tahun 2018, 2019, dan 2020 diakibatkan oleh tersedianya lahan yang luas, sebagaimana Desa Besuki terdiri dari wilayah dataran yang cukup tinggi mulai dari 400-800 meter di atas permukaan air laut (Mdpl). Luas wilayah Desa Besuki 1.169 Hektar (Ha), dan terdiri dari irigasi teknis 40,65 Ha, tadah hujan 53,32 Ha, pekarangan pembangunan 69,65 Ha, tegalan atau kebun 300 Ha, hutan negara 636,27 Ha, Lain-lain 17,14 Ha. Lahan di Desa Besuki mayoritas diperuntukkan atau dikelola untuk lahan pertanian (Seperti padi, dan tanaman hortikultura) dan sebagian lahan kering atau tegalan diperuntukkan untuk tanaman kayu keras (LKPP, 2020)

Masyarakat Desa Besuki dengan bermacam-macam pekerjaan menghasilkan pendapatan dalam bentuk gaji atau pendapatan yang didapatkan (Baik yang mendapatkan secara harian, mingguan, dan bulanan) hal ini yang menjadi pokok penghidupan bagi masyarakat Desa Besuki. Pendapatan masyarakat Desa Besuki juga mengalami penurunan atau bersifat fluktuasi diakibatkan permasalahan global dari adanya virus Covid-19 yang menyerang

dari bulan Maret tahun 2020. Pembagian pendapatan dari penghasilan masyarakat Desa Besuki dalam satu bulan menghasilkan pendapatan sebagai petani sebesar Rp. 1.500.000/bulan, buruh tani sebesar Rp. 900.000/bulan, peternak sebesar Rp. 1.600.000/bulan, nelayan sebesar Rp. 800.000/bulan, industri sebesar Rp. 1.742.000/bulan, bangunan sebesar 1.650.000/bulan, perdagangan sebesar Rp. 1.500.000/bulan, transportasi sebesar Rp. 2.250.000/bulan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rp. 1.560.800-Rp. 3.820.000/bulan (Sesuai golongan), guru honorer Rp.500.000-Rp700.000/bulan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebesar Rp. 2.600.000-Rp. 3.457.000/bulan (Sesuai golongan), perangkat desa sebesar Rp.2.000.000-Rp.4.000.000/bulan (Sesuai pangkat), swasta sebesar Rp.1.920.000/bulan, pensiunan sebesar Rp. 1.560.000-Rp.3.597.000/bulan (Sesuai golongan), dan lainnya (Di isi oleh masyarakat yang bekerja diluar dari penjelasan mata pencaharian seperti, buruh cuci, orang upahan (Yang mengurus urusan pekerjaan rumah tangga), penjaga Anak Di Bawah Lima Tahun (BALITA), dan sejenisnya) sebesar Rp. 500.000-Rp. 700.000/bulan (Data Ekonomi Desa Besuki dan LKPP Desa Besuki, 2020)

Di sisi lainnya, pasar yang berada di Desa Besuki menjadi tempat untuk penompang ekonomi masyarakat. Pasar Desa Besuki yang aktif setiap *Kliwon* (Perhitungan Jawa) yang menyediakan kebutuhan rumah tangga secara lengkap, baik pangan, sandang, dan kebutuhan mendasar lainnya cukup membantu untuk menopang masyarakat yang berjualan di dalamnya. Pasar desa ini menjadi aset desa yang strategis, dengan luas mencapai 3.000 M (Meter), pasar desa ini telah menjadi tempat transaksi keuangan antar warga ataupun kelompok warga. Selain itu dalam menunjang kebangkitan perekonomian, juga dibantu adanya beberapa unit kelompok simpan pinjam. Unit-unit tersebut telah memberikan dampak secara langsung khususnya bagi kelompok warga miskin ataupun kelompok warga lainnya, seperti pada kasus kelompok tani yang tidak memiliki modal bisa mengajukan dalam hal ini adalah pinjaman modal untuk pengembangan usahanya. Sehingga kelompok ataupun individu yang masih mendapatkan kesulitan dalam pengembangan usaha karena terbatasnya modal dapat terbantu dan terus berkembang.

“Dari sektor pekerjaan berupa petani dan peternak merupakan pekerjaan yang mayoritas, kalau masyarakatnya bisa melihat dan memanfaatkan potensi yang ada misalnya pada saat *booming* hasil tani berupa Kapulaga bisa untung sampai puluhan juta. Ini dari hasil pertanian ini saja, yang dilihat dari masyarakat yang memang sudah tau potensi permasalahannya justru dari tingkat sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang” (Sudiby, 32 tahun, Sekretaris Desa Besuki, wawancara 12 April 2021).

Menurut Sudiby Desa Besuki memiliki mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani dan peternak, potensi Desa Besuki dengan lahan subur dan dikelilingi pegunungan bisa menjadikan masyarakatnya untuk bekerja dan melihat peluang pasar dari sektor pertanian, dalam beberapa waktu di tahun 2020 hasil pertanian berupa Kapulaga menjadi ramai dikarenakan harganya yang tinggi dan petani bisa memperoleh hasil puluhan juta baru dari pertanian ini. Dengan adanya hal tersebut Sudiby melihat bahwa permasalahan muncul justru dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang karena masyarakat Desa Besuki masih belum mengerti benar asal usul pertanian rempah-rempah yang memiliki komoditas tinggi. Peningkatan dalam kesejahteraan sosial dalam sektor ekonomi di masyarakat banyak macamnya di Desa Besuki, hal ini juga sebagai langkah untuk masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Desa Besuki melalui pemerintah desa dan bekerjasama dengan masyarakat desa melakukan kegiatan-kegiatan dalam forum-forum diskusi dan pemberian informasi serta pelatihan-pelatihan dengan masyarakat, dari skala yang terendah dari tingkat dusun sampai pada tingkat desa. Dengan mendorong pelaku-pelaku usaha-usaha kecil dari masyarakat untuk mulai berinovasi dalam produk-produk yang masyarakat buat, berguna untuk meningkatkan nilai jual dari hasil produk yang dibuat.

Sudiby juga menambahkan, Desa Besuki di dalam pengembangan produk rumah tangga (*Home industry*) yaitu hampir semua produk yang dihasilkan belum mendapatkan registrasi ataupun ijin dari dinas terkait. Hal ini menurut beberapa kelompok warga, disebabkan oleh minimnya informasi tentang tata cara pengurusan ijin dari dinas kesehatan tersebut. Bagi sebagian kelompok warga yang mengembakan sektor industri rumah tangga yang ada, berharap kedepannya dapat diberi kemudahan dan informasi yang cukup dalam pemberian ijin atas usaha rumah tangga di Desa Besuki, agar produk yang ditawarkan

menjadi memiliki nilai lisensi sehat. Dengan demikian produk tersebut memiliki nilai jual yang tinggi. Tantangan lain juga muncul dalam pengembangan sektor lembaga pinjaman keuangan yang ada di desa. Diharapkan untuk kedepannya, lembaga-lembaga seperti koperasi simpan pinjam, ataupun lembaga-lembaga sejenis tidak hanya memberikan pinjaman kepada sesama anggotanya namun lebih dari itu bisa untuk terbuka luas bagi warga lainnya seperti kelompok warga miskin. Terkait dengan ini, pemerintah desa harus berperan dan ditantang untuk memiliki strategi khusus untuk mendorong ataupun membangun semacam lembaga keuangan simpan pinjam yang dapat membantu kelompok-kelompok miskin.

Dalam hubungan sosial masyarakat sehari-hari, Desa Besuki memiliki kelompok kepemudaan berupa Karang Taruna. Selain itu terdapat kegiatan pendukung berupa, gotong royong dan kerja bakti. Keberadaan organisasi-organisasi dan kegiatan tersebut telah mampu menciptakan hubungan sosial antar kelompok pemuda dan masyarakat lainnya dalam memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa. Misalnya lahirnya kesadaran pemuda yang cinta lingkungan. Proses menjalankan rutinitas di Desa Besuki juga terdapat beberapa tantangan yaitu minimnya sarana dan prasarana pendukung serta terjadinya pasang surut jumlah anggota yang aktif dalam organisasi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang menjadi agenda rutin dan mampu membangkitkan rasa sosial antar masyarakat menjadi sering terhambat. Mengingat dukungan pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kordinasi antar lembaga keagamaan menjadi agenda penting yang harus dilakukan bagi Desa Besuki untuk kedepannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (KESOS) Desa Besuki:

“Ketika masyarakat diajak untuk bergotong royong giat dan aktif untuk memberikan tenaganya, setelah gotong royong dilakukan sekedar untuk makan bersama setelah bekerja dari hal tersebut pasti disediakan oleh masyarakat. Dan juga masyarakat juga memiliki beberapa kendala atas pasang surutnya keaktifan dalam organisasi-organisasi yang ada” (Pujiyatno, 57 tahun, Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial (Kaur Kesos), Desa Besuki, wawancara 12 April 2021).

Menurut Pujiyatno umumnya masyarakat Desa Besuki memiliki semangat dan giat untuk bergotong royong atau saling membantu, keharmonisan ini juga tergambar setelah kegiatan berlangsung pasti ada sesi untuk makan bersama yang berguna untuk mengakrabkan masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh KESOS Desa Besuki dengan perangkat dari tingkat RT, RW, dan dusun untuk mengupayakan dan mengaktifkan masyarakatnya. Pujiyatno juga menambahkan, dalam proses keberlangsungannya organisasi-organisasi pemuda tersebut juga memiliki tantangan berupa tidak lahirnya kader-kader yang handal. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya waktu yang dimiliki karena kesibukan bekerja dan bersekolah. Sehingga seringkali keberadaan organisasi-organisasi tersebut tidak selalu ada sepanjang tahunnya. Selain itu juga terdapat faktor-faktor tantangan lainnya yang juga menjadi penghambat terhadap keberlangsungan organisasi-organisasi kepemudaan tersebut, diantaranya yaitu organisasi kepemudaan tersebut belum memiliki basis finansial yang mandiri dalam menjalankan roda organisasinya. Terkait dengan tantangan ini, dukungan pemerintah desa untuk mendorong peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan bagi organisasi pemuda menjadi sangat penting. Agar kreatifitas dari organisasi kepemudaan yang ada di Desa Besuki mampu mendorong mereka memiliki kekuatan organisasi yang baik di bidang tata kelola organisasi dan kemandirian finansial.

Masyarakat Desa Besuki aktif dalam kesenian dan olahraga yaitu *Pertama* berupa kelompok-kelompok kesenian daerah berupa Kuda Kepang, Janeng, Kethoprak, Wayang Kulit. *Kedua* klub olahraga seperti klub sepak bola dan bulu tangkis, klub-klub tersebut memiliki prestasi yang cukup baik, misalnya telah beberapa kali meraih juara dalam kompetisi-kompetisi di tingkat desa dan kecamatan.

“Kesenian di Desa Besuki banyak berupa kelompok-kelompok Kuda Kepang, Janeng, Kethoprak, sebenarnya juga ada Wayang Kulit ada tapi kurang berjalan. Kecuali ada tanggapan (Panggilan) dari kesenian ini juga akan membantu ekonomi masyarakat yang bekerja dibidang seni tersebut” (Triyono, 49 tahun, Kepala Desa Besuki, wawancara 13 April 2021).

Menurut Triyono Desa Besuki dengan adanya kelompok masyarakat yang aktif dalam bidang kesenian dan kelompok masyarakat dalam bidang klub olahraga juga memiliki beberapa tantangan dan hambatan disetiap kinerjanya yaitu minimnya sarana dan prasarana olah raga dan minimnya undangan karena masalah virus Covid-19 yang tidak dikehendaki untuk adanya kerumunan sesuai dengan aturan. Selain itu terdapat tantangan lain berupa tidak adanya mekanisme pengembangan organisasi klub olah raga secara baik, sehingga seringkali capaian-capaian prestasi yang seharusnya bisa didapatkan oleh Desa Besuki menjadi terhambat. Semua tantangan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Desa Besuki, agar dapat memberikan dukungan secara penuh terhadap pengembangan kelompok seni dan klub-klub olah raga yang ada, agar bisa menjadi lebih baik.

Dalam menjalankan hubungan sosial keagamaan selama ini, telah didukung oleh adanya keberadaan Tempat Pembelajaran Quran (TPQ), masjid, dan gereja yang tersebar di 4 (Empat) dusun, khusus gereja terdapat di Dusun Kesenet karena mayoritas masyarakat adalah beragama Katolik dan Kristen berada pada wilayah ini. Keberadaan lembaga ini akan membantu meningkatkan ketaqwaan masyarakat dan menciptakan lingkungan Desa Besuki yang religius. Selain TPQ, di Desa Besuki juga terdapat aset sosial keagamaan yang cukup penting dan berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari, yaitu kegiatan-kegiatan agama Islam seperti tahlilan, pengajian salapanan, peringatan sewelasan, istiqosah, dalail, manaqib, komunitas Tariqah Nasabandiyah. Selain itu kegiatan dari agama lainnya seperti Kristen, Katolik juga memiliki kegiatan agama masing-masing. Sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Bapak Triyono (Kepala Desa Besuki) sebagai berikut:

“Desa Besuki dalam keadaan sosial agama memiliki dua agama yaitu Islam dan Kristen, perihal sosialnya bagus tidak ada masalah, untuk urusan ibadah menggunakan hak masing-masing dalam arti orang Islam menggunakan syariat Islam, begitu juga Kristen juga. Bergotong royong dengan bersatu. Fasilitas ibadahnya ada gereja dan masjid khususnya Dusun Kesenet yang memiliki keduanya” (Triyono, 49 tahun Kepala Desa Besuki, wawancara 13 April 2021).

Menurut Triyono Desa Besuki memiliki mayoritas agama Islam dan disusul dengan agama lainnya yaitu Kristen, satu sama lain memiliki keberagaman dalam agama tetapi tidak menjadikan saling menjatuhkan melainkan saling bergotong royong satu sama lain dan juga diharuskan untuk menghargai umat agama yang berbeda. Dalam prakteknya terlihat dalam satu wilayahnya yaitu Dusun Kesenet yang memiliki dua tempat ibadah yang berbeda, yaitu masjid sebagai bangunan tempat beribadah orang Islam dan gereja merupakan tempat ibadah umat Kristen. Pembagian ini terdapat pada Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) tahun 2018, 2019, dan 2020, dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 5. Pemeluk Agama Desa Besuki Pada Tahun 2018, 2019 dan 2020

No	Agama	Jumlah (Jiwa)		
		2018	2019	2020
1.	Islam	2.850 jiwa	2.930 jiwa	3.048 jiwa
2.	Katolik	6 jiwa	8 jiwa	8 jiwa
3.	Kristen	71 jiwa	89 jiwa	89 jiwa
4.	Hindu	0 jiwa	0 jiwa	0 jiwa
5.	Buddha	0 jiwa	0 jiwa	0 jiwa
Jumlah		2.927 jiwa	3.027 jiwa	3.145 jiwa

Sumber : Data LKPP Desa Besuki tahun 2018, 2019 dan 2020

Berdasarkan data dari tabel 5 (Lima) menunjukkan bahwa pemeluk agama Desa Besuki sebagian besar Islam yakni sebesar 2.850 jiwa pada tahun 2018, 2.930 jiwa pada tahun 2019, dan 3.048 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan untuk tabel pemeluk agama Hindu dan Buddha di Desa Besuki dari tahun 2018, 2019, dan 2020 0 (nol) atau tidak ada. Selain itu tingginya pemeluk agama Islam diiringi dengan masjid sebagai tempat ibadah dengan jumlah yang banyak atau

memadahi untuk digunakan, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Besuki tersebut dipengaruhi persebaran Islam yang pesat di wilayah Desa Besuki. Tempat ibadah berupa gereja juga terdapat pada wilayah Desa Besuki walaupun jumlahnya tidak sebanyak dengan masjid.

B. Program Kesejahteraan Sosial

1. Sejarah masuknya program

Kementrian Sosial (KEMENSOS) dan program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan bagian dari pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di wilayah lingkup kecamatan, sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 28 tahun 2018 tentang TKSK yang menjelaskan bahwa TKSK adalah seorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh kementerian sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten atau kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan. Wilayah penugasan dari TKSK pada setiap wilayah kecamatan adalah 1 (Satu) orang TKSK untuk cakupan pada wilayah desa. Tujuan dari pembentukan dan penugasan TKSK meliputi, *Pertama* meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. *Kedua* terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Dan *Ketiga* terjalinnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan (Panduan TKSK, 2013)

TKSK merupakan tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah desa pada satu kecamatan. Kriteria dari pemilihan TKSK (Permensos, 2012):

- a. Berasal dari unsur masyarakat
- b. Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan
- c. Pendidikan minimal SMA (Sekolah Menengah Atas), diutamakan D3 (Diploma) atau S1 (Sarjana)

- d. Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM
- e. Berusia 25 (Dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (Lima puluh) tahun
- f. Berbadan sehat (keterangan dokter atau puskesmas)
- g. Diutamakan yang sudah mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
- h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dibentuk oleh Kementerian Sosial Tahun 2009, berjumlah 5.267 orang untuk pertama kali dan berdasarkan jumlah kecamatan di seluruh Indonesia yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 245/PS.3/KPTS/X/2009 tentang TKSK pada tanggal 9 Oktober 2009. Meninjau pembentukan awal TKSK pada tanggal 9 Oktober selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Panduan TKSK, 2013). Gambaran umum program kesejahteraan sosial oleh TKSK di Desa Besuki sudah berjalan dari tahun 2009 sejalan dan sesuai dengan ketetapan Kementrian Sosial (KEMENSOS) Republik Indonesia yang mebentuk TKSK untuk membantu mengerakan partisipasi masyarakat dalam kesejahteraan sosial, jadi sudah 11 (Sebelas) tahun TKSK di Desa Besuki melakukan kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk masyarakat.

Melakukan praktik kegiatan berupa program-program kesejahteraan sosial selama di Desa Besuki memerlukan bantuan dari pemangku kepentingan (*Stakeholder*) untuk terlibat bersama. Sebagaimana yang disebutkan dalam wawancara dengan TKSK Kecamatan Wadaslintang Desa Besuki:

“Pemerintahan desa yaitu kepala Desa Besuki, perangkat desa yaitu Kaur Kesra Desa Besuki, kadus-kadus Desa Besuki, Kasi Kesos Kecamatan Wadaslintang (Yang mewakili pak camat), karang taruna, Tagana (Taruna Siaga Bencana)” (VF, 38 tahun, TKSK Kecamatan Wadaslintang, wawancara 05 Juni 2021).

Menurut VF, keseluruhan dari *stakeholder* di Desa Besuki dan Kecamatan Wadaslintang memang terlibat dan mengikuti praktik dalam kesejahteraan sosial di Desa Besuki, bentuknya berupa pengawasan dan terjun langsung ke lapangan. Desa Besuki belum ada yang resmi menjadi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tugasnya mendampingi dan membantu urusan-urusan seperti berkas-berkas

untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jadi Kepala Dusun (Kadus) biasanya menunjuk langsung masyarakat untuk membantu penanganan berkas-berkas. Di sisi lainnya Desa Besuki memang belum melakukan hal yang lebih jauh seperti melantik masyarakat untuk menjadi PSM di wilayahnya, sejalan dengan hal tersebut jika dilakukan dengan baik dan benar PSM bermanfaat dalam terlibat dengan masyarakat dalam urusan kesejahteraan sosial.

“Untuk masalah sosial itu adalah bagaimana kita bisa menolong orang agar orang tersebut bisa menolong dirinya sendiri bisa bangkit keterpurukannya kemiskinannya, jadi jangan sampai kita menolong orang dengan memanjakan mereka (Istilahnya tidak hanya memberikan uang saja) harus ada pemberdayaan masyarakat disitu agar bisa menolong dirinya sendiri. Kesulitannya kita harus bisa mementingkan PMKS itu seperti apa, sebenarnya masyarakat desa itu sendiri merupakan sumber kesejahteraan sosial. Kemudahan ketika sekertaris desa atau cariknya sudah mengerti pendataan sosial terus permasalahan sosial itu enaknya ketika ke desa dalam mencocokkan data-data itu mudah karena pak Kadus dan pak Sekdesnya sudah mengerti” (VF, 38 tahun, TKSK Kecamatan Wadaslintang, wawancara 05 Juni 2021).

Menurut VF, efektifitas program kesejahteraan sosial Desa Besuki akan berjalan lancar dan baik jika dalam penanganan kesejahteraan sosial berupa penyaluran bantuan tidak hanya memberikan bantuan saja melainkan bisa diberdayakan masyarakatnya agar bisa mandiri dan berkembang dengan bantuan yang diterima. Kesulitannya adalah dalam mementingkan Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memiliki kriteria Anak Balita Telantar (ABT), Anak terlantar, Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), Anak jalanan (Anjal), Anak Dengan Kedisabilitas (ADK), Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Lanjut usia telantar, Penyandang disabilitas, Tunasusila, Gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Trafficking atau korban perdagangan orang, Korban tindak kekerasan (KTK), Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana Alam (KBA), Korban Bencana Sosial (KBS), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Fakir Miskin (FM), Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP), dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) (Permensos, 2012).

Dengan banyaknya kriteria PMKS bisa menjadi modal untuk mementingkan kesejahteraan sosial mereka. Kemudahan dari program kesejahteraan sosial Desa Besuki akan berjalan apabila perangkat desa sekertaris desa dan kepala dusun dari setiap wilayah sudah mengerti perihal pendataan PMKS.

VF juga menambahkan mengenai program TKSK merupakan program sosial dan dalam penanganan urusan gaji atau pendapatan yang akan diterima oleh tenaga TKSK disebut dengan tali asih dari Kementrian Sosial (KEMENSOS) sebesar Rp.500.000 akan dibayarkan satu bulan sekali dan kadang tidak pasti sekarang ini akan dibayarkan sekaligus dalam 3 (Tiga) bulan atau 4 (Empat) bulan sekali. Untuk waktu kerja dari TKSK Tidak ada patokan untuk jam kerja karena harus siap pagi, siang, malam karena tidak terpancang waktu karena relawan sosial (fleksibel) tetapi untuk jam kerja di Kecamatan Wadaslintang mengikuti jam kerja kantor dari pukul 08:00-16:00 WIB.

2. Pengurus program kesejahteraan sosial

Tetapi tidak cukup dengan program seperti penjelasan diatas, melainkan ada beberapa program kesejahteraan sosial pada praktik program kesejahteraan di Desa Besuki yang memiliki beberapa oraganisasi atau lembaga dalam menaungi dan membantu praktik kerja dari program kesejahteraan sosial. Seperti dibantu oleh perangkat-perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan program kesejahteraan sosial dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Adapun penjelasannya susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Susunan organisasi pemerintahan Desa Besuki

Pemerintahan Desa Besuki dalam menjalankan kewajibannya sama dengan desa lainnya di Kecamatan Wadaslintang, dipimpin oleh Kepala Desa dibantu jajarannya dalam mengembangkan dan menjalankan tugas-tugas yang ada di Desa Besuki. Pembagian ini terdapat pada Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKKP) tahun 2020, yang dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 6. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Besuki Tahun 2020

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
1.	Triyono	Laki-laki	Kepala Desa	SMA
2.	Sudibyoy	Laki-laki	Sekretaris Desa	SMA
3.	Ismanto	Laki-laki	Kepala Urusan Pemerintahan	SMA
4.	Pujiyatno	Laki-laki	Kepala Urusan Kesejahteraan sosial	SD
5.	Siti Purwaningsih	Perempuan	Kepala Urusan Umum	SMA
6.	Sudarwati	Perempuan	Kepala Urusan Keuangan	SMA
7.	Bikis	Laki-laki	Kepala Dusun Sikapat	SMA
8.	Tentrem	Laki-laki	Kepala Dusun Kesenet	SMA
9.	Paiso	Laki-laki	Kepala Dusun Sipait	SMA
10.	Nur Sodik	Laki-laki	Kepala Dusun Kalisalak	SMA
11.	Mukodir	Laki-laki	Staf Kepala Dusun	SD

Sumber : Data LKPP Desa Besuki Tahun 2020

Berdasarkan tabel 5 (Lima) diatas berkenaan dengan susunan organisasi dari kepengurusan pemerintah Desa Besuki yaitu berjumlah 11 (sebelas) orang. Pada kolom jenis kelamin dari pengurus Desa Besuki mayoritas adalah laki-laki dengan jumlah 9 (Sembilan) orang dan lainnya adalah perempuan dengan jumlah 2 (Dua) orang. Mayoritas pendidikan dari pengurus Desa Besuki adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu berjumlah 9 (Sembilan) orang, dan lainnya adalah berpendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 2 (Dua) orang. Jabatan pada Desa Besuki terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan sosial, kepala urusan umum, kepala urusan keuangan, kepala Dusun Sikapat, kepala Dusun Kesenet, kepala Dusun

Sipait, kepala Dusun Kalisalak, dan staf kepala dusun. Kinerja dalam kesejahteraan sosial secara langsung akan dibantu oleh kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan kesejahteraan sosial dan kepala dusun dari Desa Besuki.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota BPD Desa Besuki merupakan hasil dari pemilihan dari musyawarah bersama masyarakat, pembagian ini terdapat pada Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 7. Susunan Anggota BPD Desa Besuki Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Shodiq Hidayat	Ketua	Tokoh Masyarakat
2.	Hasim Haryadi	Wakil ketua	Tokoh Profesi
3.	Fatma Apriliyani	Anggota	Tokoh perempuan
4.	Sidik F.	Anggota	Tokoh Masyarakat
5.	Slamet	Anggota	Tokoh Masyarakat
6.	Ponidin	Anggota	Tokoh Agama
7.	Tuyarno	Anggota	Tokoh Pemuda

Sumber: Data LKPP Desa Besuki tahun 2020

Berdasarkan tabel 5 (Lima) diatas berkenaan dengan susunan organisasi dari kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan dari tokoh masyarakat berjumlah 3 (Tiga) orang , tokoh profesi berjumlah 1 (Satu) orang, tokoh perempuan berjumlah 1 (Satu) orang, tokoh agama 1 (Satu) orang, dan tokoh pemuda 1 (Satu) orang. Perwakilan dari tokoh-tokoh ini akan mengupayakan, *Pertama* mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. *Kedua* legalisasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa

bersama-sama Pemerintah Desa. *Ketiga* pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Keputusan Desa. *Keempat* Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Anggota LPMD Desa Besuki Desa Besuki merupakan hasil dari pemilihan dari musyawarah bersama masyarakat, pembagian ini terdapat pada Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 8. Susunan Anggota LPMD Desa Besuki Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Paiman	Ketua.	Tokoh Masyarakat
2.	M. Yazid F.	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
3.	Wahyu	Bendahara	Tokoh Perempuan
4.	Barokahslamet	Bidang Ekonomi	Tokoh Masyarakat
5.	Bahrudiono	Bidang Kesejahteraan Sosial	Tokoh Pemuda
6.	Sriyono	Bidang Tata-tertib	Tokoh Agama
7.	Widi Lesmana	Bidang Sumber Daya Manusia	Tokoh Masyarakat
8.	Edo Sukarman	Bidang Pembangunan	Tokoh Pemuda

Sumber: Data LKPP Desa Besuki tahun 2020

Berdasarkan tabel 5 (Lima) diatas berkenaan dengan susunan organisasi dari kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan perwakilan dari tokoh masyarakat berjumlah 4 (Empat) orang, tokoh perempuan 1 (Satu) orang, dan tokoh pemuda 2 (Dua) orang, dan tokoh agama 1 (Satu) orang. Perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat Desa Besuki akan mengupayakan, *Pertama* menyusun

rencana pembangunan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG). *Kedua* melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembanguan secara partisipatif. *Ketiga* menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat. Dan *Keempat* menumbuhkn dan mengembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

3. Kegiatan-kegiatan program

Kegiatan yang dijalankan masyarakat Desa Besuki tidak berbeda dengan wilayah desa-desa yang berada di Kecamatan Wadaslintang, yang sudah diberikan kewenangan untuk bisa menggerakkan masyarakat terutama yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial melalui sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya. Upaya yang dilakukan adalah untuk menggerakkan masyarakat desa supaya aktif dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan seperti pembangunan infrastruktur jalan desa, pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan industri rumahan (*Home industry*), kegiatan melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes), dan kegiatan-kegiatan pelatihan yang diberikan desa kepada masyarakat terpilih untuk mengembangkan diri.

Terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa. Desa dapat berkontribusi dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial seperti contoh permasalahan pandemi Covid-19 dari tahun 2020 yang menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dari dana desa di antaranya alokasi anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai untuk masyarakat, dapat melengkapi program-program lain untuk meminimalkan dampak berupa dampak sosial dan dampak ekonomi, tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sebelumnya sudah memahami sistem, dapat diarahkan untuk membangun keterangan yang

mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang atau masyarakat yang dimaksud (legitimasi) dan kredibilitas atau dapat dipercaya oleh pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan (Maun, 2020).

Bantuan yang keluar dari desa disebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD), BLT-DD ini berbentuk uang yang akan diberikan kepada keluarga miskin atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dengan adanya pandemi Covid-19. Besaran uang yang didapatkan adalah Rp. 600.000/KPM. Bantuan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak, dengan menggunakan sumber pembiayaan dari pemerintah desa dan masyarakat atau Dana Desa (Wibawani, dkk: 2021)

BAB IV

PERSIAPAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DI DESA BESUKI

A. Persiapan program kesejahteraan sosial oleh TKSK

TKSK sebagai pilar partisipasi sosial tidak lepas dari konsep tentang hubungan dengan masyarakat, konsep tentang hubungan mencakup tingkat kesamaan antara konsep yang telah direncanakan antara dua atau lebih konsep. *Pertama* konsep berdasarkan kesamaan, dibagi berdasarkan perilaku yang dapat dihubungkan satu dengan lainnya dengan menggunakan konsep kesamaan. Diasumsikan bahwa seorang masyarakat yang memilih suatu norma sosial dapat memilih perilaku sesuai dengan yang sudah ditetapkan. *Kedua* konsep berdasarkan penentuan ini sekurang-kurangnya menggambarkan sebuah kondisi antara dua masyarakat atas aktor atau sasaran, juga terlibat dalam suatu perilaku bersifat saling menentukan atau saling menjadi sebab bagi yang lain. Kedekatannya dekat dengan pengertian saling tergantung dan dikaitkan dengan yang lainnya akan membentuk pernyataan atas nilai-nilai sosial yang dimiliki, akan memperlihatkan kelancaran pada masing-masing masyarakat dan memperlihatkan pada rugi atau untung dari proses kegiatan yang dilakukan. *Ketiga* konsep gabungan antara kesamaan dan penentuan, ada beberapa bagian yang ada antara lain mengenai konfirmatas di dalam masyarakat berupa penyesuaian, dan ketepatan (Suhardono, 2018)

Di sisi lainnya, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan dari kesejahteraan sosial di desa merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (Panduan TKSK, 2013). Dari segi pelaksanaan program TKSK Desa Besuki memiliki beberapa tujuan dalam peningkatan fungsi sosial untuk masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan sosial

Pemetaan sosial oleh TKSK berupa pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun penjelasannya sebagai berikut (Permensos, 2012):

a) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), meliputi pekerja sosial profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya (LKS), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), keluarga pioneer, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM), wanita pemimpin kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Permensos, 2012)

b) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meliputi Anak Balita Telantar (ABT), anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), Anak Jalanan (Anjal), Anak Dengan Kedisabilitas (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, Tunasusila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking atau korban perdagangan orang, Korban Tindak Kekerasan (KTK), Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana Alam (KBA), Korban Bencana Sosial (KBS), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Fakir Miskin (FM), Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP), dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) (Permensos, 2012)

Biddle dan Thomas dalam teori peran menjelaskan mengenai perilaku obyek dapat kembali melibatkan sasaran secara aktual, maupun sasaran yang dimaksudkan. Ciri-ciri posisi dalam mengategorikan dari seseorang dibedakan atas tanda dari kelengkapan secara umum, perilaku atas reaksi umum dari seseorang terhadapnya. Pembahasan mendalam pada ciri-ciri posisi adalah persoalan simbol dari bukti seseorang dan kondisi dari keanggotaannya di masyarakat. Selayaknya masyarakat yang masuk dalam kriteria PMKS mendapatkan pertolongan pada kesejahteraan sosialnya (Suhardono, 2018). Pada praktik dari kinerja TKSK di Desa Besuki menegaskan bahwa beberapa kesulitan yang dimiliki Desa adalah kurangnya mementingkan PMKS. Seperti yang diungkapkan oleh VF tenaga TKSK dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“Desa Besuki harus bisa mementingkan PMKS itu seperti apa, sebenarnya masyarakat desa itu sendiri merupakan sumber kesejahteraan sosial. Untuk masalah sosial itu adalah bagaimana kita bisa menolong orang agar orang tersebut bisa menolong dirinya sendiri bisa bangkit keterpurukannya kemiskinannya. Jadi jangan sampai kita menolong orang dengan memanjakan mereka (Istilahnya tidak hanya memberikan bantuan saja) harus ada pemberdayaan masyarakat disitu agar bisa menolong dirinya sendiri” (VF, 38 tahun, TKSK Kecamatan Wadaslintang, wawancara 05 Juni 2021).

Pernyataan informan pada kutipan di atas menunjukkan bahwa pemetaan dalam PMKS harus didahulukan atau diutamakan dalam masalah kesejahteraan sosial. Desa memiliki sumber kesejahteraan sosial berupa masyarakat yang disebut dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS akan sejalan dengan adanya praktik kerja dari TKSK dalam kesejahteraan sosial di desa. TKSK harus bisa meyakinkan desa untuk tidak hanya memberikan bantuan saja, melainkan perlu adanya pendampingan dalam memberdayakan masyarakat supaya ke depannya masyarakat bisa mandiri minimal bisa menolong dirinya sendiri dan bisa berperan atau berpartisipasi dalam kesejahteraan sosial, yang akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat sekitar. Selain itu pernyataan VF dapat menggambarkan mengenai proses dari pemetaan PMKS di Desa Besuki yang masih kurang. Penulis juga mengkonfirmasi mengenai peran TKSK dalam pemetaan sosial berupa data untuk bantuan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil dari wawancara dengan VF terdapat dalam kutipan berikut ini:

“Untuk pemetaan sosial berupa Verifikasi dan Validasi (Verval) data oleh admin Desa Besuki kami memonitoring, mendukung dan memotivasi agar mau mengerjakan bersama dengan perangkat-perangkat lainnya dari Desa Besuki untuk Verval data. Kalau BPNT tidak bisa dilakukan pemetaan karena itu dari MUSDES yaitu data yang sudah Verval di desa akan di kirim langsung ke kabupaten, dan dari kabupaten ke Dinsos” (VF, 38 tahun, TKSK Kecamatan Wadaslintang, wawancara 05 Juni 2021).

Pernyataan dari VF menyimpulkan bahwa ada kegiatan dari pemetaan sosial berupa data DTKS yang melibatkan TKSK dan tidak melibatkan. Seperti bantuan BST yang memberikan akses kepada TKSK untuk ikut serta memonitoring dan memantau dalam verifikasi dan validasi (Verval) data BST. Berbeda dengan BPNT untuk datanya memang sudah dilakukan verifikasi dan validasi langsung oleh desa dan data tersebut akan langsung diberikan atau dikirimkan untuk dilanjutkan dari proses penyerahannya dari Desa Besuki akan menuju kabupaten, dan selanjutnya data tersebut akan sampai ke Dinas Sosial (Dinsos).

Sementara itu data masyarakat yang tidak sedikit dari kriteria-kriteria seperti PMKS menimbulkan masalah baru dari admin DTKS Desa Besuki. Penulis mewawancarai admin DTKS Desa Besuki Sudibyo yang terdapat dalam kutipan di bawah ini:

“.....Saya juga admin dari DTKS dan operator juga, memang kadang terkendala *deadline*, kita di suruh untuk verval data dan kita dikasih informasinya kadang sore dan itu nantinya harus dikirim jam 12 malam. Harus selesai dengan cepat, itu yang membuat kita harus kerja keras. Memang sinyal yang membuat kendala, karena dirumah sinyal susah, kalau di kantor ada Wifi. Terus terang kalau enggak ada sinyal repot karena sekarang harus online, itu enggak cuma di desa sini saja mungkin desa lain juga mengalami kendala seperti ini” (Sudibyo, 32 tahun, Admin DTKS Desa Besuki, wawancara 12 April 2021).

Admin dari DTKS mengalami kendala dari adanya informasi yang mendadak untuk verifikasi dan validasi data agar segera untuk di *update*. Waktu informasi yang diberikan pada sore hari dan harus selesai dalam hari itu juga

sebelum pukul 24:00 WIB memberikan kendala akses internet yang susah di Desa Besuki, sinyal yang bagus terdapat di kantor kelurahan Desa Besuki karena menggunakan akses *Wifi*. Hal ini tentu saja membuat kerja dari admin dan perangkat desa yang membantu bertambah dan dikejar oleh *deadline* dari tugas tersebut.

2. Melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Pelaksanaan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksudkan pada daerah setiap desa dalam wilayah kecamatan. Permasalahan sosial berupa kesejahteraan sosial menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia. Permasalahan lain adanya politisi yang muncul ketika kampanye tiba, mereka meyuarkan masalah kesejahteraan sosial tapi ternyata tidak cukup dengan berdialektika, Maka terbentuklah TKSK yang menjadi sumber inspirasi bagi relawan sosial dan pekerja sosial yang bergerak bukan hanya untuk berdialektika, tetapi mampu mewujudkan dialektika menjadi aksi nyata dalam membantu pemerintahan (Sudrajat, dkk: 2017)

Untuk menjembatani hambatan seperti di atas maka diperlukan TKSK yang melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan yang dilakukan secara menyeluruh ke wilayah desa-desa. Dengan landasan program yang akan dibawakan atau dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga capaian yang akan didapatkan masyarakat menjadi makmur. Sebagaimana hasil wawancara dengan VF TKSK Kecamatan Wadaslintang sebagai berikut:

“Yang jelas pada saat proses perencanaan pada Musyawarah Dusun (Musdus) masyarakat bisa merencanakan tetapi yang di musyawarahkan adalah masalah program fisik dalam kesejahteraan masih kurang. Intinya ketika ada masalah sosial “Kapan saya mendapatkan bantuan”, “Kan, saya miskin”, padahal yang menentukan miskin itu adalah dari Musdes (Musyawarah desa) itu jelas ada perwakilan semua masyarakat atau perwakilan dari dusun. Disitu indikatornya harus jelas dan disini harus ada peningkatan kapasitas itu kadang kurang atau terlewat sedangkan relawan sosial tidak bisa bergerak sendiri dimana perlu sokongan dari kepala desa, sekertaris desa, pemerintah kecamatan bergerak “(Untuk oprak-oprak) ayo dan sebagainya”. Ketika mereka (Masyarakat) ada kesulitan dan pertanyaan-pertanyaan kita bisa menjadi narasumber dalam sesi Musdes atau Musdus dalam membantu penyelenggaraan

kesejahteraan sosial di desa” (VF, 38 tahun, TKSK Kecamatan Wadaslintang, wawancara 05 Juni 2021).

Pernyataan dari VF menjelaskan di Desa Besuki dalam proses pelaksanaan kesejahteraan sosial perlu adanya *upgrade* dari sesi Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) tidak hanya permasalahan fisik atau kegiatan yang memerlukan tenaga melainkan masalah sosial dalam bentuk kesejahteraan sosial juga perlu diperhatikan dalam setiap sesi di Musdus dan Musdes. Bukan hanya pada saat permasalahan sosial masyarakat akan dapat bantuan kapan, dan siapa saja yang mendapatkan, keterlibatan masyarakat di Desa Besuki perlu adanya andil dan tegas atas kebutuhan dari masalah tersebut. Tidak hanya bekerja sendiri TKSK memerlukan bantuan dari *stakeholder* dari desa seperti perangkat desa, masyarakat, dan petugas dari kecamatan. TKSK harus bisa memposisikan diri untuk bisa memberikan jawaban dan solusi atas masalah kesejahteraan sosial di Desa Besuki.

Proses menyuarkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Desa Besuki bukan hanya milik TKSK saja, dan masyarakat hanya menerima hasil berupa bantuan-bantuan dari setiap sesi program bantuan yang dilakukan. Melainkan masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam proses kesejahteraan sosial, Sebagaimana hasil wawancara dengan VF TKSK Kecamatan Wadaslintang sebagai berikut:

“Semisal saya datang ke Desa Besuki datang ke orang semisal ada yang pelaporan, sebenarnya yang bisa mendata masyarakat sekitar, melaporkan ke RT nanti dari RT akan ke desa dan data yang masyarakat berikan tersebut bisa diinventaris oleh desa. Kemudian data tersebut bisa terjadi dan ideal nantinya masyarakat agar tidak rasa iri satu sama lain” (VF, 38 tahun, TKSK Kecamatan Wadaslintang, wawancara 05 Juni 2021).

VF menjelaskan mengenai keberadaan masyarakat juga bisa andil dan berkontribusi untuk melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Desa Besuki dalam bentuk pendataan masyarakat kurang mampu dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada ketua RT setempat, selanjutnya akan dilanjutkan ke desa. Data yang diberikan ini akan menjadi data inventaris yang representatif bagi masyarakat yang kurang mampu agar nantinya pada saat

penerimaan bantuan tidak memunculkan rasa iri di masyarakat karena sebelumnya data tersebut dari masyarakat dan untuk bantuannya akan diterima oleh yang membutuhkan di Desa Besuki. Biddle dan Thomas menjelaskan mengenai ciri-ciri individu saat berperilaku secara umum dapat diperlakukan secara operasional atas perilaku yang dilakukan dan harus memenuhi syarat bahwa bisa untuk diskalakan atau melalui pengukuran yang dapat dibagi menjadi 3 (Tiga) bentuk, *Pertama* berkenaan pada alternatif hadir-tidaknya perilaku. *Kedua* berkenaan pada skala yang berisi sejumlah kelompok dari perilaku yang bergerak pada program yang dilaksanakan. *Ketiga* skala yang dibentuk berdasarkan penggolongan pada dua kejadian yang bersamaan oleh seseorang dari alternatif perilaku setiap individu (Suhardono, 2018)

“Ya khususnya karena adanya bantuan mereka memberi saran dan ajakan jangan sampai dengan adanya bantuan di Desa Besuki jangan sampai ada ramai-ramai (Perkelahian) itu memang sudah akan menjadi petunjuk untuk ke masing-masing masyarakat desa. Yang dikontrol salah satunya adalah masalah bantuan itu kadang pengurangan dan penambahan jadi komunikasi sama perangkat” (Pujijatno, 57 tahun, Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial Desa Besuki, wawancara 12 April 2021).

Selaras dengan tugas TKSK Kecamatan Wadaslintang, Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial (Kaur Kesra) Desa Besuki juga menjelaskan perannya pada saat berlangsungnya pemberian bantuan-bantuan yang ada di desa, bahwasannya memberikan pengarahan jangan sampai adanya bantuan membuat keributan di desa apalagi adanya perkelahian oleh masyarakat. Komunikasi menjadi kunci utama dari TKSK dengan Kaur Kesra Desa Besuki berupa konfirmasi dari pengurangan atau penambahan dari setiap penyaluran bantuan di desa.

3. Melakukan koordinasi bersama

Koordinasi TKSK yang dimaksud adalah dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Desa Besuki. Menghubungkan masyarakat dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan masyarakat untuk menjangkau atau memperoleh sumber, pelayanan dan kesempatan. Pada fungsi ini untuk membantu masyarakat agar mendapat pelayanan kesejahteraan

sosial yang dibutuhkan, TKSK melakukan jejaring sosial dengan organisasi atau kelompok masyarakat yang tersedia (Andrianto, dkk: 207).

Koordinasi oleh TKSK dengan PSKS dan SDM lainnya di Desa Besuki dilakukan dalam forum desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pujiyatno Kaur Kesra Desa Besuki sebagai berikut:

“Koordinasi selama ini sudah baik, ini enggak nyampe 2 (Dua) bulan sudah kesini, bahkan 1 (Satu) bulan 2 (Dua) kali. Kebiasaannya kan gini ya, sebelumnya ada wacana-wacana seperti bantuan atau yang lain mengenai masalah sosial kami akan rapatkan setelah itu akan data dari masyarakat, sampai enggak ada suara dan benar-benar masyarakat yang ditulis dalam data itu memang layak menerima program bantuan. Owh iya, namanya Musdus dan Musdes. Kalau musyawarah dusun itu dari dusun masing-masing diantaranya yang dikumpulkan RT, RW dan sesepuh lingkungan masing-masing paling tidak satu lingkungan itu membawa orang sebanyak 5 (Lima) biasa kayak gitu. Kalau musyawarah desa itu biasanya 1 (Satu) tahun 2 (Dua) kali di balai Desa Besuki, yang datang semua lembaga dikumpulkan semua dari RT, RW, BPD, Tokoh masyarakat.” (Pujiyatno, 57 tahun, Kaur Kesra Desa Besuki, wawancara 12 April 2021).

Pujiyatno menjelaskan koordinasi yang dilakukan antara TKSK, perangkat desa, PSKS, dan SDM lainnya sudah baik. Koordinasi yang mempertemukan banyak komposisi dari masyarakat dilakukan bahkan 1 (Satu) bulan 2 (Dua) kali. Hal ini menunjukkan peran masyarakat dalam koordinasi di Desa Besuki berjalan sesuai dengan pedoman kebutuhan dari setiap kebutuhan di desa tersebut. Koordinasi ini memang memerlukan unsur menjembatani dari pihak desa untuk merealisasikan setiap rencana-rencana baik skala kecil, menengah, ataupun jangka panjang. Sebelumnya Biddle dan Thomas memaparkan mengenai konsep posisi dalam koordinasi dengan masyarakat, ada berbagai hal yang disandingkan seperti yaitu umur, jenis kelamin, atau bahkan warna kulit. Hal ini menjadi dasar dalam membuat perbedaan antara anggota masyarakat dalam mengkatagorikan sebuah posisi dalam koordinasi. Dengan demikian posisi adalah suatu kategori yang kolektif tentang seseorang yang menjadi dasar bagi orang lain dalam memberikan sebuah sebutan, perilaku, atau reaksi yang umum kepadanya dalam masyarakat.

Sementara itu koordinasi lainnya menghadirkan masyarakat dalam pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penulis mewawancarai admin DTKS Desa Besuki Sudibyo yang terdapat dalam kutipan di bawah ini:

“Kalau itu kadang dikumpulkan di desa dan kadang juga di kecamatan, kadang kalau mendadak jadi kita tidak kumpul dulu, jadi kita dikumpulkan melalui grup *Whastapp*. Dan koordinasinya di situ. Dan koordinator langsung di kecamatan adalah Kasi Kesos Kecamatan Wadaslintang. Grup kabupaten juga ada, ya mungkin kalau disini adalah TKSK sebagai koordinator, kalau Kasi Kesosnya mungkin terima beres saja” (Sudiby, 32 tahun, Admin DTKS Desa Besuki, wawancara 12 April 2021).

Admin DTKS juga mengkonfirmasi mengenai koordinasi yang dilakukan TKSK, PSKS serta SDM lainnya, sesinya dalam bentuk pertemuan di desa ataupun di kecamatan. Pertemuan di desa akan dihadiri perangkat desa, PSKS, dan SDM lainnya karena kepentingan koordinasi oleh TKSK untuk masyarakat, sedangkan untuk di kecamatan merupakan pertemuan seluruh admin dan kepala desa seluruh wilayah desa di Kecamatan Wadaslintang. Dengan kemudahan teknologi, grup Whatsapp menjadi sarana koordinasi dari TKSK dengan admin DTKS Desa Besuki terlebih jika informasi mendadak dan perlu penanganan yang cepat.

4. Melakukan sinergi, integrasi dan sinkronisasi

Sinergi dalam kegiatan, integrasi dalam pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat dan sinkronisasi penyerahan dalam melaksanakan tugas, dengan camat atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan yang nantinya akan sejalan dengan pemberdayaan di wilayah desa. TKSK akan ikut serta dalam merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di setiap wilayah-wilayah kerja dari TKSK. Sebagaimana hasil wawancara dengan VF TKSK Kecamatan Wadaslintang sebagai berikut:

“Kita setiap bulan ketika akan ada penyaluran program-program bantuan, kita akan bertemu dengan Camat dan Kasi Kesos kecamatan dan kepala-kepala desa melalui forum di kecamatan, agar mereka berpartisipasi kami juga komunikasikan melalui grup-grup *Whatsapp*. Kita melakukan komunikasi melaporkan ketika ada program kemudian juga surat dari dinas sosial akan disampaikan kepada kepala desa mengenai penerimaan bantuan sosial” (VF, 38 tahun, TKSK Kecamatan Wadaslintang, wawancara 05 Juni 2021).

Pernyataan dari wawancara dengan VF di atas bahwa melakukan sinergi, integrasi dan sinkronisasi dengan Camat Wadaslintang, Kepala Seski Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) Wadaslintang dan kepala desa melalui forum di kecamatan. Keterbatasan ruang dan waktu dalam sesi diskusi dan komunikasi penyelenggara kesejahteraan sosial yang mempertemukan para *stakeholder* di Kecamatan Wadaslintang dialihkan pada aplikasi yaitu Whatsapp, untuk memudahkan komunikasi dalam informasi yang diberikan sehingga aktualisasi kegiatan bisa dilakukan secara baik dan benar atau menghindari kelalaian dalam miskomunikasi atau salah satu pelaku komunikasi tidak melakukan komunikasi dengan benar.

Selain itu dalam mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah desa menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Amanat tersebut telah memberi gambaran bahwa terbukanya peluang dan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berperan atau berpartisipasi ke depannya dalam menyelenggarakan kegiatan sosial kemanusiaan atau usaha kesejahteraan sosial (Andrianto, dkk: 203)

5. Kegiatan pelayanan dan bimbingan sosial

Kegiatan pelayanan dan bimbingan sosial dalam bentuk inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak. Pelayanan Sosial terdiri atas program-program yang telah di sediakan berdasarkan kriteria, selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk memudahkan akses pada pelayanan dan lembaga-lembaga untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan pelayanan sosial diberikan dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya tidak selalu dilaksanakan oleh pekerja sosial, melainkan juga bagi tenaga-tenaga profesional yang lain namun dengan maksud dan tujuan yang sama untuk mencapai suatu keadaan yang sejahtera. Sehingga inividu sebagai tenaga-tenaga profesional lain juga dapat memberikan pelayanan-pelayanan sosial. (Fahrudin, 2012)

Kinerja pekerja sosial TKSK dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial dapat dilihat dari beberapa strategi, sebagai berikut (Suharto, 2005):

- 1) Meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
- 2) Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan.

TKSK sebagai pekerja sosial perlu mengantongi beberapa pengetahuan yang dimiliki sebagai pijakan seperti, mengetahui tentang kebijakan sosial, sistem negara kesejahteraan, dan hak-hak sosial masyarakat. Termasuk pengetahuan-pengetahuan khusus dalam bidang-bidang di mana praktek pekerjaan sosial beroperasi seperti, *Pertama* kebijakan kesejahteraan sosial dan kesehatan. *Kedua* praktek perawatan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan perlindungan anak. Dan *Ketiga* perencanaan sosial termasuk perencanaan wilayah perkotaan, pedesaan dan perumahan (Suharto, 2005)

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi masalah yang dialami, TKSK perlu untuk melakukan beberapa terapi baik itu terapi keluarga, bimbingan perorangan maupun bimbingan kelompok disesuaikan dengan kondisi kliennya dari kegiatan ini tampak peran TKSK sebagai konselor untuk masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing penduduk miskin dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator.

Penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing penduduk miskin dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator. Lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meliputi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni kualitas para anggota dan pengurus

kelompok serta peningkatan kemampuan usaha anggota. Pendamping yang paling efektif adalah dari anggota masyarakat itu sendiri, yaitu anggota masyarakat yang telah lebih sejahtera dan telah berhasil dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya dan mendapatkan pelatihan dan pembinaan (Andrianto W, dkk: 205).

Di sisi lain, dalam kinerjanya TKSK tidak dipengaruhi oleh jam kerja kantor. Sebagaimana hasil wawancara dengan VF TKSK Kecamatan Wadaslintang sebagai berikut:

“Tidak ada patokan untuk jam kerja karena harus siap pagi, siang, malam karena tidak terpancang waktu karena relawan sosial (Fleksibel). Agar tidak menghambat tadi operasional dan akomodasi untuk kegiatan sosial itu sendiri berupa pelayanan sosial. Ketika saya meminta data ke desa tetapi tidak diberikan, karena sudah di cap kalau ada kegiatan ini akan ada dana” (VF, 38 tahun, TKSK Kecamatan Wadaslintang, wawancara 05 Juni 2021).

Pernyataan dari wawancara dengan VF di atas menjelaskan dalam kinerja selama ini di Desa Besuki tidak dipengaruhi oleh waktu TKSK merupakan relawan sosial harus siap pagi, siang, dan malam. Pelayanan sosial oleh TKSK mengalami beberapa hambatan di desa karena pada saat data-data masyarakat yang diperlukan tidak diberikan sepenuhnya, mereka (Desa Besuki) menganggap bahwa adanya kegiatan pelayanan sosial akan mendapatkan dana karena sebelumnya sudah ada.

6. Mengembangkan partisipasi masyarakat

Peran adalah konsep-konsep dalam penentuan perilaku. Namun demikian Biddle dan Thomas menjelaskan peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi perilaku atas seseorang masyarakat yang mesti dilakukan dan menduduki sebuah posisi dalam ranah masyarakat (Suhardono, 2018). Selain itu dalam kegiatan mengembangkan partisipasi masyarakat akan menjadikan masyarakat berjejaring sosial dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di desa, dengan demikian akan terjalinnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan program-program kegiatan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya dalam meningkatkan kinerja lembaga atau kelompok sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial

secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Triyono Kepala Desa Besuki sebagai berikut:

“Kalau diwilayah sini pasti ada yang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan di desa, selain dari pak Kadus yang lainnya ada kader-kader dari pemberdayaan, Posyandu, kami saling bekerja sama untuk menggerakkan masyarakat. Dan kalau di wilayah sini persoalan aturan-aturan selalu mengikuti dan sesuai dengan prosedur dari pemerintah” (Triyono, 47 tahun, Kepala Desa Besuki, wawancara 13 April 2021).

Pernyataan dari wawancara di atas dengan Kepala Desa Besuki, segala lapisan masyarakat digerakan untuk turut serta menggerakkan masyarakat lainnya dari Kepala Dusun (Kadus), kader-kader pemberdayaan, dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Besuki. Permasalahan aturan-aturan yang berlaku selalu diikuti dan sesuai dengan prosedur yang diberikan dari desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Meninjau bahwa kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial dicerminkan antara lain dalam bentuk kesediaan masyarakat untuk menjadi relawan sosial atau tenaga kerja sosial masyarakat.

“Di sini ada karang taruna tau sendiri dalam kegiatan tetap berjalan untuk olahraga atau kegiatan lain tetap berjalan bahkan untuk kegiatan terutama dari dinas sosial kami ditunjuk untuk dibentuk menjadi Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Wonosobo, baru 2 (Dua) desa yang ditunjuk dan itu tetap berjalan untuk kegiatan kebencanaan baik itu diwilayah sendiri atau yang lain, nanti perintah dari saya akan jalan. Contoh: di Tirip ada bencana kebakaran semua bergerak untuk membantu bencana tersebut, kemarin juga ada tanah longsor di wilayah desa, dari tim KSB tetap siap untuk mengerjakannya. Kampung siaga itu mengenai kebencanaan, jadi kalau di kabupaten ada BPBD, kalau di desa KSB di Wonosobo ada 2 (Dua) di Besuki dan Kecamatan Kejajar yang baru ada. Yang jelas di Besuki adalah desa rawan bencana, di mana tahun 2017 ada bencana tanah longsor dan banjir di Dusun Sipait jadi dari pemerintah terutama dari dinas sosial pusat memilih Desa Besuki yang rawan bencana” (Triyono, 47 tahun, Kepala Desa Besuki, wawancara 13 April 2021).

Triyono juga menambahkan partisiapsi sosial masyarakat di Desa Besuki tidak terbatas dengan program-program bantuan sosial yang dikembangkan untuk wilayah sendiri, ditunjuknya Desa Besuki sebagai wilayah yang representatif dari Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Wonosobo ingin mewujudkan

partisipasi sosial secara menyeluruh dan komprehensif kepada masyarakat. Dipilihnya Desa Besuki sebagai KSB meninjau bahwa wilayah Desa Besuki merupakan wilayah rawan bencana, setelah itu Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Wonosobo menunjuk 2 (Dua) wilayah di kabupaten yaitu Kecamatan Kejajar dan Kecamatan Wadaslintang (Dimana KSB terletak di Desa Besuki).

B. Pelaksanaan peran masyarakat dalam kesejahteraan sosial

Tujuan kesejahteraan sosial guna mendorong masyarakat untuk mencapai suatu kondisi yang sejahtera dalam kehidupannya. Tujuan ini berkaitan dengan perubahan yang sudah atau akan dicapai oleh masing-masing individu dalam masyarakat meliputi perubahan fisik, perubahan mental, perubahan ekonomi, perubahan sosial dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Fahrudin menyatakan bahwa tujuan kesejahteraan sosial yaitu, *Pertama* untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan di masyarakat. Dan *Kedua* untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber terpercaya, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Fahrudin, 2012)

Perilaku nyata (Peran) oleh masyarakat dari sebuah perkumpulan masyarakat dalam corak kebudayaan atau identitas yang berbeda posisi, dalam ranah sosial, pengkhususan dalam ranah pembagian kerja, komunikasi, perilaku, motivasi yang mengikuti, pemberian sanksi, konformitas atau pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan norma sosial dan independensi antara pelaku sosial lainnya dalam sebuah kancah sosial atau masyarakat. Semua ini menjadi ranah utama dalam Teori Peran menurut Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas

Peran pada pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Besuki, ditujukan pada keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial secara sukarela dan atas kemauannya sendiri. TKS memiliki 4 (Empat) alur bentuk peran masyarakat yaitu peran dalam perencanaan, peran dalam pelaksanaan, peran dalam menerima hasil, dan peran dalam memantau hasil-hasil kegiatan dalam pembangunan kesejahteraan sosial yaitu:

1. Peran pada perencanaan program

Proses peran masyarakat Desa Besuki dalam perencanaan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan program kesejahteraan sosial. Peran masyarakat menjadi hal penting pada kesejahteraan sosial di Desa Besuki dalam proses perencanaan program dalam rangka menjangkau, mendengarkan, dan mendapatkan aspirasi masyarakat, sehingga akan tercipta rasa memiliki yang akan tertuang dalam bentuk-bentuk forum, yang dimaksudkan seperti Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), dan forum-forum sepadan lainnya. Hadirnya masyarakat dalam pertemuan tersebut untuk memberikan peran dalam bentuk dukungan dan masukan dalam proses perencanaan program kesejahteraan sosial, sehingga menghasilkan identifikasi sebuah permasalahan untuk diselesaikan. Kepala desa, sekretaris desa, Kaur Kesos desa, TKSK, hadir sebagai tokoh masyarakat dan berpartisipasi dalam memberikan masukan-masukan yang membangun, sehingga dengan masukan yang diterima akan berdampak pada hasil perencanaan yang matang.

Proses perencanaan dalam partisipasi masyarakat Desa Besuki, masyarakat desa dilibatkan setiap ada penentuan program-program yang akan dilaksanakan. Sebelumnya memang desa sudah melakukan analisis dan observasi dari kebutuhan terlebih dahulu yang akhirnya akan menjadi pedoman untuk merencanakan program. Implementasi bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran, diskusi, sumbangan pikiran, tanggapan berupa menerima atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Peran masyarakat lainnya dalam perencanaan meliputi pengambilan keputusan, menentukan masalah, menentukan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pembangunan kesejahteraan sosial desa diperlukan keterlibatan masyarakat untuk menentukan cara-cara untuk pencapaiannya.

Biddle dan Thomas menjelaskan mengenai peran masyarakat dalam perencanaan dalam bentuk aksi, perilaku masyarakat yang dibedakan atas pernah dan tidaknya aksi tersebut dipelajari pada waktu sebelumnya oleh setiap individu, pandangan arah dari aksi jelas tertuju pada sebuah tujuan serta penampakan dari aspek kehendak yang diinginkan. Berkaitan dengan peran masyarakat dalam perencanaan, seseorang dalam masyarakat melakukan aksi dalam menunjuk suatu

yang terlihat dengan mata dan kepala aksi ini akan condong kepada penampilan atau unjuk peran. Unjuk peran masyarakat dalam bentuk keikutsertaan dalam forum perencanaan desa. Selanjutnya adalah patokan, peran dalam prespektif disini adalah sebagai patokan, artinya menunjuk pada perilaku yang mengandung sebuah keharusan untuk dibawa oleh seseorang dalam masyarakat. Masyarakat akan berpatokan untuk berperan dari yang sudah ada dan sejajar di dalam masyarakat. Masyarakat dalam proses mempraktikkan patokan sering kali akan dijumpai secara tidak terlihat dan terlihat, untuk yang terlihat disebut dengan norma. Norma di masyarakat dengan masyarakat lainnya memiliki perbedaan jadi tidak bisa disama ratakan satu sama lainnya. Sedangkan yang terlihat disebut dengan tuntunan, masyarakat akan melakukan tuntunan dari tidak lanjut yang sebelumnya sudah membudaya di wilayah masyarakat tersebut (Suhardono, 2018).

Pendekatan yang dimulai dengan keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku utama (*Stakeholders*) dalam proses perencanaan kesejahteraan sosial secara partisipatif, dikarenakan masyarakat diyakini paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola pikir, sistem nilai, perilaku, dan adat istiadat serta kebiasaan di wilayah lingkungannya (Wulansari, 2018). Kegiatan-kegiatan perencanaan yang menghadirkan masyarakat telah dikonfirmasi tidak mengalami kendala ketika Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial (Kaur Kesos) Desa Besuki mengajak dan koordinasi dengan masyarakat di wilayah dusun. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pujiyatno selaku Kaur Kesos Besuki sebagai berikut:

“Kalau masalah sosial berupa perencanaan sosial di sini berjalan, masyarakat dari segi tenaga maupun pikirannya mau diajak untuk berdiskusi. Tidak susah juga untuk diajak, karena giat semua masyarakatnya. Karakter masyarakatnya umumnya semangat kerja dari segala sesuatu apapun giat semua juga” (Pujiyatno, 57 tahun, Kaur Kesos Desa Besuki, wawancara 12 April 2021).

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas, Pujiyatno selaku Kaur Kesos Desa Besuki mengkonfirmasi masyarakatnya yang giat dan semangat dalam aspek kegiatan berupa tukar pikiran dari pertemuan-pertemuan desa berupa Musdus dan Musdes yang dilakukan untuk merencanakan program-program desa dari skala pendek, skala menengah, dan skala panjang. Kaur Kesos menjelaskan

bahwa permasalahan sosial di Desa Besuki cenderung kepada masalah ekonomi pada keluarga, terlebih masa pandemi Covid-19 dari tahun 2020 menjadikan masyarakatnya di rumahkan dan tidak bekerja. Dengan adanya forum-forum di desa mengupayakan untuk didahulukan bantuan-bantuan yang akan disalurkan.

Pujiyatno juga menambahkan bahwa dalam sebuah perkumpulan masyarakat sering adanya perbedaan yang mengakibatkan sebuah konflik pada penyampaian gagasan dari masyarakat yang berpendapat dalam forum. Forum di desa baik itu Musdus, Musdes, dan forum sejenisnya memang sering memunculkan konflik, misalnya ada masyarakat di wilayah dusun A mendapatkan bantuan, sedangkan masyarakat di wilayah dusun B tidak mendapatkan. Hal ini membuat Pujiyatno menengaskan bahwa proses bantuan yang ada di Desa Besuki sudah melewati forum-forum yang ada di desa, kriteria penerima sudah jelas dan bukan hanya dirinya yang memilih melainkan masyarakat dalam forum juga memiliki suara untuk memberikan gagasannya.

Sejalan dengan hal tersebut Prasodjo dan Tonny, 2003 dalam Suharto, 2005 memaparkan mengenai konflik, dapat diartikan sebagai benturan atau perseteruan yang terjadi antara dua pihak atau lebih sebagai akibat adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan keterbatasan sumberdaya. Konflik cenderung diartikan sebagai hal yang negatif sebagai lawan kata dari kerjasama, harmoni dan perdamaian dan konflik sering pula diidentikan dengan kekerasan atau peperangan yang berdarah-darah. Padahal konflik merupakan keniscayaan dalam masyarakat sejalan dengan proses pemenuhan kebutuhan komunitas dan perubahan sosial. Konflik selalu terjadi dalam setiap komunitas karena perbedaan nilai, status, kekuasaan dan keterbatasan sumberdaya senantiasa dijumpai dalam masyarakat, terlebih dalam masyarakat multikultural atau memiliki keberagaman budaya.

Biddle dan Thomas menjelaskan konflik dalam peran masyarakat akan menjadikan sebuah penilaian (*Education*), suatu perilaku yang ada akan dipisahkan menjadi (*Evaluative*), jika hal tersebut pertama-tama dikoneksikan dengan persoalan setuju atau tidak setuju yang terungkap pada imbalan, hukuman, atau sanksi. Jika disandingkan dengan masyarakat penilaian adalah sebuah

pilihan. Masyarakat berperilaku tidak terlihat dan menyertakan nilai di dalamnya akan dinamakan nilai, sedangkan masyarakat yang berperilaku terlihat dinamakan dengan taksiran. Hadirnya sanksi ketika dalam forum sesuai dengan kesepakatan perilaku dalam sanksi yang ada di masyarakat akan dipertimbangkan sebagai sanksi, jika perilaku tersebut bersifat niat untuk menimbulkan perubahan pada perilaku lainnya. Beberapa sanksi di masyarakat akan berupa hukuman, rangsangan, dan motivasi. Jika dalam menggunakan sanksi di masyarakat secara tertutup akan disebut dengan sanksi tidak terlihat sedangkan jika sanksi dilakukan oleh masyarakat secara terbuka akan disebut dengan sanksi yang terlihat kedua sanksi ini akan dimaknai sebagai sanksi positif dan sanksi negatif tergantung apakah hal tersebut akan ditujukan pada perilaku yang diharapkan atau tidak diharapkan oleh masyarakat (Suhardono, 2018).

2. Peran pada pelaksanaan program

Setelah masyarakat terlibat dalam perencanaan maka masyarakat juga harus berpartisipasi dalam melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkan bersama, artinya tidak hanya berhenti pada perencanaan yang sudah dirumuskan saja, melainkan dilanjutkan dalam progres pelaksanaan yang dilakukan secara bersama dengan masyarakat lainnya. Pelaksanaan program kesejahteraan Desa Besuki dapat diselaraskan dan dikembangkan dengan program yang distimulasi dari pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten. Jika posisi dari pemerintah menduduki stimulator pembangunan kesejahteraan sosial, maka masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat sendiri. Hal ini akan memunculkan koodinasi dari pelaksanaan program antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berdampak positif bagi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan di desa (Wulansari, 2018)

Program-program pelaksanaan yang dilakukan masyarakat Desa Besuki, tidak selamanya mendapatkan kemudahan ketika sudah diajukan kepada kepala desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pujiyatno selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial (Kaur Kesos) Desa Besuki, sebagai berikut:

“Kalau biasanya masyarakat yang tanya-tanya soal pelaksanaan program di wilayah mereka, terus saya lanjut tanya kepada atasan saya di desa. “Ini masyarakat saya kapan dan gimana”. Kadang dijawab karena belum acc dari atas mengenai program yang akan dilaksanakan, jadi saya jelaskan kembali ke masyarakat apa adanya” (Pujiyatno, 57 tahun, Kaur Kesos Desa Besuki, wawancara 12 April 2021).

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas, Pujiyatno selaku Kaur Kesos Desa Besuki menjelaskan dalam proses pengajuan program kesejahteraan sosial yang diajukan dari masyarakat kepada kepala desa tidak semuanya mendapatkan persetujuan. Ketika masyarakat desa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pujiyatno hanya bisa menjelaskan bahwa program belum disetujui.

Pelaksanaan program akan meninjau segala aspek berupa, *Pertama* tujuan yang dirumuskan oleh masyarakat cukup jelas. *Kedua* penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. *Ketiga* suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai program seefektif mungkin. *Keempat* pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut. *Kelima* adanya hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program pembangunan tidak berdiri sendiri. *Keenam* berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut (Tjokroamidjojo, 1974 dalam Ulumiyah, dkk: 894)

Biddle dan Thomas menjelaskan bahwa dalam sebuah pelaksanaan program akan dijumpai beberapa istilah yang diperuntukan bagi pelaku dalam teori peran. Baik itu berupa ego, *self*, *altern*, *other*, *refrence*, *group*, dan *actor*. *Pertama* adanya seseorang yang akan disebut dengan lakon. *Kedua* adalah sasaran atau target, pelaku, penampil, dan sasaran dari ini semua disebut dengan subjek yaitu masyarakat. Masyarakat akan sepenuhnya menjadi seseorang yang berperilaku, karena masyarakat adalah aktor penting dalam pengaplikasian teori peran oleh Biddle dan Thomas. *Ketiga* jumlah pelaku, ada beberapa istilah untuk melihat jumlah pelaku atau subyek, seperti individu untuk pelaku tunggal, kumpulan untuk jumlah yang lebih dari satu orang, dan saban orang untuk semua orang. Masyarakat akan ada dalam lingkupnya masing-masing baik secara

individualis ataupun sosialis, tergantung bagaimana pemaknaan dalam situasi yang terjadi dalam masyarakat. *Keempat* pelaku tertentu, konsep dari pelaku tertentu adalah bentuk pengkhususan seseorang dalam teori ini, terdapat 3 (tiga) bentuk pengkhususan yang dimaksud, ditentukan berdasarkan perilakunya dan tekoneksi satu sama lain, berdasarkan rancanangan posisinya, dan berdasarkan *self* dan *other*-nya misalnya orang pertama, orang kedua, orang ketiga dan seterusnya dalam masyarakat (Suhardono, 2018).

Di sisi lainnya Desa Besuki merupakan desa dengan mayoritas masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, swasta, dan peternak (LKKP, 2020). Pekerjaan masyarakat serta-merta bisa mempengaruhi dalam pelaksanaan sebuah program-program kesejahteraan sosial di desa. Dengan tinjauan hal tersebut Desa Besuki juga aktif memberikan kegiatan pemenuhan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di balai desa. Sebagaimana wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Besuki Sudibyo yang terdapat dalam kutipan di bawah ini:

“Ada dari Desa Besuki dalam segi pemenuhan kapasitas, kami memberikan pelatihan kepada masyarakat dari usaha-usaha kecil untuk kesejahteraan sosial mereka. Kalau di sinikan banyak pengrajin gula jadi kami berikan pelatihan tentang inovasi dari produk yang dipasarkan oleh masyarakat” (Sudibyo, 32 tahun, Sekdes Besuki, wawancara 12 April 2021).

Pemenuhan kapasitas dan peningkatan dari sisi SDM di Desa Besuki bermanfaat untuk membuat masyarakat bisa berdaya dan bersaing dengan kompetitor yang memiliki produk-produk sama. Dengan hal tersebut Sudibyo dan perangkat desa lainnya dalam pelaksanaan sebagai koordinator yang mengkoordinir masyarakat. Masyarakat akan mulai tergerak dari kebiasaan yang sebelumnya hanya pasif dalam pembuatan gula jawa tanpa adanya membuat inovasi dan keunikan dari sebuah produk. Pemenuhan dalam individu saat berperilaku secara umum dapat diperlakukan secara operasional atas perilaku yang dilakukan dan harus memenuhi syarat bahwa bisa untuk diskalakan atau melalui pengukuran yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, *Pertama* berkenaan pada alternatif hadir-tidaknya perilaku (pandangan para perilaku yang hidup pada pikiran berupa maksud yang memadai dari masing-masing individu).

Kedua berkenaan pada skala yang berisi sejumlah kelompok dari perilaku seperti berjalan dan berlari. *Ketiga* skala yang dibentuk berdasarkan penggolongan dan masa antara dua kejadian yang bertalian oleh seseorang dari alternatif perilaku setiap individu. Akan berjalan dengan baik dari pelaksanaan program jika masyarakat juga memiliki satu visi dan misi dari desa (Suhardono, 2018)

3. Peran pada menerima hasil program

Peran dalam menerima hasil, masyarakat juga berpartisipasi dalam menerima hasil, menikmati keuntungan secara langsung dari berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan. Hasilnya akan sesuai atau tidaknya dengan yang telah dilakukan oleh masyarakat dari proses awal perencanaan dan pelaksanaan, ketika hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat hal ini bisa menjadi acuan pedoman untuk lebih baik dalam progres program pembangunan kesejahteraan sosial.

Kegiatan pelaksanaan kesejahteraan sosial di Desa Besuki dari pembangunan yang telah dilakukan diharapkan pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat, serta masyarakat di wilayah lingkungan Desa Besuki dapat menikmati hasil pembangunan kesejahteraan sosial tersebut. Sebagaimana pendapat para ahli menurut Westra dalam Isbandi, 2000:16 (Dalam Andreeyan, 2014) antara lain, *Pertama* lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar (Bisa memutuskan masyarakat yang memang membutuhkan bantuan). *Kedua* mampu dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari masyarakat. *Ketiga* mampu mengembalikan nilai-nilai martabat manusia (*Human dignity*), dorongan berupa motivasi serta membangun kepentingan untuk bersama. *Keempat* lebih mendorong orang untuk lebih bertanggung jawab atas tindakannya. *Kelima* memperbaiki semangat bekerja sama serta menimbulkan kesatuan kerja. Dan *Keenam* mendorong masyarakat agar lebih memungkinkan mengikuti perubahan-perubahan (Andreeyan, 2014).

Biddle dan Thomas menjelaskan mengenai perilaku objek dari masyarakat dapat kembali melibatkan yang dituju secara sedang menjadi pembicaraan masyarakat lainnya, maupun sasaran yang dimaksudkan. Ciri-ciri posisi masyarakat dalam mengategorikan dari seseorang dibedakan atas tanda dari

kelengkapan secara umum, perilaku masyarakat atas reaksi umum dari seseorang terhadapnya. Pembahasan mendalam pada ciri-ciri posisi adalah persoalan simbol dari bukti seseorang dan kondisi dari keanggotaannya di masyarakat (Suhardono, 2018)

Setiap anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi untuk menikmati usaha bersama yang ada, demikian itu dengan penyelenggaraan oleh rakyat atau masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah harus pula dapat menikmati hasilnya secara menyeluruh dan adil. Sebagaimana hasil wawancara dengan Triyono Kepala Desa Besuki sebagai berikut:

“Karena sebelumnya ada yang belum menggunakan listrik, dimana kemarin saja ada yang belum menggunakan listrik kami ajukan untuk dana mereka menggunakan listrik begitu juga rumah-rumah dari masyarakat yang kurang mampu kami adakan renovasi agar layak bekerja sama dengan pemerintah kabupaten” (Triyono, 47 tahun, Kepala Desa Besuki, wawancara 13 April 2021).

Berdasarkan wawancara di atas, perencanaan, pelaksanaan program akan membuahkan hasil kepada masyarakat. Kerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk mencapai sebuah tujuan bersama karena rakyat atau masyarakat dan pemerintah harus ada dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial. Desa Besuki dan masyarakat juga berkolaborasi aksi untuk melakukan pengadaan listrik bahkan sampai dengan pembangunan rumah layak bagi masyarakat kurang mampu dan mengalami kesulitan dalam ekonomi.

Gambar 2. Renovasi Rumah Masyarakat Tidak Mampu Desa Besuki



Sumber: Koleksi Desa Besuki

Seperti sudah dijelaskan oleh Biddle dan Thomas mengenai konsep tentang hubungan dalam masyarakat, konsep tentang hubungan mencakup tingkat kesamaan antara konsep yang telah dipilahkan antara dua atau lebih. *Pertama* imbalan berdasarkan kesamaan, pilahan berdasarkan perilaku dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan bandingan kesamaan. Diasumsikan bahwa seseorang masyarakat yang memilih suatu norma sosial dapat memilih perilaku yang sama dengan patokan perilaku tersebut. *Kedua* bandingan berdasarkan penentuan, persoalan penentuan ini sekurang-kurangnya menggambarkan sebuah kondisi antara dua masyarakat baik yang menjadi aktor atau sasaran, juga terlibat dalam suatu perilaku bersifat saling menentukan atau saling menjadi sebab bagi yang lain. Kedekatannya dekat dengan pengertian saling tergantung dan dikaitkan dengan yang lainnya akan membentuk yang namanya permohonan dan kerja sama, akan memperlihatkan pelancaran dan penyandatan pada masing-masing masyarakat dan memperlihatkan pada imbalan dan kerugian pada masing-masing penunjuk. *Ketiga* bandingan tentang gabungan antara kesamaan dan penentuan, ada beberapa bagian yang ada pada imbalan gabungan antara lain mengenai konfirmasi di dalam masyarakat baik itu adalah penyesuaian, dan ketepatan (Suhardono, 2018)

4. Peran pada monitoring program

Peran masyarakat dalam memantau hasil kegiatan, masyarakat akan berpartisipasi dalam memantau hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan. Sampai sejauhmana atau dapat diukur program tersebut telah memenuhi kebutuhan dan apakah tujuan yang diinginkan telah dapat dicapai. Kondisi ini juga akan berbarengan dengan evaluasi dan monitoring secara terus-menerus yang akan melibatkan masyarakat program kesejahteraan sosial yang sudah terlaksana dengan masyarakat lainnya pada wilayah desa tersebut.

Sebelumnya Biddle dan Thomas memaparkan mengenai konsep posisi dan peran. *Pertama* posisi, ada berbagai deretan dari kata yang selalu disandingkan dengan posisi yaitu mengenai umur, jenis kelamin, atau bahkan warna kulit. Hal ini menjadi dasar dalam membuat perbedaan anatara anggota masyarakat dalam mengkatagorikan sebuah posisi. Dengan demikian posisi adalah suatu kategori

yang kolektif tentang seseorang yang menjadi dasar bagi orang lain dalam memberikan sebuah sebutan, perilaku, atau reaksi yang umum kepadanya dalam masyarakat. *Kedua* peran, peran adalah konsep-konsep dalam penentuan perilaku. Namun demikian, peran merupakan seperangkat patokan membatasi perilaku atas seseorang masyarakat yang mesti dilakukan dan menduduki sebuah posisi yang ada dalam ranah masyarakat (Suhardono, 2018)

Peran atau partisipasi masyarakat dalam memantau hasil-hasil atau evaluasi program dari kesejahteraan sosial merupakan aktivitas yang melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan dari desa untuk mendapatkan informasi dalam mengembangkan kegiatan atau program yang sedang berajalan atau sudah berajalan. Termasuk di dalamnya dampak yang muncul baik positif ataupun negatif. Keberhasilan program kesejahteraan sosial di Desa Besuki dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, serta adanya keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program dengan pemanfaatan hasil. Melalui kegiatan bersama dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus oleh Desa Besuki maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui (Hermawan, dkk: 2016).

Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektifitas program dapat diukur dari beberapa hal yaitu, *Pertama* ketepatan penentuan waktu yang digunakan secara tepat mampu mempengaruhi tingkat efektifitas suatu program dari kegiatan dalam mencapai sebuah tujuan. *Kedua* ketepatan dalam menghitung biaya, dalam operasional menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal anggaran sampai program atau kegiatan dapat selesai untuk dilaksanakan. *Ketiga* ketepatan dalam pengukuran berarti bahwa menjalankan suatu program atau kegiatan harus menerapkan standarisasi program, ketepatan yang digunakan dalam pelaksanaan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivan. *Keempat* ketepatan dalam menentukan pilihan, berupa kegiatan yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan. Karena dalam menentukan pilihan membutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai program yang efektif.

Kelima ketepatan dalam berfikir menurunkan efektifitas dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan bersama. *Keenam* ketepatan dalam perintah, merupakan kegiatan organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah untuk dipahami dan apabila sebuah perintah tidak bisa dipahami maka pelaksanaan dari program tersebut akan mengalami kegagalan dan tidak efektif. *Ketujuh* ketepatan dalam menentukan tujuan, tujuan yang ditetapkan secara tepat akan memberikan dorongan yang positif dari pelaksanaan program atau kegiatan. *Kedelapan* ketepatan dalam sasaran, dapat menentukan keberhasilan kegiatan dalam mencapai tujuan (Maun: 5)

Efektivitas program kegiatan bersama masyarakat dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang tercapai, maka hal tersebut bisa dikatakan efektif, namun apabila usaha atau hasil program kegiatan bersama masyarakat dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan maka hal itu dikatakan tidak efektif. Dalam pembangunan infrastruktur berupa akses jalan di Desa Besuki memang perlu adanya peningkatan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Triyono Kepala Desa Besuki sebagai berikut:

“Untuk infrastruktur kalau dari kami masih kurang atau tertinggal terutama Desa Besuki, karena desa kami luas dan Desa Besuki belum mencukupi dananya untuk pembuatan jalan. Jalan-jalan utama terutama untuk usaha tani, untuk jalan usaha tani kami mencoba untuk memberikan terobosan. Untuk wilayah selatan Sipait saja jalannya untuk mobil kecil saja belum bisa masuk kesana, belum pada wilayah lainnya di 4 (Empat) dusun Desa Besuki” (Triyono, 47 tahun, Kepala Desa Besuki, wawancara 13 April 2021).

Berdasarkan wawancara di atas dalam proses kegiatan pembangunan infrastruktur jalan memang diperlukan untuk akses lalu lintas bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat yang bekerja sebagai petani. Akses jalan yang kurang membuat kendaraan roda 4 (Empat) mobil belum bisa masuk akses wilayah, hal ini membuat para petani dibuat kesulitan untuk mendistribusikan hasil pertanian. Kegiatan dari pembangunan infrastruktur jalan sudah dilakukan, tapi memang belum maksimal. Desa bersama masyarakat mengupayakan hal tersebut tetap

dilakukan baik secara pengumpulan uang dari masyarakat ataupun pengajuan dana kepada pemerintah kabupaten

Gambar 3. Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Besuki



Sumber: Dokumen Pribadi

Melalui kegiatan pembangunan infrastruktur jalan Desa Besuki, Triyono dan perangkat desa lainnya sedikit demi sedikit mengajak masyarakat desa untuk aktif dan mengikuti kegiatan pembangunan desa. Dengan hal ini nantinya masyarakat bisa memantau hasil-hasil dari kegiatan atau partisipasi masyarakat yang dilaksanakan. Seperti yang dimaksudkan Biddle dan Thomas konsep untuk pelaku beserta perilakunya, konsep dari pelaku dan perilakunya dapat dijadikan menjadi 1 (satu) konsep yang menunjuk pada pelaku dan perilakunya. Contoh dalam konsep pelaku dan perilakunya terdapat dalam konsep norma kelompok. Dijelaskan bahwa norma adalah satu konsep untuk memisahkan perilaku, sedangkan untuk kelompok adalah suatu konsep untuk memisahkan pelaku atau person. Biddle dan Thomas menggetengahkan antara konsep antara pelaku dengan perilakunya (Suhardono, 2018)

C. Program bantuan lesejahteraan sosial di Desa Besuki

Menurut David Cox 2004 dalam Suharto 2005 menjelaskan dan membagi kemiskinan ke dalam beberapa ukuran, *Pertama* kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, hal ini akan menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.

Kedua kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Akan terbagi atas kemiskinan akibat rendahnya pembangunan, yaitu kemiskinan pedesaan (Kemiskinan akibat terpinggirnnya pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan pada wilayah perkotaan). *Ketiga* kemiskinan sosial, kemiskinan ini akan dialami oleh perempuan anak-anak, dan kelompok minoritas. *Keempat* kemiskinan konsekuensial, kemiskinan terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar dari kategori miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk (Suharto, 2005)

Identifikasi atau penentu dalam penetapan seseorang untuk menerima bantuan kesejahteraan sosial, dapat dikenali melalui nama, pakaian, cara berbicara, dan lokasi fisik dari tempat tinggal. Melalui tujuan identifikasi akan mampu membedakan sebuah pengenalan secara bersama dari posisi di mana simbol-simbol tersebut merupakan perwujudan nyata dari hal yang disimbolkan (Suhardono, 2018). Biddle dan Thomas menjelaskan bahwa mengidentifikasi masyarakat untuk mendapatkan program-program bantuan akan sesuai dengan keadaan masyarakat tersebut baik masyarakat tersebut dikenali dengan nama, pakaian, sampai dengan tempat tinggal. Jadi akan sesuai atau tidaknya dari ketetapan kriteria penerima bantuan, yang diselaraskan dengan catatan atau panduan dari program bantuan yang sudah ada.

Di sisi lainnya pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin dapat difokuskan pada beberapa indikator kunci mencakup kemampuan keluarga miskin memperoleh pekerjaan, memenuhi kebutuhan dasar, mengelola asset kepemilikan, menjangkau sumber-sumber, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, serta kemampuan dalam menghadapi permasalahan tekanan. Indikator kunci lainnya untuk mengukur jaringan sosial seperti dapat mencakup kemampuan lembaga-lembaga sosial untuk memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan secara finansial, menjalankan peran atau fungsi utamanya, mengelola asset yang dimiliki, menjangkau sumber, berpartisipasi dalam program anti-kemiskinan seperti program perlindungan sosial, Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dan menghadapi tekanan, tentang bagaimana jaringan sosial yang ada dalam menghadapi krisis ekonomi atau bencana alam yang terjadi (Suharto, 2005)

Pemerintah Desa Besuki sebelum membuat program-program kesejahteraan sosial dan program untuk desa lainya, akan diawali dengan MUSDUS di tingkat dusun dan Musdus di tingkat desa. Bertujuan untuk membahas usulan-usulan kegiatan atau program dari masyarakat dari tingkat RT atau RW dalam setiap dusun, kemudian dilanjutkan di tingkat yang lebih tinggi yaitu Musdes yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti RT atau RW tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pemerintah desa.

Program bantuan yang tersedia di Desa Besuki dan ditangani oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memiliki beberapa macam seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penjelasannya sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementrian Sosial (KEMENSOS) Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masyarakat calon penerima BST akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000,00/KPM setiap bulannya selama 3 (Tiga) bulan, informasi terbaru dari observasi bantuan BST di Desa Besuki, masyarakat akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp.300.000,00/KPM.

Syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mendapatkan BST sebagai berikut, *Pertama* calon penerima BST adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT atau RW dan berada di desa. *Kedua* calon penerima BST tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BST) Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, paket sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu prakerja. *Ketiga* jika calon penerima BST tidak mendapatkan Bansos dari program lainnya, tetapi belum terdaftar pada RT atau RW segera untuk menginformasikannya. *Keempat* calon penerima BST yang memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tetap bisa untuk mendapatkan BST tanpa harus membuat KTP. Dengan catatan calon penerima harus berdomisili di desa tersebut

dan menulis alamat dengan lengkap. *Kelima* calon penerima BST sudah terdaftar dan valid maka BST akan diberikan melalui tunai. Dan untuk pencairan dana akan dibantu oleh pihak kantor pos kecamatan (Panduan BST).

Gambar 4. Pembagian BST Desa Besuki Di Kantor POS Wadaslintang



Sumber: Dokumen Pribadi

Melalui kegiatan penyaluran BST Desa Besuki terletak di kantor POS Wadaslintang, pandemi Covid-19 membuat peyaluran BST sesuai dengan protokol kesehatan yang berlangsung. Ketaatan masyarakat menggunakan masker secara langsung bisa mengurangi penyebaran virus, di sisi lain menjaga jarak dalam penyaluran BST belum bisa diterapkan secara benar untuk menjaga jarak minimal 1 (Satu) M (Meter) dengan orang lainnya. Karena terbatasnya ruangan dari tempat yang disediakan oleh kantor POS Wadaslintang. Dalam penyaluran BST petugas POS Wadaslintang dibantu oleh Kasi Kesos Kecamatan Wadaslintang, Polsek Wadaslintang, petugas Puskesmas 1 (Satu) Wadaslintang, TKSK, dan perangkat desa yang mendampingi proses penyaluran BST.

Penyaluran BST memerlukan berkas-berkas yang dibawa oleh KPM seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat pernyataan penerima BST dari pemerintah. Berkas ini wajib untuk dibawa KPM untuk bukti verifikasi langsung sesuai dengan nama penerima BST. TKSK akan berperan sebagai pendamping untuk fasilitasi dalam program BST, fasilitasi merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. Individu yang melakukan kegiatannya disebut dengan fasilitator, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi fasilitasi dan atau

pendampingan sosial (Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 35 tahun 2020)

Biddle dan Thomas menjelaskan mengenai kondisi-kondisi perilaku objek yaitu masyarakat, pernyataan tentang perilaku tentu melibatkan keadaan yang ada demi pelaksanaan perilaku yang diinginkan atau akan diperbuat. Keadaan perilaku objek menyertakan beberapa pelaku (Masyarakat) dan selalu demikian dengan yang lainnya seperti waktu, tempat, dan cara. Hal ini akan bertambah kepada bagaimana perilaku itu akan dibawakan oleh setiap seorang individu di masyarakat (Suhardono, 2018). Masyarakat berperan aktif dalam memantau hasil dari program kesejahteraan di Desa Besuki. Sebagaimana hasil wawancara dengan Yanti KPM BST Desa Besuki sebagai berikut:

“Saya kurang tau detailnya gimana, setau saya ada sendiri petugas-petugasnya yang data-data yang tidak mampu siapa yang butuh bantuan itu ada. Tapi kalau saya kurang tau orang saya sama suami saya enggak ikut. Orang suami saya bukan siapa-siapa, kalau yang seperti itu para perangkat. Sejujurnya belum pas untuk penyalurannya, masih banyak yang seharusnya tidak dapat malah justru dapat ibaratnya karena orang mampu. Sebenarnya kalau di sini lumayan banyak, orangnya itu mampu malah dapat bantuan menurut saya karena belum pas. Sekali lagi kalau saya tidak punya wewenang ibaratnya saya tinggal menerima, kalau yang mengawasi sudah ada petugasnya pejabat seperti lurah. Tapi yang jelas masyarakat bisa menilai dan melihat siapa saja yang pantas untuk mendapatkan atau tidaknya seperti itu” (Yanti, 35 tahun, KPM BST Desa Besuki, wawancara 13 Juni 2021).

Pernyataan Yanti KPM BST menjelaskan mengenai peran masyarakat di Desa Besuki dalam program BST, desa memiliki petugas-petugas untuk mendata masyarakat yang akan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Yanti tidak mengetahui dan tidak berpartisipasi dalam program BST karena tidak menjabat sebagai petugas desa. Posisinya sebagai masyarakat biasa cukup hanya menerima bantuan, tapi dalam prosesnya Yanti ikut serta dalam memantau dan menilai masyarakat yang layak dan tidaknya dalam bantuan BST. Lumayan banyak di Desa Besuki yang mendapatkan bantuan padahal orang-orangnya mampu menjadikan tidak pas ketika menerima. Yanti juga menambahkan bahwa dirinya layak untuk menerima BST karena suami yang bekerja sebagai buruh tani dan pas untuk mendapatkan, yang tidak pas

menurutnya adalah ketika masyarakat sudah mapan kerja di luar kota tapi masih mendapatkan bantuan. Selanjut dengan Yanti yang mendapatkan BST Tinah menjelaskan mengenai keadaan dalam proses peran atau partisipasinya di masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan KPM BST Desa Besuki sebagai berikut:

“Saya tau kalau misalnya ada bantuan itu, untuk terlibatnya dari saya sendiri saya tidak tau. Soalnya yang melakukannya perangkat desa. Tapi, kadang kalau ada pertemuan di bu RT membahas tentang bantuan, bu RT ingin tau mengenai permasalahan bantuan. Bu RTnya sangat mengayomi sekali kalau misalnya ada apa-apa kami dikumpulkan bareng-bareng terus membahas bareng-bareng yang cocok yang mana nanti akan dilaksanakan. Ada tambahan juga mas, kalau misalnya ada yang mau mengadu mengenai permasalahan bantuan juga bisa ke TKSK.” (Tinah, 36 tahun, KPM BST Desa Besuki, wawancara 13 Juni 2021).

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam kesejahteraan sosial juga disebutkan oleh Diana Conyers dalam Firmanyah (2007), bahwa masyarakat akan lebih mempercayai sebuah proyek atau program pembangunan kesejahteraan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut (Wulansari, 2015). Praktik yang dilakukan oleh Tinah dalam peran atau partisipasi mengenai program kesejahteraan adalah memberikan informasi dan aspirasi dari suara-suara masyarakat mengenai bantuan, kepada perangkat desa berupa RT memberikan ruang yang aman dan nyaman kepada masyarakat sebagai penampung aspirasi yang selanjutnya akan disampaikan kepada pihak yang berwenang dalam menangani permasalahan yang muncul.

Bentuk fasilitasi dilakukan oleh TKSK sangat berperan untuk bisa menggiring masyarakat untuk menggunakan bantuan sebagai dana untuk menghidupi keluarga atau digunakan untuk modal dalam usaha kecil mengengah lainnya untuk mengurangi tidak bermanfaatnya bantuan. Fasilitasinya yang dimaksudkan dalam bentuk, pendampingan sosial, bimbingan sosial kemitraan dan atau memberikan rujukan bentuk fasilitasi dilaksanakan untuk meningkatkan keberfungsian sosial (Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 35 tahun 2020).

Pemanfaatan BST memang menjadi permasalahan yang baru dan akan muncul dalam KPM penerima bantuan, di sisi lain bisa digunakan untuk yang bermanfaat atau justru hanya digunakan kebutuhan yang tidak penting. Sebagaimana hasil wawancara dengan Yanti KPM BST Desa Besuki sebagai berikut:

“....Ya Alhamdulillah sangat bermanfaat, karena saya harus membeli beras untuk keluarga. Dulu kalau tidak salah saya mendapatkan bantuan sebesar 600 rb tapi kalau sekarang sudah turun udah jadi 300rb kemarin saya dapat. Ya untuk kehidupan sehari-hari untuk beli beras, jadinya buat beli beras, minyak kayak gitu dan yang lain-lain” (Yanti, 35 tahun, KPM BST Desa Besuki, wawancara 13 Juni 2021).

Melihat pernyataan dari Yanti KPM BST menunjukkan bahwa pemanfaatan bantuan program BST digunakan sebaik mungkin untuk membantu perekonomian keluarga dari bantuan yang diterima sebesar Rp.300.000 untuk membeli bahan pokok dapur. Sebelumnya dalam observasi penyaluran BST oleh kantor POS Wadaslintang, petugas POS juga memberikan pengarahan dalam penggunaan bantuan saat sesi penyaluran bantuan akan dimulai harapannya agar bantuan tidak hanya digunakan untuk makan saja melainkan bisa untuk bisa diolah kembali jadi bisa menjadi pemasukan untuk kedepannya. Sejalan dengan Yanti yang mendapatkan BST Tinah menjelaskan pemanfaatan bantuan yang diterima. Sebagaimana hasil wawancara dengan KPM BST Desa Besuki sebagai berikut:

“Untuk mendapatkannya kemarin saya mendapatkan 300rb, untuk yang dulu-dulu pernah dapat 600rb. Bantuan yang saya dapatkan untuk kehidupan sehari-hari seperti beli beras, sayuran, minyak, telur. Saya senang mendapatkan bantuan ini, karena membantu perekonomian keluarga saya. Karena untuk anak-anak ibu sudah sekolah ada dua yang satu kelas 6 (enam) SD yang satu masih kelas 1 (satu) SD” (Tinah, 36 tahun, KPM BST Desa Besuki, wawancara 13 Juni 2021).

Pemanfaatan dalam penggunaan bantuan yang diterima akan kembali kepada KPM yang menerima. Dalam proses pendataanya secara garis besar akan meninjau dengan pedoman kriteria sebagai penerima yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kesesuaian data dengan masyarakat penerima bantuan memang benar sesuai. Sehingga dapat diketahui kejelasan dalam memasukan data masyarakat miskin ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh petugas benar karena akan dijadikan sebagai pedoman dalam

pemberian BST tersebut. Observasi yang dilakukan dalam BST ini menghasilkan fakta bahwa data yang digunakan masih data dari bantuan BST yang lama, dan perlu adanya peninjauan ulang mengenai data penerima BST di Kecamatan Wadaslintang.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BPNT) menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial (Perpres Nomor 63 Tahun 2017).

Tujuan program BPNT, *Pertama* mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. *Kedua* memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM. *Ketiga* meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM. *Keempat* memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. *Kelima* serta memberikan dorongan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Pedoman BPNT, 2017)

Setiap KPM, mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp.200.000, yang ditransfer melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya KKS, peserta KPM dapat membeli kebutuhan bahan pangan berupa beras, telur sayur, dan buah melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu. Program BPNT merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Program ini diasumsikan akan dapat mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga KPM (Wiyaka, dkk: 2019). Manfaat BPNT adalah meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan (Pedoman BPNT, 2017).

TKSK Kecamatan Wadaslintang bertanggungjawab atas pendampingan program BPNT yang akan diberikan kepada KPM di Desa Besuki. Sebagaimana hasil wawancara dengan VF TSKK Kecamatan Wadaslintang sebagai berikut:

“Peran TSKK ini kita mendampingi program agar selaras dengan 6T. Perannya lebih memantau uang yang diterima masyarakat sebesar 200 ribu sesuai dengan pemenuhan karbohidrat, pemenuhan vitamin dan mineral, protein hewani dan nabati. Apakah sudah sesuai harganya dipasarannya sesuai atau tidak harga dengan barang, kita harus bisa mengoreksi jika tidak sesuai dari harganya” (VF, 38 tahun, TSKK Kecamatan Wadaslintang, wawancara 05 Juni 2021).

Pernyataan dari wawancara dengan VF menjelaskan mengenai TSKK yang berperan untuk pemantauan program BPNT agar 6T, yang dimaksud dengan 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, tepat administrasi. Tepat sasaran yaitu siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Tepat jumlah yaitu tidak bisa dikurangi sedikitpun hak para KPM untuk mendapatkan bantuan BPNT. Seluruhnya juga tidak serta-merta melupakan pemenuhan karbohidrat, pemenuhan vitamin dan mineral, protein hewani dan nabati. Di Desa Besuki pemenuhan karbohidrat berupa beras, sumber protein hewani telur atau daging ayam, pemenuhan nabati kacang brokoli atau kacang ijo, dan pemenuhan mineral dan vitamin berupa buah TSKK menjelaskan bahwa apabila, ada ketidaksesuaian dari bantuan yang diberikan wajib dikoreksi bersama.

Agen penyaluran BPNT Desa Besuki terletak di Dusun Sikapat Rt 02 Rw 03 Besuki. Sasaran dari BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di kabupaten atau kota, pelaksana BPNT dan namanya termasuk di dalam daftar KPM BPNT yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (KEMENSOS). Daftar dari KPM BPNT Desa Besuki bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah verifikasi dan validasi (Verval) oleh Pemerintah Daerah (Pedoman BPNT, 2017). Agen penyaluran BPNT juga bekerja sama dengan Bank Himbara yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) 46 sebagai penyedia alat mesin debit (EDC) dari dana yang sudah masuk dalam

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Agen BPNT dalam proses kinerjanya didampingi oleh TKSK Kecamatan Wadaslintang. Beberapa kegiatan membutuhkan pendampingan dalam data-data yang akan menerima bantuan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Sri Erlina Agen BPNT Desa Besuki sebagai berikut:

“TKSK sangat membantu terutama di BPNT, karena peran TKSK yang kaya mengkoordinir meliputi data-datanya dan akan diberikan ke agen ini. Setiap bulan memberikan pendampingan, karena wilayah kecamatan wadaslintang luas jadi tidak semua waktu tercover pada saat pendampingan. Untuk masalah informasi yang diberikan TKSK akan memberikan data kepada agen, kemudian pak Kadus akan menyampaikan ke RT, setelah itu baru ke warga yang mendapatkan” (Sri Erlina, 22 tahun, Agen BPNT Desa Besuki, wawancara 30 Mei 2021).

Pernyataan dari wawancara dengan Sri Erlina menjelaskan sebelum BPNT akan diterima oleh masyarakat Desa Besuki koordinasi yang dilakukan oleh TKSK adalah pengiriman data-data masyarakat penerima BPNT, selanjutnya agen akan melakukan penyortiran sesuai dengan *By Name By Address* (BNBA) dimaksudkan agar data yang akan disampaikan kepada perangkat desa sudah rapih dan mudah dipahami. Karena sebelumnya data yang diterima masih belum sesuai BNBAnya.

Gambar 5. Pembagian BPNT Di Dusun Sikapat Rt 02 Rw 03 Desa Sikapat



Sumber: Dokumen Pribadi

BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang

bahan pangan atau Elektronik Warung Gotong Royong selanjutnya disebut *E-Warong*. *E-Warong* adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan atau pembelian bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial bersama bank penyalur. Prinsip utama program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah mudah dijangkau dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (Beras dan telur) serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (Tidak diarahkan pada *E-Warong* tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan), mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM, memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM, *E-Warong* dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal (Pedoman BPNT, 2017)

Gambar 6. Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) Masyarakat Desa Besuki



Sumber: Dokumen Pribadi

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan 1 (Satu) dari dokumen resmi setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang perlu dibawa oleh setiap KPM untuk dilakukan pendebitan, selanjutnya akan mendapatkan struk dan dicairkan dengan paket sembako yang tersedia. Adanya kendala-kendala yang ditemui agen selama melakukan penyaluran BPNT baik secara teknis ataupun non teknis. Sebagaimana hasil wawancara dengan Sri Erlina Agen BPNT Desa Besuki sebagai berikut:

“Untuk sayur dan buah akan menyesuaikan kondisi misalnya untuk kubis karena cepat busuk jadi bisa diganti wortel atau labu. Permasalahan lainnya adalah sinyal, karena susah sinyal membuat gesek di tempat atau pendebitan membutuhkan waktu yang lama. Mohon pemerintah bisa memaklumi karena desa ini pelosok jadi bisa diberikan pelonggaran waktu, misalnya hari senin pendebitannya baru hari kamis bisa penyalurannya (Karena satu desa satu hari) cukup memberatkan” (Sri Erlina, 22 tahun, Agen BPNT Desa Besuki, wawancara 30 Mei 2021).

Pernyataan dari wawancara dengan Sri Erlina menggambarkan kondisi dari barang-barang bantuan sembako yang akan disalurkan memerlukan ketelitian dari agen, ada beberapa sayuran yang mudah busuk sehingga bisa diganti sayuran yang tidak mudah busuk sebagai alternatifnya. Di sisi lainnya, permasalahan sinyal untuk melakukan pendebitan di mesin EDC mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu melihat Desa Besuki merupakan desa kecil dan akses sinyal internet susah. Alternatif lainnya Sri Erlina sebagai agen mengharapkan kepada pemerintah agar pendebitan bisa berbeda waktu dengan penyaluran BPNT. Karena di Desa Besuki dan desa lainnya di Kecamatan Wadaslintang dilakukan penyaluran di hari yang sama selama satu hari penuh. Hal ini sejalan dengan konfirmasi dengan VF TSKS Kecamatan Wadaslintang, sebagai berikut:

“Sebenarnya masalah waktu bisa kapan saja tetapi ketika untuk mengatur masyarakat agar lebih efektif dan memonitoring. Perlu adanya penjadwalan waktu untuk melihat apakah bantuan sudah dilakukan atau ada hal-hal lain sehingga bisa jelas dan teratur. Masalah waktu dari Bank Himbara atau bank BNI nya ada jangka waktunya untuk debit saldo 200rb ada waktu 30 hari, tadianya 100 hari kalau 30 hari tidak di debit akan hilang atau dibekukan makanya perlu ada pengaturan untuk jadwal agar jelas dan saldo jelas agar lebih terkoodinir makanya ada jadwal” (VF, 38 tahun, TSKS Kecamatan Wadaslintang, wawancara 05 Juni 2021).

Pernyataan dari kutipan wawancara dengan VF menggambarkan penjelasan bahwa adanya kurang koordinasi perihal waktu penyaluran bantuan BPNT agar satu waktu dalam penyalurannya. Bank Himbara dalam hal ini BNI 46 memberikan waktu selama 30 (Tiga puluh) hari dari yang sebelumnya 100 (Seratus) hari untuk pendebitan saldo sebesar RP.200.000 untuk setiap KPM. Hal ini TSKS tidak menjelaskan kepada agen bahwa waktu yang dimiliki untuk penyaluran terhitung panjang dari 30 (Tiga puluh) hari, TSKS melalui koordinasi dengan kecamatan mengingankan koordinasi masalah bantuan agar satu waktu

meninjau efisiensi dari prosesnya. Proses penyaluran BPNT dibantu oleh Kasi Kesos Kecamatan Wadaslintang, Polsek Wadaslintang, perangkat Desa Besuki sebagai pengawas jalannya kegiatan.

Biddle dan Thomas menjelaskan mengenai kondisi-kondisi perilaku objek yaitu masyarakat, pernyataan tentang perilaku tentu melibatkan keadaan yang ada demi pelaksanaan perilaku yang diinginkan atau akan diperbuat. Keadaan perilaku objek menyertakan beberapa pelaku (Masyarakat) dan selalu demikian dengan yang lainnya seperti waktu, tempat, dan cara. Hal ini akan bertambah kepada bagaimana perilaku itu akan dibawakan oleh setiap seorang individu di masyarakat (Suhardono, 2018)

Agen BPNT menjelaskan bahwa masyarakat Desa Besuki ikut serta dalam penyaluran kegiatan, untuk bagian pendebitan sudah ditunjuk karena mengerti dan paham tugasnya, dan untuk setiap pos-pos bahan pangan sembako sudah ada sukarelawan dari bapak-bapak yang membantu menggotong peti buah agar lebih dekat pada saat pengambilan, ataupun pos beras yang memang memerlukan bantuan untuk mengangkatnya. Keseluruhan kegiatan dilakukan secara gotong-royong dari masyarakat. Selaras dengan pernyataan agen BPNT sebagaimana hasil wawancara dengan VF TKSK Kecamatan Wadaslintang sebagai berikut:

“Peran masyarakat dalam program sembako, itu memang ada dari salah satu masyarakat yang punya warung dan memang niat melayani masyarakat mereka punya warung dan dibuka menjadi *E-Warong* sebagai agen penyalur sembako. Masyarakat lainnya bersama-sama berpartisipasi menyewa mobil untuk mengambil barang-barang sembako, karena ada yang agak jauh untuk sembako yang akan dibagikan” (VF, 38 tahun, TKSK Kecamatan Wadaslintang, wawancara 05 Juni 2021).

Pernyataan dari wawancara dengan VF E-Warong sebagai tempat yang akan dituju oleh KPM Desa Besuki untuk mencairkan uang elektronik yang dimiliki menjadi bantuan sembako dalam bentuk fisik. VF percaya dengan adanya salah satu masyarakat yang memiliki warung dan niat untuk melayani masyarakat akan membuat kegiatan penyaluran bantuan akan terkendali. Masyarakat tidak serta-merta diam dan hanya menerima bantuan, melainkan bisa membantu dalam bentuk gotong-royong baik tenaga atau pikirannya. VF memperjelas dan menambahkan bahwa kartu KKS memang harus dipegang oleh KPM agar

masyarakat bisa mengetahui isi dalam kartu dan paham atas proses pendebitan yang dilakukan karena kartu bersifat pribadi. Hasil dari bantuan tersebut bermanfaat untuk memandirikan masyarakat.

Proses penyaluran BPNT di Desa Besuki dibagi atas 2 (Dua) *shift* dari pagi hari pukul 08:00-12:00 WIB, dan siang hari pukul 13:00-16:00 WIB. Dari observasi peneliti, ketika berlangsungnya penyaluran BPNT di Desa Besuki bahwa penerima BPNT merupakan masyarakat yang sebelumnya tidak menerima bantuan lainnya dari pemerintah. Hal ini justru berbalik, pembagian ini terdapat pada tabel yang diolah dari wawancara dengan masyarakat, sebagai berikut:

Tabel 9.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT Desa Besuki

No.	Keterangan	Sukamto	Painem	Suratman	Sukinem
1.	Usia	42 Tahun	65 Tahun	40 Tahun	68 Tahun
2.	Pendidikan	SMP	SD	SMP	SD
3.	Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
4.	Penerima Bantuan	BPNT	BPNT, BLT-DD	BPNT	BPNT, BLT-DD

Sumber: Diolah Dari Wawancara

Dari tabel di atas menjelaskan mengenai KPM yang mendapatkan BPNT di Desa Besuki, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan hasil bahwa masyarakat Desa Besuki masih ada yang menerima bantuan sosial dari pemerintah tidak hanya satu. Hasil ini menunjukkan bahwa verifikasi dan validasi (Verval) data yang dilakukan masih belum dikatakan adil. Karena sudah tertera dalam pedoman BPNT bahwa penerima bantuan adalah mereka yang tidak menerima bantuan lainnya dari pemerintah. Selaras dengan pernyataan agen BPNT sebagaimana hasil wawancara dengan Painem KPM Desa Besuki sebagai berikut:

“Ya mengenai bantuan berupa uang saya dapat juga. Uang besarnya Rp.600.000 diambil di Lik Pundak. Kedepannya saya akan minta langsung, soalnya usianya saya sudah tua dan bapak saya tidak bisa bekerja karena sudah tua” (Painem, 65 tahun, KPM Desa Besuki, wawancara Minggu 30 Mei 2021).

Pernyataan dari wawancara dengan Painem menjelaskan mengenai bantuan BPNT di sisi lainnya Painem menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan bantuan berupa BLT-Dana Desa sebesar Rp.600.000 dari Desa Besuki. Bantuan yang diterima tidak serta-merta hanya untuk dirinya saja, melainkan untuk bapaknya yang sudah tidak bekerja karena sudah tua. Hal ini lumrah adanya ketika di desa adanya orang tua yang sudah tua dirawat oleh anaknya, sehingga desa memberikan bantuan untuk para KPM. Selaras dengan pernyataan Painem juga dapat menggambarkan bahwa bukan hanya Painem selaku KPM yang mendapatkan bantuan secara dobel, tapi juga masyarakat lainnya juga seperti Sukinem salah satu KPM BPNT Desa Besuki yang menerima bantuan dobel terkait kondisi perekonomian keluarga. Hasil dari wawancara dengan Sukinem terangkum dalam kutipan di bawah ini:

“Tidak ya, saya agak lupa mas, Owh iya ada bantuan yang miskin-miskin itu. Dan mendapatkan Rp.600.000 bantuan. Ya harapan saya, lanjut untuk bantuannya karena saya sudah tua dan bapak saya sudah tua. Dan saya berterimakasih karena bantuan dari pemerintah” (Sukinem, 68 tahun, KPM Desa Besuki, wawancara Minggu 30 Mei 2021).

Pernyataan dari informan selaku KPM BPNT Desa Besuki juga menunjukkan bahwa bantuan sosial yang diterima dobel. Sebagai KPM lanjut usia dan merawat orang tua yang sudah tua menjadikan Sukinem mendapatkan bantuan dobel dari pemerintah. Pernyataan Painem dan Sukinem menunjukan data adanya dobel bantuan sosial merupakan salah satu dampak Verval Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak optimal hal ini akan memunculkan kecemburuan sosial di masyarakat. Meskipun demikian Sakinem dan Painem merupakan obyek di masyarakat yang terdampak secara kesejahteraannya. Peran masyarakat lainnya perlu melihat mengenai kondisi-kondisi perilaku obyek yaitu masyarakat, pernyataan tentang perilaku tentu melibatkan keadaan yang ada demi pelaksanaan perilaku yang diinginkan atau akan diperbuat. Keadaan perilaku

objek menyertakan beberapa pelaku (Masyarakat) dan selalu demikian dengan yang lainnya seperti waktu, tempat, dan cara (Suhardono, 2018).

TKSK dan masyarakat bersama menjalankan perannya untuk kesejahteraan sosial di Desa Besuki, kerjasama ini akan bermanfaat dalam setiap program-program kesejahteraan sosial utamanya BPNT. Sebagaimana wawancara dengan Suratman KPM Desa Besuki sebagai berikut:

“Ya, tau kalau ada yang memantau. Saya sendiri belum pernah melihat karena penyaluran kemarin sudah pulang. Ya kalau saya kurang tau juga tentang TKSK, tanggapan saya, ya bagus saja karena ada yang mendampingi. Saya kalau misalnya ada yang tidak pas melaporkan, kalau misalnya barang dari sembako ada yang busuk pastinya melaporkan dan dari sini menanggapi” (Suratman, 40 tahun, KPM BPNT Desa Besuki, wawancara 30 Mei 2021).

Pernyataan dari wawancara dengan Suratman selaku KPM BPNT belum pernah melihat pendampingan yang dilakukan TKSK Kecamatan Wadaslintag. Tetapi Suratman menanggapi bahwa bagus dengan adanya pendampingan yang dilakukan. Di sisi lainnya KPM yang mendapati bahan-bahan pokok dari sembako yang diterima ada yang busuk bisa langsung dilaporkan dan akan diganti dengan yang baru. Hal ini sesuai dengan slogan 6T dari BPNT yaitu tepat kualitas, artinya kualitas yang diberikan harus sesuai dengan harga yang diberikan dari bantuan senilai Rp.200.000.

Bantuan BPNT merupakan bantuan sembako setidaknya bisa mengurangi beban KPM dalam urusan pangan dan bermanfaat untuk menambah nilai gizi dari makanan yang dikonsumsi masyarakat. Sebagaimana wawancara dengan Sukamto KPM Desa Besuki sebagai berikut:

“Kalau tercukupi sih belum mas, cuman ya membantu meringkankan beban ekonomi keluarga saya. Setau saya berjalannya dengan baik program penyaluran bantuan di desa ini. Lupa berapa kali, tapi sudah banyak untuk saya mendapatkan bantuan ini....Harapan kami semoga bantuan ini terus berlangsung untuk membantu orang-orang yang kekurangan dan yang mengurus penyaluran bantuannya tetap semangat” (Sukamto, 42 tahun, KPM BPNT Desa Besuki, wawancara 30 Mei 2021).

Banyak indikator agar bisa menjelaskan kesejahteraan sosial di masyarakat salah satunya adalah faktor kemiskinan, merupakan permasalahan

yang kompleks dan multidimensi serta memiliki dampak sangat luas terhadap kualitas hidup individu dalam masyarakat. Kemiskinan adalah situasi serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak individu yang bersangkutan dan ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan (Damayanti, 2016 dalam Sudrajat, dkk: 2017). Pernyataan dari wawancara dengan Sukamto KPM BPNT Desa Besuki bahwa bantuan yang diterima memang tidak secara langsung membantu perekonomian keluarganya secara besar tapi membantu meringankan. Sukamto menjelaskan dalam proses penyaluran bantuan BPNT Desa Besuki sudah baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur. Dan harapannya sebagai KPM untuk BPNT bisa berlangsung secara terus-menerus untuk membantu masyarakat yang kekurangan.

Adapun jika ada perubahan kondisi dari KPM di tahun berjalan dijelaskan bahwa, *Pertama* pemegang rekening meninggal, anggota keluarga dari pemegang rekening melaporkan kepada desa atau kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan kematian yang akan digunakan oleh perangkat desa atau kelurahan untuk melaporkan kondisi tersebut ke Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten atau Kota. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten atau Kota merekomendasikan pengalihan kepemilikan rekening ke anggota KPM lain yang memenuhi syarat kepada Bank Penyalur. *Kedua* KPM pindah domisili, harus melaporkan pada perangkat desa atau kelurahan lama maupun desa atau kelurahan baru agar data KPM termutakhirkan atau terabaharukan. Jika KPM pindah ke Kabupaten atau Kota lain yang termasuk wilayah pelaksanaan BPNT, maka KPM masih berhak menggunakan Kartu Combo untuk memanfaatkan BPNT di *E-Warong* yang sudah bekerjasama dengan Bank Penyalur. Jika KPM pindah ke Kabupaten atau Kota lain yang tidak termasuk wilayah pelaksanaan BPNT, maka KPM tetap menerima dana BPNT dalam rekening pribadinya (Pedoman umum BPNT, 2017).

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA BESUKI

Peran masyarakat dalam kesejahteraan sosial di desa sangat berpengaruh dengan partisipasi masyarakatnya hal ini akan dirasakan dari adanya praktik-praktik keterlibatan dalam program-program masyarakat. Kondisi tersebut di antaranya berkaitan dengan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat dari peran masyarakat. Kehidupan masyarakat miskin bergatung pada program kesejahteraan sosial yang adil dan menyeluruh. Kondisi-kondisi dari seorang masyarakat dapat dibedakan menjadi dua posisi, yaitu yang diraih dan yang disandingkan. Dari kedua konsep ini dapat pula untuk menjelaskan keanggotaan seorang masyarakat dan perilakunya. Biddle dan Thomas menjelaskan peran ketika seorang masyarakat menduduki sebuah status atau posisi tertentu di dalam masyarakat posisi yang dimaksud adalah posisi yang didapatkan secara sadar membutuhkan kualifikasi tertentu atau pengalaman tertentu. Sedangkan status yang disandingkan orang yang menduduki posisi yang dimaksud tanpa menginginkan secara sadar atau adanya *stereotype* yang disematkan kepada individu di masyarakat (Suhardono, 2018).

Masyarakat tergerak untuk berperan atau partisipasi jika, *Pertama* peran atau partisipasi dilakukan melalui program-program organisasi yang sudah ada atau umum dikenal oleh masyarakat yang bersangkutan. *Kedua* peran atau partisipasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. *Ketiga* manfaat yang diperoleh melalui kegiatan partisipasi dapat memenuhi kepentingan masyarakat. *Keempat* dalam proses partisipasi akan menjamin sebuah kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan. (Goldsmith dan Blustain dalam Putra, 2019). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk menggerakkan peran atau partisipasi masyarakat dibutuhkan sebuah cara, salah satu cara agar masyarakat tergerak dari peran atau partisipasinya adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jika seorang pemimpin dalam hal ini adalah TKSK Kecamatan Wadaslintang, perangkat desa, dan lainnya ingin menggerakkan dalam peran atau partisipasi masyarakat Desa Besuki maka TKSK dan perangkat desa perlu melibatkan

masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa, apalagi jika keputusan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat (Putra, 2019)

Dalam tinjauan pelaksanaan program kesejahteraan sosial, minjau pada faktor-faktor yang ada dari upaya peran oleh masyarakat di Desa Besuki, penulis melihatnya melalui 2 (Dua) sisi. *Pertama* faktor pendukung peran masyarakat. Dan *Kedua* faktor penghambat peran masyarakat, yaitu:

A. Faktor pendukung peran masyarakat

Berlangsungnya praktik kerja dari TKSK di Kecamatan Wadaslintang sejak tahun 2009 memberikan perubahan dan membawa pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah pemutahiran data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk data masyarakat sesuai dengan kriteria Penerima Manfaat Kesejahteraan Sosial (PMKS). Aktor yang paling merasakan hal ini adalah mereka sebagai penampung sosial untuk kesejahteraan sosial. Masa pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020 memberikan dampak besar dalam kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Besuki salah satunya kehilangan mata pencaharian, karena mata pencaharian merupakan permasalahan yang sangat krusial bagi masyarakat desa. Kebutuhan hidup masyarakat yang bergantung dengan pekerjaan akan berdampak pada pengangguran karena hilangnya mata pencaharian, di sisi lain Desa Besuki mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan diberkahi alam yang asri dan lahan yang luas memberikan alternatif pekerjaan bagi masyarakat yang sebelumnya bekerja di wilayah perkotaan untuk kembali ke desa.

Peran masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung yang mengikutinya, faktor pendukung ini bisa menjadi tolak ukur masyarakat untuk melakukan partisipasi di wilayahnya. Faktor pendukung dalam peran masyarakat akan berpengaruh terhadap proses berlangsungnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian bahwa faktor pendukung dari peran masyarakat di Desa Besuki sebagai berikut:

1. Faktor budaya masyarakat

Budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar untuk diubah. Masyarakat desa dengan

nilai-nilai kebersamaan yang masih alami dengan semangat dan giat dalam melakukan kegiatan yang ada. Budaya yang berkembang dan masih diterapkan di Desa Besuki yaitu adanya sistem budaya gotongroyong yang melekat pada masyarakat untuk bekerja sama dan hasilnya akan dirasakan bersama oleh masyarakat. Budaya gotongroyong yang besar dari masyarakat yang satu dengan yang lain terlihat jelas. Budaya gotongroyong di masyarakat menjadi faktor pendorong dalam basis membentuk masyarakat menjadi sosialis dan budaya menjadi berpengaruh positif pada partisipasi masyarakat.

Gambar 7. Budaya Gotongroyong Masyarakat Desa Besuki



Sumber: Dokumen Pribadi

Hal ini terbukti adanya kegiatan-kegiatan yang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya, seperti dalam gambar 7 (Tujuh) masyarakat Desa Besuki secara bersama-sama membangun jalan yang rusak. Peran dalam gotong royong yang kuat khususnya di Desa Besuki mencerminkan adanya respon masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dalam bidang infrastruktur, untuk memudahkan masyarakat yang umumnya sebagai petani, dalam mengantarkan hasil panen dari kebun yang dimiliki dan memudahkan akses jalan untuk kendaraan dari para petani dan masyarakat lainnya.

Di sisi lainnya Desa Besuki memiliki tantang besar mengenai infrastruktur jalan, dengan budaya gotongroyong yang dimiliki oleh masyarakat diupayakan untuk dikembangkan dalam membantu meringankan dalam proses pembangunannya. Sebagaimana wawancara dengan Triyono Kepala Desa Besuki sebagai berikut:

“Ya kalau di sini ennggak ada tantangan yang begitu besar, kalau arahan di sini kalau infrastruktur bagus ya jenjang ekonomi akan meningkat.....Yang akan dibangun jalan dulu, kadang pemerintah bilang jangan jalan-jalan dulu yang dibangun. Contohnya, kalau jalannya sulit hasil bumi akan membuat harganya murah, kalau jalannya bagus bisa didistribusikan dengan baik. Karena masalah hasil bumi banyak di sini seperti kelapa, pisang, ketela pohon. Malah akhir-akhir ini masyarakat menanam porang, porang adalah umbi-umbian yang merupakan komoditas dengan harga jual yang bagus. (Triyono, 47 tahun, Kepala Desa Besuki, wawancara 13 April 2021).

Menurut Triyono sudah menjadi rahasia umum akses jalan di Desa Besuki rusak dan perlu untuk dibangun kembali. Dengan adanya jalan yang bagus perekonomian masyarakat akan meningkat, tapi jika masyarakat masih di susahkan untuk distribusi hasil panen karena mahalnya ongkos bisa mengakibatkan hasil akhir yang diterima oleh petani tidak untung. Upaya-upaya pencegahan, perbaikan, dan lainnya ini disampaikan langsung oleh Triyono dalam forum-forum seperti Persatuan Kepala Desa Wadaslintang (PKDW) yang dilaksanakan setiap 1 (Satu) bulan sekali, dan forum Persatuan Kepala Desa Wonosobo (PKDW) yang dilaksanakan setiap 3 (Tiga) bulan sekali. Sehingga aspirasi yang didapatkan dari masyarakat bisa disalurkan ke forum yang pas. Hal yang sama disampaikan oleh VF TKSK Kecamatan Wadaslintang:

“Semangat kegotong royong sudah ada di masyarakat, misalnya pada saat ada anak disabilitas namanya Kepeng. Dulu pernah saya motivasi untuk sekolah ke Solo dan masyarakat tergerak untuk membantu tetapi orang tua tidak mendukung, tapi beberapa tahun kemudian Kepeng mau untuk melakukannya karena diizinkan oleh orangtuanya berkat keterbukaan masyarakat untuk membantu Kepeng dan membujuk orang tuanya” (VF, 38 tahun, TKSK Kecamatan Wadaslintang, wawancara 05 Juni 2021).

Pernyataan dari wawancara dengan VF TKSK menjelaskan mengenai masyarakat yang mendukung dan memotivasi adanya disabilitas untuk berkembang, Kepeng menjadi disabilitas yang mahir dalam komputer dengan kekurangan yang dimiliki keterbatasan untuk mengakses lembaga-lembaga belajar komputer menjadi penghalang bagi Kepeng. Masyarakat Desa Besuki bergotongroyong untuk membantu Kepeng agar bisa kursus mengembangkan bakatnya walaupun sempat mendapatkan lika-liku akhirnya Kepeng bisa melaksanakan pembelajaran komputer di Solo.

Di sisi lain masyarakat Desa Besuki juga diberikan ruang untuk berperan mengikuti kegiatan dan aktif berpartisipasi dalam program-program kesejahteraan sosial yang ada. Sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat Desa Besuki sebagai berikut:

“.....Ada lagi faktor yang mendukung peran masyarakat dalam kesejahteraan sosial. Adanya budaya namanya di desa ini adalah gotong royong kalau di hari minggu masyarakat betulin jalan yang rusak, agar yang amblas jadi benar kembali. Kalau ada yang bangun rumah bapak-bapak membantu kegiatan tersebut” (Tinah, 36 tahun, masyarakat Desa Besuki, wawancara 13 Juni 2021).

Pentingnya partisipasi masyarakat tidak hanya dalam sektor-sektor kesejahteraan sosial saja melainkan pada sektor-sektor lain, seperti disebutkan oleh Tinah yang menjelaskan mengenai program gotongroyong selain membangun infrastruktur jalan juga dibarengi dengan kegiatan membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan bantuan ketika membangun rumah. Baginya kebiasaan ini bisa menandakan bahwa masyarakat Desa Besuki aktif mengikuti program-program kesejahteraan di desa

2. Faktor program dan kepemimpinan

Faktor pendukung yang selanjutnya adalah program yang bermanfaat bagi masyarakat, jenis program mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh TKSK Kecamatan Wadaslintang dan perangkat di Desa Besuki mengenai program-program untuk mendongkrak kesejahteraan sosial desa, hal ini akan terbukti bahwa masyarakat akan antusias mengikuti program jika program bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat yang mendapatkan program bantuan. Sehingga akan bermanfaat positif dalam pengembangan dari program kesejahteraan.

Di sisi lain, hubungan antara kepemimpinan dan keaktifan berpartisipasi masyarakat dalam program juga menghasilkan harmonisasi di dalamnya, dengan Kepala Desa Besuki yang sudah menduduki jabatan 2 (Dua) kali menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dibawakan membawa perubahan bagi masyarakat kecenderungan yang akan dibawakan masyarakat akan aktif dalam peran masyarakat dalam kesejahteraan sosial di desa dan program lainnya. Hal ini

menunjukkan bahwa individu yang menjadi pemimpin harus mampu memberikan pengaruh dan himbuan kepada masyarakatnya dan tanggap atas keperluan masyarakatnya, memiliki rasa keterbukaan terhadap pandangan-pandang baru di masyarakat, dan melaksanakan dan mendukung inovasi bagi kemaslahatan bersama

Bermanfaatnya program yang sudah dilaksanakan dalam membantu kesejahteraan dari masyarakat, akan membangkitkan masyarakat lainnya agar ikut serta dalam partisipasinya. Sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat Desa Besuki sebagai berikut:

“.....Programnya mas, dalam program kesejahteraan menurut saya merupakan program yang mendukung untuk membangkitkan masyarakat agar masyarakatnya bagus-bagus dan sejahtera. Programnya cukup jelas untuk kesejahteraannya sendiri” (Tinah, 36 tahun, masyarakat Desa Besuki, wawancara 13 Juni 2021).

Melihat pernyataan dari Tinah yang menjelaskan mengenai faktor pendukung dari peran masyarakat dari segi program, menandakan bahwa dengan adanya program yang menarik bisa membangkitkan masyarakat untuk turut serta di dalamnya. Manfaat dari adanya program bagi Tinah agar menjadikan masyarakat sejahtera, dan program yang dijalankan di Desa Besuki cukup jelas untuk membuat masyarakatnya sejahtera.

3. Faktor pendidikan dan usia masyarakat

Kondisi dari faktor pendidikan menjadi urusan yang penting dalam mendukung peran masyarakat, berbanding terbalik dengan wilayah perkotaan adanya pendidikan tinggi menjadikan masyarakatnya akan berperan dalam program-program kesejahteraan di desa melainkan di Desa Besuki dengan masyarakat lulusan Sekolah Dasar (SD) dan dibarengi dengan budaya gotongroyong yang baik menjadikan kolaborasi dari segi nilai-nilai sosial yang tinggi terlebih desa menjadikan masyarakatnya giat dan tidak terpengaruh dengan jiwa individualis (Orang yang egois) karena semakin tingginya pendidikan.

Kondisi keadaan fisik dari masyarakat di Desa Besuki masih tergolong pada usia yang produktif, masih memiliki etos kerja tinggi dan energi yang baik, yang bermanfaat untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat pada peran

pembangunan kesejahteraan sosial di desa. Keberhasilan program dan bermanfaatnya program dalam membantu kesejahteraan dari masyarakat akan membangkitkan masyarakat lain untuk ikut serta dalam partisipasinya

Desa Besuki dengan program bantuan yang memadai, tidak lepas dari faktor pendidikan dan usia dari masyarakatnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Yanti masyarakat Desa Besuki sebagai berikut:

“...Mungkin nggih karena pendidikan karena yang dapat adalah orang-orang yang tidak mampu lulusannya juga biasa seperti saya lulusan SMP dan tetangga saya lulusan SD. Tapi ada yang lulusan SMA kuliah ada yang dapat kayaknya. Pendidikan disini orang desa SD, SMP, kalau SMA biasanya yang anak-anak sekarang sekolah di SMA Wadas...Pekerjaan di sini pada buruh dan tani, kalau di sini karena di gunung banyaknya yang buruh dan bekerja tukang kayu” (Yanti, 35 tahun, masyarakat Desa Besuki, wawancara 13 Juni 2021).

Melihat pernyataan dari Yanti menjelaskan mengenai pendidikan yang ada di Desa Besuki mayoritasnya adalah lulusan SD, gambaran ini memberikan pengaruh pada mata pencaharian masyarakat desa sebagai petani dan buruh tani. Tempat pekerjaan yang sama dengan wilayah tempat tinggal memberikan proses dalam frekuensi bertemu orang yang sama di desa. Hal ini akan mengakibatkan rasa akrab dan kekeluargaan yang semakin aktif, dan membuat tidak ada jarak dari individu satu dengan yang lainnya. Ditambah lagi Yanti menjelaskan masyarakatnya yang masih muda-muda dan produktif dalam proses kegiatan yang dilaksanakan di desa.

4. Faktor kerjasama masyarakat

Pemerintah Desa Besuki bekerjasama dengan Puskesmas Wadaslintang 1 (Satu) untuk melakukan proses kegiatan kesehatan di Desa Besuki. Hal ini juga mempengaruhi keberlangsungan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan VF TKSK Kecamatan Wadaslintang yang menjelaskannya sebagai berikut:

“...Dari Puskesmas sudah membantu kepada tiap-tiap warga, karena kurang adanya koordinasi dengan kecamatan, untuk penanganan ODGJ agar tidak dibawa ke RSJ. Bisa menggunakan mobil dari Puskesmas atau mobil dari Polsek, untuk wadaslintang sebenarnya sebelumnya masih sulit karena masih dilempar-lempar untuk penanganannya. Pak RT bisa juga bisa mengerakan masyarakatnya untuk iuran, untuk menyewa dan

membeli bensin jika nantinya tidak ada respon dalam penanganannya” (VF, 38 tahun, TKSK Kecamatan Wadaslintang, wawancara 05 Juni 2021).

Pada kutipan wawancara dengan VF TKSK bekerjasama dengan pihak Puskesmas Wadaslintang 1 (Satu) hal ini akan memberikan kemudahan dalam proses penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) hal ini akan memberikan kemudahan kepada masyarakat agar mendapatkan keamanan di lingkungannya. Penanganan ODGJ sebelumnya mendapatkan kesulitan dalam penanganannya dikarenakan saling tunjuk untuk penanganannya. Adanya kerjasama yang baik dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan Puskesmas dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial dan menciptakan iklim kondusif di masyarakat.

B. Faktor penghambat peran masyarakat

Dengan adanya faktor-faktor penghambat peran masyarakat di Desa Besuki, pemerintah desa berupaya melakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjang masyarakat salah satunya dengan adanya Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) pemerintah Desa Besuki menetapkan program untuk kegiatan kesejahteraan sosial bekerjasama dengan masyarakat, dan para pemangku kepentingan seperti RT atau RW, Kepala Dusun (Kadus), LPMD, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda untuk menyepakati rencana pembangunan desa untuk kegiatan tahun anggaran yang nantinya akan direncanakan, acuan rancangan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Menurut para ahli ekonomi, kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensial Arsyad, 2010 dalam Setyowati, dkk: 2020. Kemiskinan yang bersifat multidimensial (Kemungkinan, segi, dan sebagainya) dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer pada masyarakat dalam bentuk miskin aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta ketrampilan yang rendah. Sedangkan untuk aspek sekunder pada masyarakat berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan, dan informasi. Di sisi lainnya, kemiskinan juga dikatakan sebagai persoalan yang kompleks (Sulit dan saling terhubung) karena tidak hanya berkaitan dengan masalah

rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia terutama kesejahteraan sosial. Ukuran-ukuran kemiskinan tersebut terwujud dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah pada masyarakat. (Wijayanti, 2005 dalam Setyowati, dkk, 2020).

Kemiskinan di wilayah desa mengupayakan kesejahteraan sosial yang menyeluruh kepada masyarakat, dengan program-program berupa kegiatan bersama tidak dipungkiri akan ditemukan adanya hambatan di dalamnya. Peran masyarakat dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat yang mengikutinya, faktor penghambat pada keberlangsungan peran masyarakat sebagai jawaban atas proses program-program kegiatan dapat digunakan menjadi referensi pemerintah desa untuk menjadikannya sebagai pedoman penanganan. Berdasarkan hasil pengamatan observasi dan wawancara oleh penulis menunjukkan bahwa faktor penghambat dari peran masyarakat di Desa Besuki sebagai berikut:

1. Faktor informasi dan komunikasi masyarakat

Penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat desa yang tidak memadai kepada masyarakat akan menjadikan masyarakat mengartikan sebuah informasi menjadi rancu. Sehingga masyarakat memiliki pendapat yang berbeda dalam mengartikan sebuah proses peran atau partisipasinya dalam kesejahteraan sosial di desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan VF TKSK Kecamatan Wadaslintang yang menjelaskannya sebagai berikut:

“Ya kadang dengan adanya informasi yang kurang dari pemerintah desa ada saja setiap masyarakat yang melihat orang lain menjadi iri “kenapa saya tidak mendapat bantuan, saya ini miskin kenapa tidak mendapatkan bantuan”, menjadikan mereka saja yang mendapatkan. Jadi mereka yang partisipasi dalam kesejahteraan sosial atau kerja bakti” (VF, 38 tahun, TKSK Kecamatan Wadaslintang, wawancara 05 Juni 2021).

Pada kutipan wawancara dengan VF TKSK menjelaskan bahwa masyarakat merasa iri kepada masyarakat yang menerima bantuan. VF meyakini bahwa hal tersebut sebagai hasil dari informasi yang tidak komprehensif pada saat

di sampaikan ke masyarakat. Sedangkan sudah jelas kriteria penerima merupakan masyarakat sesuai dengan kriteria dari Penerima Manfaat Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan datanya terverifikasi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Besuki. VF juga menambahkan bahwa ketika kunjungan ada saja masyarakat yang merasa dirinya miskin ketika ada penerimaan bantuan yang akan disalurkan ke desa. Sejalan dengan VF Yanti masyarakat Desa Besuki dengan adanya program kesejahteraan sosial faktor komunikasi menjadi kendala kepada masyarakat yang sudah tua. Sebagaimana hasil wawancara dengan Yanti masyarakat Desa Besuki sebagai berikut:

“Kalau disini yang menghambat komunikasi kepada orang yang sudah pada tua, komunikasinya orang yang menyampaikan informasinya itu masih kurang, kayaknya antara satu orang dengan orang lain tidak sesuai jadinya kurang pas, kebanyakan seperti itu mas” (Yanti, 35 tahun, masyarakat Desa Besuki, wawancara 13 Juni 2021).

Kutipan wawancara di atas menjelaskan mengenai komunikasi kepada masyarakat yang sudah Lanjut Usia (Lansia) membutuhkan teknik kapasitas yang memadahi kepada pendamping dan perangkat desa untuk menyampaikan informasi dalam komunikasi 2 (Dua) arah yang baik. Dengan adanya kemudahan teknologi tidak dibarengi dimilikinya produk-produk seperti gawai, masyarakat desa terutama Lansia Desa Besuki memang tidak menggunakan gawai secara aktif dengan kepemilikan pribadi.

2. Faktor partisipasi masyarakat

Proses partisipasi masyarakat dalam pogram kesejahteraan sosial Desa Besuki tergolong kurang hal ini terbukti dengan masih ada masyarakat Desa Besuki yang tidak peduli dengan program sosial melainkan lebih mengutamakan program-program fisik, pasrah, merasa canggung serta tidak berani untuk menyampaikan pendapat atas gagasan yang dimiliki menyebabkan proses peran masyarakat menjadi terhambat. Strategi pengembangan peran masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Besuki yaitu dengan pembuatan program-program berpedoman atas kebutuhan dan keiinginan masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa salah satu strategi yang digunakan pemerintah desa dalam meningkatkan peran masyarakat dengan diikutkan dalam pelatihan-pelatihan.

Sebagaimana tertuang dalam kutipan wawancara dengan Triyono Kepala Desa Besuki, sebagai berikut:

“Kalau dari pelatihan-pelatihan kami sering, bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Pelatihan dari Dinas Banjarnegara kami juga pernah mengirimkan 3 kali anak-anak yang kami kirim ke sana, ada yang menanam tanaman perdu pala, terus ada kelinci. Setiap ada kegiatan kami selalu ingin mengikuti dan mengikutkan masyarakat. Penurunan dari pelatihan dari yang dilatih enggak ada kontribusi ke desa, untuk kepentingan yang dilatih saja” (Triyono, 47 tahun, Kepala Desa Besuki, wawancara 13 April 2021).

Kutipan wawancara dengan Triyono menjelaskan desa memberikan pelatihan-pelatihan dengan dinas-dinas terkait bahkan sampai keluar kabupaten. Pelatihan fokus pada pertanian seperti penanaman pohon perdu yaitu pala dan peternakan seperti ternak kelinci. Desa sangat mendukung dengan adanya pelatihan dan mengirimkan masyarakatnya untuk mengikuti, sayangnya hasil dari implementasi dari program pelatihan-pelatihan yang diberikan tidak diberikan kepada masyarakat sebagai lanjutan edukasi ilmu-ilmu yang dikuasai. Hal ini menjadikan gambaran bahwa dorongan untuk menggerakkan masyarakat hanya sebatas untuk masyarakat yang terlihat saja. Dan kurang menyeluruh kepada masyarakat di wilayah Desa Besuki yang memiliki 4 (Empat) dusun di dalamnya.

3. Faktor fasilitas tidak optimal

Ketersediaan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat tidak digunakan secara optimal seperti halnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana BUMDes sebagai lembaga legal dalam mengembangkan perekonomian dalam bentuk usaha oleh masyarakat desa diharapkan dapat melahirkan produk unggulan lokal yang mampu menjadi citra positif bagi desa dalam kompetisi pasar bebas atau MEA. Salah satu faktor yang harus menjadi pedoman adalah berkenaan dengan perluasan pasar dari produk lokal melalui BUMDes dengan mempertimbangkan *Pertama* membangun pusat dari pemasaran atau outlet untuk produk-produk dari BUMDes. *Kedua* membuat regulasi atas wajibnya pasar modern seperti Indomaret, Alfamart, Hypermart, Gian, dan lain sebagainya untuk turut serta memasarkan produk-produk dari BUMDes. *Ketiga* penerapan *linkage*

strategy antara BUMDes sebagai penghasil bahan baku perantara dengan industri yang bergerak pada sektor hilir (Harmiati, dkk, 2017)

Desa Besuki dalam pengembangan masyarakat menghadirkan *home industry* untuk mengembangkan masyarakat dalam kerja dan juga pengembangan BUMDes untuk menggerakkan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam kutipan wawancara dengan Triyono Kepala Desa Besuki, sebagai berikut:

“Untuk *home industry* memang belum bisa menggerakkan masyarakat secara optimal. Tapi untuk kegiatan desa, dari segi dana desa yang jalan itu BUMDES pada tahun sebelumnya desa membuat air kemasan galon. Kemarin untuk rencana pengolahan pupuk belum berjalan dari limbah pupuk dan plastik belum berjalan tapi mesin sudah ada” (Triyono, 47 tahun, Kepala Desa Besuki, wawancara 13 April 2021).

Kutipan wawancara dengan Triyono Kepala Desa Besuki menjelaskan hadirnya *home industry* di Desa Besuki memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Triyono menambahkan bahwa di wilayahnya sementara ini ada tapi tidak banyak, di wilayah selatan Desa Besuki ada pembuatan kripik pisang, sedangkan di Dusun Besuki ada tapi tidak aktif. Di sisi lain penjelasan dari Triyono sekarang ini pembuatan kopi bubuk mulai aktif digalakan dan diramaikan, karena melihat *trand* yang sedang digemari oleh masyarakat. BUMDes sebagai penopang tambahan untuk pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat desa, hadirnya air kemasan dalam bentuk galon diharapkan dapat bersaing dan menjadi alternatif untuk masyarakat. Produk unggulan lainnya yang mangkrak adalah pembuatan pupuk organik, ketersediaan alat yang memadahi justru tidak dibarengi dengan proses produksi. Hal ini membuat peran masyarakat menjadi terhambat dan kurang efektif sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial di Desa Besuki.

Koordinasi dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa perlu untuk dilakukan dalam mendukung program kesejahteraan sosial di desa. Koordinasi yang dimaksudkan adalah dengan berbasis komunitas tidak hanya individu saja tetapi kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat Desa Besuki. Sehingga tingkat keterlibatan masyarakat khususnya untuk menggerakkan masyarakat *home industry* akan semakin meningkat dengan demikian dalam proses kesejahteraan sosial sebagai agen pembangunan dan pemberdayaan adalah

masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam kutipan wawancara dengan Sudibyo Sekretaris Desa Besuku, sebagai berikut:

“Ya mungkin kalau menurut saya ditingkatkan lagi koordinasikan entah itu dari TKSK ataupun dari masyarakat. Kita kembalikan lagi ke masyarakat dan memang harus dimusyawarahkan melalui Musdes dan masyarakat turut serta untuk mengikuti kegiatan tersebut” (Sudibyo, 32 tahun, Sekretaris Desa Besuki, wawancara 12 April 2021).

Kutipan wawancara dengan Sudibyo menjelaskan bahwa posisi sebagai sekretaris desa tidak membuatnya tidak memperhatikan posisinya ketika menjadi masyarakat biasa. Dalam koordinasi dengan TKSK ataupun dengan masyarakat perlu adanya peningkatan dalam kapasitas, di mulai dari kegiatan perencanaan di tingkat Musdes dan keikutsertaan masyarakat sangat berpengaruh dalam kegiatan yang akan dibawakan. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Agen BPNT Desa Besuki mengenai kinerja yang tidak optimal pada TKSK sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Setiap bulan memang TKSK akan memberikan pendampingan pada saat penyaluran bantuan, karena wilayah Kecamatan Wadaslintang luas jadi tidak semua wilayah akan terjangkau pada saat pendampingan, kadang disini seperti itu” (Sri Erlina, 22 tahun, Agen BPNT Desa Besuki, wawancara 30 Mei 2021).

Kutipan wawancara dengan Sri Erlina menggambarkan hambatan-hambatan bagi TKSK pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang berlangsung secara bersamaan dalam upaya melakukan usaha kesejahteraan di Desa Besuki. Faktor hambatan ini berupa letak wilayah Desa Besuki yang jauh dari pusat Kecamatan Wadaslintang, cuaca, waktu dari jarak tempuh yang akan digunakan, dan transportasi berupa kendaraan yang digunakan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Terlebih di sisi lainnya TKSK di Kecamatan Wadaslintang hanya 1 (Satu) orang untuk menjangkau 17 (tujuh belas) desa. Hal ini menjadikan kinerja TKSK tidak optimal dalam pelaksanaan program-program yang ada.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan pembahasan berdasarkan temuan data penelitian yang telah ditemukan dan dibahas oleh peneliti pada skripsi yang berjudul Peran Masyarakat Dalam Program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi di Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo) sebagai berikut:

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dibentuk oleh Kementerian Sosial Tahun 2009, TKSK mempersamai wilayah kecamatan dengan 1 (Satu) orang sebagai pekerja untuk seluruh wilayah desa. Upaya Peran masyarakat dalam program kesejahteraan sosial melihat TKSK sebagai bagian dari pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di wilayah lingkup kecamatan, sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 28 tahun 2018 tentang TKSK yang menjelaskan bahwa TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh kementerian sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten atau kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan.
2. Pelaksanaan peran masyarakat dalam kesejahteraan sosial di Desa Besuki masih perlu untuk ditingkatkan, permasalahan kesejahteraan sebagai tanggung jawab bersama bukan hanya pemangku jabatan. TKSK dalam mempersamai masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Persiapan program kesejahteraan sosial oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) masyarakat dalam kesejahteraan di Desa Besuki, *Pertama* persiapan program kesejahteraan sosial oleh TKSK, melakukan pemetaan sosial, melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melakukan koordinasi bersama, melakukan sinergi, integrasi dan sinkronisasi, kegiatan pelayanan dan bimbingan sosial, dan mengembangkan partisipasi sosial. *Kedua* Proses pelaksanaan peran

masyarakat masyarakat dalam kesejahteraan sosial di Desa Besuki dalam kesejahteraan sosial desa meliputi (Peran perencanaan program, peran pada pelaksanaan program, peran pada menerima hasil program, dan peran pada monitoring program). *Ketiga* program kesejahteraan sosial di Desa Besuki meliputi (Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT))

3. Faktor peran masyarakat, memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat, *Pertama* faktor pendukung: faktor budaya masyarakat, faktor program dan kepemimpinan, faktor pendidikan dan usia masyarakat, dan faktor kerjasama masyarakat. *Kedua* faktor penghambat: faktor informasi dan komunikasi masyarakat, faktor partisipasi masyarakat, dan faktor fasilitas tidak optimal
4. Teori peran Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas relevan dengan perilaku peran masyarakat Desa Besuki pada program kesejahteraan sosial. Dalam teori peran makna dari peran masyarakat merupakan konsep-konsep peran dan ciri-ciri dari peran. Individu dan masyarakat merupakan aktor dalam peran atau partisipasi yang tidak dapat dipisahkan.
5. Peran dalam kesejahteraan sosial tidak hanya ditentukan oleh individu itu sendiri, tindakan peran adalah hasil dari faktor internal dan eksternal sebagai stimulus kepada individu dan masyarakat. Semua terwujud karena faktor pendukung dan penghambat. Kemudian dimaknai membentuk peran bagi setiap individu dan masyarakat

B. SARAN

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait:

1. Bagi TKSK Kecamatan Wadaslintang di Desa Besuki agar memiliki *grand program* dalam kesejahteraan sosial sebagai salah satu gerakan dari program mensejahterakan masyarakat sebagai langkah lanjutan dari program-program kesejahteraan yang sudah berjalan dari wilayah yang dinaungi. Dan melakukan pemenuhan kapasitas untuk masyarakat agar bisa meningkatkan inovasi-inovasi dalam pengolahan hasil-hasil seperti pertanian, peternakan, dan lainnya.

2. Bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah kurang rasa iri dan dengki kepada masyarakat yang mendapatkan serta aktifkan kembali peran-peran masyarakat pada kesejahteraan sosial. Untuk yang menerima bantuan sosial pemerintah sebaiknya digunakan dengan sebaik mungkin dan jika mungkin digunakan untuk usaha dan menghasilkan pendapatan agar bisa menjadi tambahan untuk keluarga
3. Bagi pemangku jabatan perluasan program-program kesejahteraan sosial agar selaras dengan program-program fisik yang dilaksanakan. Dan tingkatkan kerjasama dengan pihak-pihak misalnya swasta untuk mengembangkan desa dalam sektor pariwisata sehingga bisa mengundang wisatawan dan disusul dengan pemberdayaan masyarakat untuk bergerak dalam program usaha seperti *home industry* untuk meyokong pendapatan dan menjadikan masyarakat semakin sejahtera.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang berniat mengkaji tentang peran masyarakat dalam program kesejahteraan sosial, penulis menyarankan agar mengkaji lebih mendalam mengenai pendamping sosial masyarakat lainya yang menggerakkan masyarakat dan kebermanfaatan peran masyarakat dalam kegiatan atau program kesejahteraan sosial di wilayah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Adi, Isbandi Rukminto. (2015). *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Fajar Interpratama Offset
- Fahrudin, Adi (2012). *Kesejahteraan Sosial Internasional*. Bandung: Alfabeta
- Ghony, D., & Almanshur, F. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Herabudin. (2015) *Pengantar Sosiologi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Koentjaraningrat (1990) *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Moleong, Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya
- Nasdian, Fredian Tonny. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Raho, Bernard (2014) *Sosiologi*. Nusa Tenggara Timur: Ledalero
- Ritzer, Goerge. (2014) *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Suhardono, Edy. (2018). *Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suharto, Edy. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Wazirrudin. (2019). *Kabupaten Wonosobo Dalam Angka*. Wonosobo: Badan Pusat Statistik (BPS)

Wazirrudin. (2020). *Kabupaten Wonosobo Dalam Angka*. Wonosobo: Badan Pusat Statistik (BPS)

Sumber Jurnal dan Skripsi:

Amalia, Ridha (2016). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) (Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). *Skripsi Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung*

Andreeyan, Rizal. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Universitas Mulawarman. *eJournal Administrasi Negara*, 2014, 2 No. 4

Andrianto, Wisnu., Soeaidy, M., dkk. Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Malang). Universitas Brawijaya Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2, Hal. 202-209

Fahrudin, Reza., Hakim, Luqman., dkk. Implementasi Perda No 8 Tahun 2004 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan). Universitas Brawijaya, Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol 1, No.2, hal. 271-280

Fadilah, Nur. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Faqih Asy'ari, Kediri. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Volume 1, Number 1, Maret 2020 p-ISSN: 2615-0212 | e-ISSN: 2621-2838

Gafur, Abdul. (2017). Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Memfasilitasi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. *Skripsi Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Uin Ar-Raniry Banda Aceh*

Harmiati., Zulkhakim, Abdul. 2017. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Fisip UNHAZ. Bengkulu

Hermawan, Yudan., Suryono, Yoyon. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program-Program Puser Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteren. Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* Volume 3, Nomor 1, Maret 2016, (97 - 108)

- Maun, Carly. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT
- Putra, M. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) (Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur). *Skripsi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*
- Ruli, A. (2016). Efektifitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi Kasus Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Umbulharjo dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Paku Alam). *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- Satiti, Sonyaruri. (2019). Kependudukan Indonesia Gerakan Ayo Sekolah Kabupaten Bojonegoro: Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Untuk Menyongsong Bonus Demografi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Setyowati, Fitri., dkk. 2020. Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan. Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Economic Education Analysis Journal / EEAJ* 9 (3) (2020) 875-891
- Sodiq, Amirus. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. STAIN Kudus. *Jurnal Ekonomi Syariah, Equilibrium*. Vol. 3, No. 2, Desember 2015
- Sudrajat, M., Sumpena, D., dkk. (2017). Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 2 No. 2 01-21
- Ulumiyah, Ita., Gani, Abdul., dkk. Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). Universitas Brawijaya, Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 5, Hal. 890-899
- Wibawani, Sri., Hernanda, Felixtha., dkk (2021). Evaluasi Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial Di Desa Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Syntax Idea: p* ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 5
- Wiyaka, Agus., Murti, Endang., 2019. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam perlindungan Sosial Di Kecamatan Gerih Dan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2018. Universitas Merdeka Madiun. *Jurnal Senasif*, ISSN: 2598-0076

Wulansari, Tri. (2015). Peran Masyarakat Desa Landusari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2013-2019. Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 3

Sumber Internet:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/wadaslintang_Wonosobo diunduh pada tanggal 10 April 2021 pukul 18:38 WIB

<https://humas.jatengprov.go.id> diakses pada 02 Januari 2021 pukul 20:19 WIB

<https://kecamatanwadaslintang.go.id> diakses pada 25 Januari 2021 pukul 17:17 WIB

<https://kecamatanwadaslintang.wonosobokab.go.id> diakses pada 10 April 2021 pukul 18:38 WIB

<https://kemensos.go.id> diakses pada 06 Februari 2021 pukul 13:00 WIB

<https://kominfo.ngawikab.go.id/syarat-dan-tata-cara-mendapatkan-bantuan-sosial-tunai-akibat-covid-19-dari-pemerintah/> diakses pada 23 Mei 2021 pukul 13:00 WIB

<https://wonosobokab.bps.go.id> 06 Februari 2021 pukul 13:00 WIB

Dokumen-dokumen

Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8 diakses pada 01 April 2021 pukul 16:00 WIB

Al-Quran Surah Al-Maun, surah ke 107 diakses pada 03 Juli 2021 pukul 12:30 WIB

Data Demografi Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo diakses pada 25 Januari 2021 pukul 11:00 WIB

Data Ekonomi tahun 2018 Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo diakses pada 18 Maret 2021 pukul 11:00 WIB

Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2013 diakses pada 23 Mei 2021 pukul 13:00 WIB

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKKP) Desa Besuki Tahun 2019 diakses pada 03 April 2021 pukul 18:00 WIB

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKKP) Desa Besuki Tahun 2020 diakses pada 03 April 2021 pukul 18:00 WIB

Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020 diakses pada 23 Mei 2021 pukul 13:00 WIB

Panduan TKSK Tahun 2013 diakses pada 02 Januari 2021 pukul 20:00 WIB

Panduan TKSK Program Percepatan dan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahun 2013 diakses pada 03 April 2021 pukul 18:00 WIB

Pedoman Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat diakses pada 10 Januari 2021 pukul 12:00 WIB

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (TNP2K: 2017) Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai diakses pada 30 Maret 2021 pukul 10:00 WIB

Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosisl Nomor 35 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan diakses pada 15 Januari 2021 pukul 13:30 WIB

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial diakses pada 30 Maret 2021 pukul 14:30 WIB

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 diakses pada 25 Januari 2021 pukul 11:00 WIB

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial diakses pada 02 Januari 2021 pukul 20:19 WIB

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019 diakses pada 30 Maret 2021 pukul 13:00 WIB

Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial diakses pada 30 Maret 2021 pukul 16:00 WIB

Undang-Undang RI Nomor 11 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial diakses pada 02 Ferbruari 2021 pukul 16:00 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1. Musyawarah Masyarakat Desa Besuki



Lampiran 2. Pelaksanaan Pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Besuki



Lampiran 3. Pelaksanaan Pembagian Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Besuki



Lampiran 4. Gotong Royong Pembangunan Infrastruktur Jalan Masyarakat Desa Besuki



Lampiran 5. Pelaksanaan Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) Desa Besuki



Lampiran 6. Wawancara Dengan Narasumber




Lampiran 7. Surat Pernyataan Wawancara Narasumber

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Hari/tanggal : Sabtu, 06-06-2021
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat wawancara : WAKELMILITAMA RT 5 RW 0 WADALINTANG
 Nama : VERONIKA FENI RENO DASANTI
 Usia : 80 TH
 Pendidikan : S.I.

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dede Hafidz Al Faruq mahasiswa program S1 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi "Peran Masyarakat Dalam Program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Studi di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonorebo".

Saya menyadari bahwa penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan ilmiah. Maka dari itu identitas informan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Demikian surat pernyataan saya buat dengan sukarela dan penuh dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.


Wadaslintang, 05-06-2021

 (.....
 (VERONIKA FENI RENO DASANTI.....)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Hari/tanggal : Minggu, 30 Mei 2021
 Waktu : 10.15 WIB
 Tempat wawancara : Sikapat, RT 02 RW 03 BESUKI
 Nama : Sri Erlina
 Usia : 22 tahun
 Pendidikan : SMA

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dede Hafidz Al Faruq mahasiswa program S1 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi "Peran Masyarakat Dalam Program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Studi di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonorebo".

Saya menyadari bahwa penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan ilmiah. Maka dari itu identitas informan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Demikian surat pernyataan saya buat dengan sukarela dan penuh dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

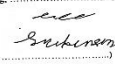
Wadaslintang, 30 Mei 2021

 (.....
 (Sri Erlina.....)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Hari/tanggal : Minggu, 30 Mei 2021
 Waktu : 10.03 WIB
 Tempat wawancara : AGEN BM Desa Besuki
 Nama : Sukarno
 Usia : 68
 Pendidikan : SD

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dede Hafidz Al Faruq mahasiswa program S1 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi "Peran Masyarakat Dalam Program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Studi di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonorebo".

Saya menyadari bahwa penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan ilmiah. Maka dari itu identitas informan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Demikian surat pernyataan saya buat dengan sukarela dan penuh dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.


Wadaslintang, 30 Mei 2021

 (.....
 (Sukarno.....)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Hari/tanggal : Minggu, 30 Mei 2021
 Waktu : 09.52 WIB
 Tempat wawancara : AGEN PENYALURAN BPNT Desa Besuki
 Nama : Sukanto
 Usia : 42
 Pendidikan : SMP

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dede Hafidz Al Faruq mahasiswa program S1 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi "Peran Masyarakat Dalam Program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Studi di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonorebo".

Saya menyadari bahwa penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan ilmiah. Maka dari itu identitas informan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Demikian surat pernyataan saya buat dengan sukarela dan penuh dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wadaslintang, 30 Mei 2021

 (.....
 (Sukanto.....)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Hari/tanggal : Minggu, 30 Mei 2021
Waktu : 09.56
Tempat wawancara : Agen BNI (perwakilan BPNP)
Nama : Painem
Usia : 65
Pendidikan : Sdc

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dede Hafidz Al Faruq mahasiswa program S1 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi "Peran Masyarakat Dalam Program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Studi di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo".

Saya meyakini bahwa penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan ilmiah. Maka dari itu identitas informan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Demikian surat pernyataan saya buat dengan sukarela dan penuh dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wadaslintang, 30 Mei2021

Painem
(.....Painem.....)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Hari/tanggal : Minggu, 30 Mei 2021
Waktu : 10.00
Tempat wawancara : Agen BNI Desa Besuki (perwakilan BPNP)
Nama : Suratman
Usia : 40
Pendidikan : SLIP

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dede Hafidz Al Faruq mahasiswa program S1 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi "Peran Masyarakat Dalam Program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Studi di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo".

Saya meyakini bahwa penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan ilmiah. Maka dari itu identitas informan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Demikian surat pernyataan saya buat dengan sukarela dan penuh dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wadaslintang, 30 Mei2021

Suratman
(.....Suratman.....)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Hari/tanggal : Minggu, 13.06.2021
Waktu : 15.00 WIB
Tempat wawancara : Rumah KPM
Nama : Timah
Usia : 36
Pendidikan : SMP

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dede Hafidz Al Faruq mahasiswa program S1 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi "Peran Masyarakat Dalam Program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Studi di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo".

Saya meyakini bahwa penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan ilmiah. Maka dari itu identitas informan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Demikian surat pernyataan saya buat dengan sukarela dan penuh dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wadaslintang, 13.06.2021

Timah
(.....TIMAH.....)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Hari/tanggal : Minggu 13.06.2021
Waktu : 16.00 WIB
Tempat wawancara : Rumah KPM
Nama : Yanti
Usia : 35
Pendidikan : SMP

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dede Hafidz Al Faruq mahasiswa program S1 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi "Peran Masyarakat Dalam Program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Studi di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo".

Saya meyakini bahwa penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan ilmiah. Maka dari itu identitas informan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Demikian surat pernyataan saya buat dengan sukarela dan penuh dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wadaslintang, 13.06.2021

Yanti
(.....Yanti.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dede Hafidz Al Faruq
2. TTL : Wonosobo, 23 Mei 1998
3. Alamat : Ngemplak RT 021 RW 005 Kel. Karanganyar, Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, Jawa Tengah (Kode pos 56365)
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Jurusan/Prodi : Sosiologi
7. Pendidikan :
 - a. SD : SD N 1 Ngalian
 - b. SMP : SMP N 1 Wadaslintang
 - c. SMA : SMA N 1 Wadaslintang
8. Pengalaman Organisasi :
 - a. Koordinator Devisi Organisasi GenBI UIN Walisongo 2019/2020
 - b. Ketua Fisip Entrepreneurship 2019/2020
 - c. Tim Media Pilar PKBI Jawa Tengah 2020/2021
9. No. HP : 0896-6890-5844
10. Email : dedefaruq24@gmail.com
11. Instagram : @gedealfaruq
12. Motto Hidup : Veritas Lux Mea

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Juni 2021

TTD



(Dede Hafidz Al Faruq)